

**LAPORAN
PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**NENGAH-NYAPPUR
(Studi Makna dan Fungsi Kearifan Lokal Nengah-
Nyappur pada Masyarakat Adat Marga Legun Paksi
Bulok, Kalianda, Lampung Selatan)**

TIM PENGUSUL

Dra. ANITA DAMAYANTIE, M.H.	0004036908, 6040289 (Ketua)
Drs. PAIRULSYAH, M.H.	0012106304, 6039999 (Anggota)
Drs. SUWARNO, M.H.	0016066516, 6040050 (Anggota)
Drs. ABDUL SYANI. M.I.P.	0004075705, 6040156 (Anggota)

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : NENGAIH-NYAPPUR (Studi Makna dan Fungsi Kearifan Lokal Nengah-Nyappur pada Masyarakat Adat Marga Legun Paksi Bulok, Kulianda, Lampung Selatan)

Manfaat Sosial Ekonomi : Pemberdayaan Masyarakat Adat

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dra. Anita Damayantie, M.H.

b. NIDN : 0004036908

c. SINTA ID : 6040289

d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

e. Program Studi : Sosiologi

f. Nomor HP : 082280046200

g. Alamat surel (e-mail) : anita.damayanti@fisip.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Drs. Pairulsyah, M.H.

b. SINTA ID : 6039999

c. Program Studi : Sosiologi

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Drs. Suwarno, M.H.

b. SINTA ID : 6040050

c. Program Studi : Sosiologi

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : Drs. Abdul Syani, M.I.P.

b. SINTA ID : 6040156

c. Program Studi : Sosiologi

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 (satu)

Jumlah alumni yang terlibat : -

Jumlah staf yang terlibat : -

Lokasi kegiatan : Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

Luaran : Laporan Penelitian

Lama kegiatan : 6 (enam) Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

Sumberdana : DIPA BLU Unila Tahun anggaran 2021

Bandar Lampung, 20 September 2021

Ketua Peneliti,

Dra. Anita Damayantie, M.H.
NIP 196903041994032002



Mengetahui,
Dekan FISIP Universitas Lampung,

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001



Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

LPPM L. Iusmellia Afriani, D.E.A
NIP 196305101993032008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
RINGKASAN	5
BAB 1. PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Khusus	8
1.4. Urgensi Penelitian	9
BAB 2. TIJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Kearifan Lokal Lampung	10
2.2. Pandangan Hidup Piil Pesenggiri	10
2.3. Pengertian dan Fungsi Nengah-Nyappur	12
2.4. Pengertian Budaya Daerah (Lokal)	15
2.5. Pengertian Masyarakat Adat Lampung	16
BAB 3. METODE PENELITIAN	18
3.1. Tipe Penelitian	18
3.2. Fokus Penelitian	18
3.3. Teknik Pengumpulan Data	18
3.4. Teknik Penentuan Informan	18
3.5. Lokasi Penelitian	19
3.6. Teknik Analisa Data	19
3.7. Alur dan Output Penelitian	20
3.8. Tugas Anggota Pengusul	20
BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	22
4.1. Gambaran Umum Desa Bulok	22
4.2. Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa	32
4.3. Peta Desa Bulok	33
BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
5.1. Deskripsi Identitas Informan	34
5.2. Makna dan Fungsi Nilai Nengah-nyappur	35
5.3. Strategi penerapan prinsip nilai Nengah-nyappur	67
5.4. Faktor-faktor Penghambat Pelestarian Nilai-nilai Nengah- Nyappur	81
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	100
6.1. Kesimpulan	100
6.2. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama-nama Kepala Desa Bulok	24
Tabel 2. Penimbang Adat Utama/Pengisi Lamban Balak	24
Tabel 3. Penimbang Adat Paksi/Perwakilan/Pemekonomian	24
Tabel 4. Batas Desa Wilayah Desa Bulok	25
Tabel 5. Jumlah Penduduk/KK berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur di Desa Bulok	26
Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama	26
Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	27
Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	27
Tabel 10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulok	28
Tabel 11. Jumlah Pengangguran Masyarakat Desa Bulok	29
Tabel 12. Prasarana Kesehatan	30
Tabel 13. Prasarana Pendidikan	31
Tabel 14. Prasaran Olahraga dan Fasilitas Umum	31

RINGKASAN

Penelitian ini memiliki implikasi besar bagi perumus kebijakan terutama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama pemerintahan adat setempat dalam upaya pencegah terjadinya konflik, sebab tujuan pelestarian prinsip *nengah-nyappur* adalah agar segenap pimpinan daerah dan *pennyimbang* adat mampu menata sikap perilaku warga adat agar dalam segala kegiatan pergaulan dan kerjasama selalu dalam kondisi rukun, serasi dan dapat memelihara persatuan. Dengan adanya persatuan antara warga adat setempat, maka diharapkan dapat terhindar dari konflik, baik yang bersifat laten maupun manifest. Kecuali itu diharapkan warga adat setempat dapat saling terbuka satu sama lain dalam menghadapi berbagai masalah. Pada akhirnya hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pemerintah dalam mempersatukan warga masyarakat pada umumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan fungsi kearifan lokal *nengah-nyappur*, upaya pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal *nengah-nyappur*, strategi upaya pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal *nengah-nyappur*, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal *nengah-nyappur* pada masyarakat adat Marga Legun Paksi Bulok, Kalianda, Lampung Selatan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini dalam prakteknya akan berusaha memahami dan menafsirkan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Tujuannya adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode ini cukup relevan untuk diterapkan dalam memperoleh gambaran mengenai nilai kearifan lokal *nengah-nyappur* latar, makna dan fungsi *nengah-nyappur* dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Di samping untuk dapat menggali lebih dalam tentang realitas sikap perilaku kearifan lokal *nengah-nyappur* dalam masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a). Fungsi *Nengah-nyappur* yaitu memelihara kepedulian dalam pelayanan kepada masyarakat, memelihara rasa tanggung jawab, meningkatkan disiplin kerja, menumbuhkan toleransi dalam masyarakat multi kultur, menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, dan memperkuat ikatan solidaritas sosial; b). Strategi Perapan Prinsip Nilai *Nengah-nyappur* yaitu: membuat sanggar budaya, membuat lembaga *penyimbang* adat, dan memperkuat sumber daya masyarakat; dan c). Faktor-faktor Penghambat Pelestarian *Nengah Nyappur* yaitu: masuknya budaya asing, perubahan pola pikir masyarakat, dan kesalahpahaman terhadap nilai-nilai *Nengah-nyappur*.

Kata Kunci: *Nengah-Nyappur*, Makna dan Fungsi Kearifan Lokal, Masyarakat Adat

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat adat Lampung pada umumnya memiliki lambang yang menunjukkan keberadaan kedua golongan adat baik Saibatin maupun Pepadun, yaitu Sang Bumi Ruwa Jurai. Sang Bumi Ruwa Jurai yang artinya sebagai *keragaman (plural)* kebudayaan, yang terdiri dari 2 (dua) kelompok adat budaya besar yang berbeda, yaitu adat *saibatin* dan *pepadun*. Akan tetapi tidak sedikit pihak yang kurang memahami makna simbol Sang Bumi Ruwa Jurai tersebut. Demikian juga dengan hadirnya etnis pendatang, ternyata sebagian mereka belum dapat (bahkan tidak) berakulturasi (berdampingan) atau bergabung dengan kedua jurai budaya Lampung yang telah ada, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan/konflik.

Sang Bumi Ruwa Jurai menganut falsafah hidup Piil Pesenggiri, yaitu bermoral tinggi yang didukung oleh identitas pribadi yang bejuluk-beadok, bersikap perilaku nemui-yimah, nengah-nyappur, dan sakai sambayan. Piil berasal dari bahasa Arab, Fiil yang berarti perilaku dan pesenggiri maksudnya keharusan bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, kewajiban memelihara nama baik dan kehormatan diri. Piil diartikan sebagai perasaan ingin besar dan dihargai (Maria, 1993:20). Falsafah hidup ini merupakan acuan masyarakat Lampung untuk selalu bersikap terbuka dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi, baik dengan sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya. Dalam praktek pergaulan kemasyarakatan sehari-hari keadaan ini senantiasa didukung oleh eksistensi aksara dan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi yang relatif efektif, karena didasari oleh nilai-nilai moral dan keimanan yang cukup tinggi, khususnya agama Islam.

Salah satu sikap watak Piil Pesenggiri ini masih nampak pada lingkungan masyarakat Lampung, seperti unsur nengah-nyappur. Bagi masyarakat adat Lampung, nengah-nyappur merupakan suatu simbol kehormatan bagi pemiliknya. nengah-nyappur berasal dari kata nengah dan nyappur. nengah artinya tengah (selalu berada ditengah masyarakat), sedangkan nyappur artinya seseorang selalu bersedia berbaur dengan kegiatan masyarakat.

Menurut Dani (2010) dalam makalah; menggali dan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal daerah Lampung dalam rangka membangun ketahanan sosial masyarakat, bahwa Nengah Nyappur, terdiri dari dua kata, yaitu kata nengah dan nyappur, nengah memiliki arti (1) kerja keras, (2) berketerampilan dan (3) pertandingan. Sedang kata nyappur berarti tenggang rasa. Untuk mampu melaksanakan dan menjaga atau kemampuan melaksanakan nemui nyimah seseorang harus kerja keras agar produksi selalu bertambah. Kerja keras itu juga harus memiliki makna tenggang rasa, karena seseorang harus bekerja bukanlah untuk kepentingan pribadi semata, melainkan dapat dinikmati bersama. Untuk mempertahankan itu maka seseorang harus memiliki karakter dan kemampuan bersaing, kompetitif.

Namun demikian dalam kenyataannya nilai-nilai budaya luhur itu mulai meredup, memudar, kearifan lokal kehilangan makna substantifnya. Upaya-upaya pelestarian hanya nampak sekedar pernyataan simbolik tanpa arti, penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun terakhir, budaya masyarakat sebagai sumber daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh, dan nampak sekedar pajangan formalitas, bahkan seringkali lembaga-lembaga budaya pada umumnya dimanfaatkan untuk komersialisasi dan kepentingan kekuasaan.

Kenyataan tersebut mengakibatkan generasi penerus bangsa cenderung kesulitan untuk menyerap nilai-nilai budaya menjadi kearifan lokal sebagai sumber daya untuk memelihara dan meningkatkan martabat dan kesejahteraan bangsa. Generasi sekarang semakin kehilangan kemampuan dan kreativitas dalam memahami prinsip kearifan lokal. Khusus kearifan lokal Lampung adalah prinsip hidup "***Piil Pesengiri***". Hal ini disebabkan oleh adanya penyimpangan kepentingan para elit masyarakat dan pemerintah yang cenderung lebih memihak kepada kepentingan pribadi dan golongan dari pada kepentingan umum.

Dari kenyataan di atas, maka perlu diputuskan untuk melakukan penelitian tentang implementasi kearifan lokal budaya nengah-nyappur pada masyarakat Lampung ini. Dengan demikian intensitas implementasi makna dan fungsi budaya nengah-nyappur diharapkan dapat diketahui secara benar dan mendalam, apakah

masyarakat Lampung setempat masih terikat atau tidak dengan budaya nengah-nyappur, dan dapat diketahui implementasi nilai budaya nengah-nyappur sesuai atau kurang sesuai dengan sejatinya identitas masyarakat berdasarkan prinsip piil pesenggiiri. Nilai budaya nengah-nyappur ini sendiri memiliki simbol yang menunjukkan tingkat sosial seseorang di dalam masyarakat adat Lampung. Semakin tinggi nilai nengah-nyappur (kemampuan hidup bermasyarakat), semakin besar pengaruhnya pula terhadap persatuan, keserasian dan persatuan masyarakat Lampung, khususnya di wilayah penelitian ini.

Berdasarkan kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul "NENGAH-NYAPPUR (Studi makna dan fungsi kearifan lokal Nengah-nyappur pada masyarakat Adat Marga Legun Paksi Bulok, Kalianda, Lampung Selatan)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur?
2. Apa pentingnya Upaya Pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur?
3. Bagaimana Strategi upaya Pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur?
4. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya Pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur pada masyarakat adat Marga Legun Paksi Bulok, Kalianda, Lampung Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur; 2). Untuk mengetahui Upaya Pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur; 3). Untuk mengetahui Strategi upaya Pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur; dan 4). Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya Pelestarian makna dan fungsi

kearifan lokal nengah-nyappur pada masyarakat adat Marga Legun Paksi Bulok, Kalianda, Lampung Selatan.

1.4. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi besar bagi perumus kebijakan terutama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama pemerintahan adat setempat dalam upaya pencegah terjadinya konflik, sebab tujuan pelesyarian prinsip nengah-nyappur adalah agar segenap pimpinan daerah dan pennyimbang adat mampu menata sikap perilaku warga adat agar dalam segala kegiatan pergaulan dan kerjasama selalu dalam kondisi rukun, serasi dan dapat memelihara persatuan. Dengan adanya persatuan antara warga adat setempat, maka diharapkan dapat terhindar dari konflik, baik yang bersifat laten maupun manifest. Kecuali itu diharapkan warga adat setempat dapat saling terbuka satu sama lain dalam menghadapi berbagai masalah. Pada akhirnya hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pemerintah dalam mempersatukan warga masyarakat pada umumnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kearifan Lokal Lampung

Kearifan Lokal secara umum diartikan sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Cirinya adalah: 1. Mampu mempertahankan nilai-nilai budaya asli dari terpaan budaya luar; 2. Mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar yang sesuai dan positif; 3. Mampu mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli sebagai suatu kemajuan; 4. Mampu mengendalikan dan memberdayakan perbedaan sebagai suatu khasanah kekayaan budaya lokal; 5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya sesuai dengan perkembangan / tuntutan jaman.

Meskipun dalam perkembangannya masyarakat cenderung cemas bahkan ragu terhadap kemungkinan nilai-nilai luhur budaya itu dapat menjadi model kearifan lokal, akan tetapi upaya menggali kearifan lokal tetap niscaya dilakukan. Masyarakat adat daerah memiliki kewajiban untuk kembali kepada jati diri mereka melalui penggalian dan pemakaian nilai-nilai luhur budaya yang ada sebagai sumber daya kearifan lokal. Upaya ini perlu dilakukan untuk menguak makna substantif kearifan lokal, di mana masyarakat harus membuka kesadaran, kejujuran dan sejumlah nilai budaya luhur untuk sosialisasikan dan dikembangkan menjadi prinsip hidup yang bermartabat. Misalnya nilai budaya “nengah-nyappur” sebagai kehalusan budi berkewajiban untuk selalu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat.

2.2. Pandangan Hidup Piil Pesenggiri

Bentuk kearifan lokal Lampung yang khas mengandung nilai budaya luhur adalah Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri ini mengandung pandangan hidup masyarakat yang diletakkan sebagai pedoman dalam tata pergaulan untuk memelihara kerukunan, kesejahteraan dan keadilan. Piil Pesenggiri merupakan harga diri yang berkaitan dengan perasaan kompetensi dan nilai pribadi, atau merupakan perpaduan antara kepercayaan dan penghormatan diri. Seseorang yang memiliki Piil Pesenggiri

yang kuat, berarti mempunyai perasaan penuh keyakinan, penuh tanggungjawab, kompeten dan sanggup mengatasi masalah-masalah kehidupan.

Etos dan semangat kelampungan (*spirit of Lampung*) piil pesenggiri itu mendorong orang untuk bekerja keras, kreatif, cermat, dan teliti, orientasi pada prestasi, berani kompetisi dan pantang menyerah atas tantangan yang muncul. Semua karena mempertaruhkan harga diri dan martabat seseorang untuk sesuatu yang mulia di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat adat Saibatin dan Pepadun menganut sumber/kitab yang sama dalam menentukan fahsafah hidupnya, yaitu berdasarkan kitab Kuntara Raja Niti. Menurut kitab Kuntara Raja Niti, orang Lampung memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Piil-pusanggiri (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri).Pi`il Pusanggiri diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun secara berkelompok senantiasa dipertahankan. Dalam hal-hal tertentu seseorang (Lampung) dapat mempertaruhkan apa saja termasuk nyawanya demi untuk mempertahankan pi`ill pesenggiri tersebut.
2. Juluk-adok (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya).Bejuluk Beadok adalah didasarkan kepada "Titei Gemettei" yang diwarisi tutun temurun dari zaman dahulu, tata ketentuan pokok yang selalul diikuti (Titei Gemettei) termasuk antara lain menghendaki agar seseorang disamping mempunyai nama juga diberi gelar sebagai panggilan terhadapnya. Bagi orang yang belum berkeluarga diberi juluk (bejuluk) dan setelah kawin di beri gelar.
3. Nemui-nyimah (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu).nemui Nyimah diartikan sebagai bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam satu klan maupun dari luar klan dan juga terhadap siapa saja yang berhubungan dengannya.
4. Nengah-nyampur (aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis).Nengah Nyapur adalah tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesempatan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan berpengetahuan luas, serta ikut berpartisipasi dalam segala hal yang bersifat baik, yang dapat membawa kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman.
5. Sakai-sambaian (gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya). Sakai Sambayan meliputi beberapa pengertian yang luas termasuk di dalamnya gotong royong, tolong menolong, bahu membahu, dan saling memberi terhadap sesuatu yagn diperlukan bagi

pihak-pihak lain. Dalam hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat materi saja, tetapi juga dalam arti moril termasuk sumbangan pikiran dan lain sebagainya.

Unsur-unsur piil pesenggiri (prinsip kehormatan) selalu berpasangan, juluk berpasangan dengan adek, nemui dengan nyimah, nengah dengan nyappur, sakai dengan sambai. Penggabungan itu bukan tanpa sebab dan makna. Juluk adek (terprogram, keberhasilan), nemui nyimah (prinsip ramah, terbuka dan saling menghargai), nengah nyappur (prinsip suka bergaul, terjun dalam masyarakat, kebersamaan, kesetaraan), dan sakai sambaian (prinsip kerjasama, kebersamaan). Sementara itu bagi masyarakat adat Lampung Saibatin menempatkan Piil Pesenggiri dalam beberapa unsur, yaitu: *ghepot delom mufakat* (prinsip persatuan); *tetengah tetanggah* (prinsip persamaan); *bupudak waya* (prinsip penghormatan); *ghopghama delom beguwai* (prinsip kerja keras); *bupiil bupesenggiri* (prinsip bercita-cita dan keberhasilan).

2.3. Pengertian dan Fungsi Nengah-nyappur

Secara harfiah nengah-nyappur dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, bersahabat dengan siapa saja, aktif dalam pergaulan bermasyarakat, tidak individualistis, dan mempunyai sikap toleransi antara sesama.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pengertian nengah-nyappur berasal dari kata nengah dan nyappur; nengah artinya di tengah, ke tengah, yaitu selalu bersedia berada ditengah masyarakat untuk berinisiatif membantu secara langsung menyelesaikan masalah; sedangkan nyappur artinya berbaur, yaitu memiliki kerelaan yang selalu bersedia berada ditengah masyarakat untuk membantu secara langsung menyelesaikan masalah masyarakat tersebut. Jadi prinsip *Nengah nyappur* menunjuk adanya upaya bermusyawarah untuk menghasilkan kesepakatan, baik dalam kegiatan perencanaan maupun dalam rangka membuat suatu keputusan kerjasama. Dalam mencapai kemufakatan setiap pribadi harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab serta berjiwa profesional.

Menurut abdulsyani, bahwa Sikap *nengah-nyappur* juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna. Warga masyarakat pada umumnya terbiasa *nyappur* dalam arti bercampur dan berinteraksi dengan orang lain.³⁰Suku Lampung aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan akan merasa sangat malu bila tidak ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan kemasyarakatan.

Menurut Mastal (1995), bahwa seseorang yang sudah dapat dikatakan memenuhi kriteria *nengah-nyappur* apabila yang bersangkutan sudah berkemampuan untuk memberikan ide-ide pemikirannya untuk kepentingan masyarakat luas dan berkemampuan untuk menerima ide-ide pemikiran orang lain untuk keperluan yang sama, sehingga dengan falsafah hidup *piil pesenggiri* yang terdapat dalam unsur *nengah-nyappur* kehidupan masyarakat menjadi sejahtera dan dinamis.

Nilai-nilai *nengah nyappur* yang memiliki corak kebersamaan (komunal) mengutamakan kepentingan bersama yang didasarkan pada rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong. *Nengah nyappur* juga merupakan pencerminan dari asas musyawarah mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah, tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Pengetahuan karena pergaulan dan jaringan yang luas tentu dapat menghasilkan yang terbaik dalam setiap pengambilan sebuah keputusan.

Nengah nyappur juga menjadi landasan pergaulan orang Lampung yang selayaknya berwawasan dan berpikiran terbuka karena bergaul dan berinteraksi dengan berbagai macam latar belakang.

Berdasarkan hal-hal positif dalam konsep *nengah nyappur* tersebut, potensi adat budaya Lampung ini perlu tetap dilestarikan sebagai kerangka dasar pola pembangunan baik dalam rangka pelestarian hukum adat dan budaya maupun sebagai sumber motivasi dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berwawasan budaya.

Dengan demikian, diharapkan sumber daya masyarakat adat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber motivasi dalam upaya menggali potensi sosial daerah. (<https://m.lampost.co/berita-nengah-nyappur-nilai-sosial-pergaulan-2.html>)

Oleh karena *nengah-nyappur* tersebut berkaitan dengan kepentingan bersama yang didasarkan pada rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong, maka prinsip *nengah-nyappur* sangat bermanfaat bagi kemudahan masyarakat dalam rangka memperkuat tali silaturahmi antar warga masyarakat, mempermudah penyelesaian masalah dan menjamin kerukunan masyarakat. Artinya tata nilai budaya *nengah-nyappur* ini padadasarnya merupakan kebutuhan hidup dasar bagi seluruh anggota masyarakat adat setempat agar tetap dapat bertahan secara wajar dalam membina kehidupan dan penghidupannya yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat adat maupun bermasyarakat secara luas, di mana seseorang dituntut untuk selalu bersedia berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian masalah-masalah sosial. Dengan tradisi *nengah-nyappur*, berarti setiap warga masyarakat senantiasa dididik untuk membangun keperdulian antar sesama secara nyata, khususnya terapan dalam upaya membangun kepentingan bersama masyarakat setempat. Menurut Abdulsyani dalam makalah Falsafah hidup masyarakat Lampung sebuah wacana terapan (<http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/02/falsafah-hidup-masyarakat-lampung-sebuah-wacana-terapan/>), dinyatakan bahwa sikap *nengah nyappur* melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan seklaiigus merupakan embrio dari

kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup nengah-nyappur secara wajar dan positif.

Sikap nengah-nyappur juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna.

2.4. Pengertian Budaya Daerah (Lokal)

Budaya pada hakikatnya adalah suatu hal yang diturunkan secara turun – temurun oleh nenek moyang kita. Semua hal itu cukup luas, contohnya adalah sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Lokal sendiri diartikan sebagai sebuah daerah. Jadi, pengertian dari budaya lokal adalah suatu hal yang dipercaya atau digunakan dalam kehidupan sehari – hari di dalam sebuah daerah. Budaya lokal biasanya menjadi sebuah ciri khas dari sebuah daerah. Misalkan budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Tengah dalam hal berbicara yaitu berkata dengan lembut dan juga sopan dan santun (dikuti: dari: <http://wayansumendra.wordpress.com/2013/08/25/kearifan-lokal-budaya-3>).

Pemahaman lain menyatakan bahwa kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam suatu wilayah dengan melestarikan kebudayaan lama serta asli yang terdapat di daerah-daerah diseluruh nusantara. Kebudayaan daerah merupakan sumber bagi pengembangan kebudayaan nasional sebagaimana diamanahkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 bahwa, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya akan lebih kokoh jika diperkuat oleh pendekatan kebudayaan selain pendekatan politik dan hukum (UUD 1945 & Amandemen, Untuk Pelajar dan Umum beserta susunan Kabinet Kerja masa bakti 2014-2019).

2.5. Pengertian Masyarakat adat Lampung

Secara garis besar, masyarakat Lampung dapat dikelompokkan ke dalam dua rumpun atau jurai, yaitu Pepadun dan Saibatin. Masyarakat Pepadun adalah mereka yang mendiami daerah-daerah di Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang dan daerah-daerah pedalam, sedangkan Saibatin kebanyakan menghuni daerah-daerah pinggiran pantai atau pesisir. Masyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Propinsi Sumatera Selatan, Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung, masing masing terdiri dari: Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat), Keratuan Melinting (Lampung Timur), Keratuan Darah Putih (Lampung Selatan), Keratuan Semaka (Tanggamus), Keratuan Komerling (Provinsi Sumatera Selatan), dan Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten). (dikutip dari: <https://media.neliti.com/media/publications/56756-ID-lembaga-perwatin-dan-kepunyimbangan-dala.pdf>)

Masyarakat adat Lampung pada umumnya memiliki lambang yang menunjukkan keberadaan kedua golongan adat tersebut, yaitu Sang Bumi Ruwa Jurai. Sang

Bumi Ruwa Jurai yang artinya sebagai *keragaman (plural)* kebudayaan, yang terdiri dari 2 (dua) kelompok adat budaya besar yang berbeda, yaitu adat *saibatin* dan *pepadun*. Akan tetapi tidak sedikit pihak yang kurang memahami makna simbol Sang Bumi Ruwa Jurai tersebut. Demikian juga dengan hadirnya etnis pendatang, ternyata sebagian mereka belum dapat (bahkan tidak) beralkulturasi (berdampungan) atau bergabung dengan kedua jurai budaya Lampung yang telah ada.

Masyarakat adat Lampung adalah kelompok etnis masyarakat yang mendiami wilayah provinsi Lampung yang sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung didiami oleh 2 (dua) golongan masyarakat asli dan penduduk pendatang. Masyarakat adat asli terdiri dari 2 kelompok besar kebuwaian, marga atau keturunan, yaitu masyarakat adat Pepadun dan masyarakat adat Saibatin. Masyarakat pendatang itu kemudian beradaptasi dengan masyarakat adat budaya Lampung, baik dengan masyarakat adat pepadun, maupun dengan masyarakat adat saibatin. Bagi masyarakat pendatang yang domisili, bergabung dan berakulturasi dengan masyarakat adat pepadun, kemudian disebut sebagai masyarakat adat Lampung pepadun. Demikian juga bagi masyarakat pendatang yang domisili, bergabung dan berakulturasi dengan masyarakat adat saibatin, kemudian disebut sebagai masyarakat adat Lampung sebatin.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini dalam prakteknya akan berusaha memahami dan menafsirkan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode ini cukup relevan untuk diterapkan dalam memperoleh gambaran mengenai nilai kearifan lokal nengah-nyappur latar, makna dan fungsi nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Di samping untuk dapat menggali lebih dalam tentang realitas sikap perilaku kearifan lokal nengah-nyappur dalam masyarakat setempat.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah:

1. Makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur
2. Upaya Pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur
3. Strategi upaya Pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur
4. Faktor-faktor Penghambat upaya Pelestarian makna dan fungsi kearifan lokal nengah-nyappur.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi kepustakaan/literatur.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan teknik *purposive* (secara bertujuan) dan *snowball sampling* (berkembang terus), sampai data yang dikumpulkan dapat memuaskan. Penentuan informan haruslah memenuhi pertimbangan tertentu, yaitu menentukan orang-orang yang telah diketahui mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan memahami permasalahan tentang nilai-nilai kearifan lokal fiil pesenggiri nengah-nyappur.

3.5. Lokasi Penelitian

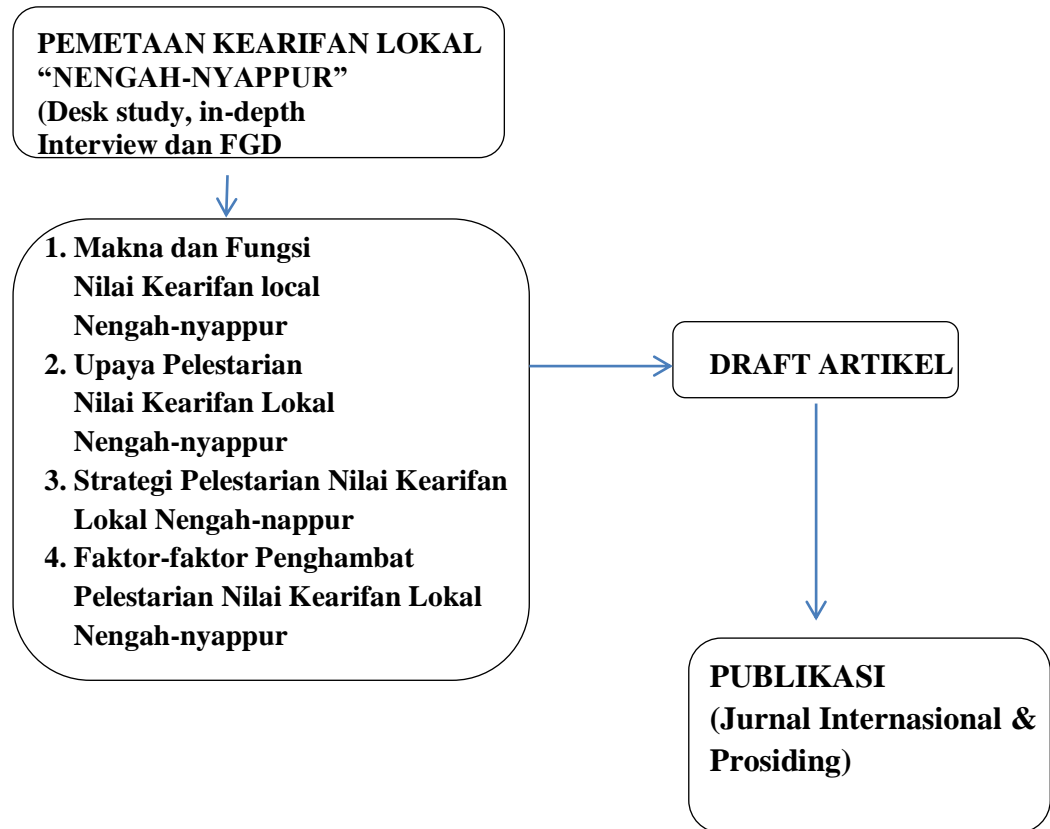
Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya masyarakat Adat Marga Legun Paksi Bulok, Kalianda, Lampung Selatan. Alasan memilih lokasi ini adalah: *Pertama*, masyarakat setempat sebagian besar masih termasuk dalam kelompok keturunan kepenyimbangan adat sesuai dengan kepemilikan silsilah masing-masing. *Kedua*, karena para penyimbang/tokoh senior adat pada Marga ini diketahui masih menyimpan dokumen-dokumen adat. *Ketiga* karena wilayah masyarakat Adat setempat diketahui dihuni oleh masyarakat adat Lampung bersama dengan masyarakat pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, yang mungkin berpengaruh terhadap praktik perilaku kearifan lokal nengah-nyappur. *Keempat*, kehidupan masyarakat setempat di mungkin dapat ditemukan model akulturasi atau asimilasi yang berkaitan dengan fungsi adat istiadat lokal dalam kehidupan sehari-hari. *Kelima*, pada masyarakat adat di wilayah Lampung Selatan mempunyai nilai-nilai kearifan lokal piil pesenggiri, khususnya elemen nengah-nyappur sebagai nilai dasar yang mengikat kehidupan bersama.

3.6. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan data sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Secara garis besar langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi menurut teori Millies dan A, Michael Huberman (1997:16-19) yaitu: reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi

3.7. Alur dan Output Penelitian

Adapun alur proses dan indikator capaian (output penelitian) yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



3.8. Tugas Anggota Pengusul

No	Nama/ NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/ minggu)	Uraian Tugas
1	Dra. Anita Damayantie M.H./ 0004036908	Universitas Lampung	Kearifan Lokal	20	1) <i>Top leader</i> (penanggung- jawab) 2) Pengarah orientasi penelitian 3) Memanajementi dan mengkoordinasikan semua kegiatan penelitian 4) Penyusunan luaran-luaran penelitian

2	Drs. Pairulsyah, M.H./ 0012106304	Universitas Lampung	Pemetaan Sosial	10	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tenaga ahli pendamping membantu ketua 2) Mengkoordinasikan kegiatan riset lapang 3) Mengelola dan merumuskan temuan riset 4) Mempresentasikan dan mempublikasikan hasil temuan serta penyusunan jurnal dan prosiding
3	Drs. Abdul Syani. M.I.P./ 0004075705	Universitas Lampung	Pembedayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal	10	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tenaga ahli pendamping membantu ketua 2) Mengkoordinasikan kegiatan riset lapang 3) Mengelola dan merumuskan temuan riset 4) Mempresentasikan dan mempublikasikan hasil temuan serta penyusunan jurnal dan prosiding
4	Drs. Suwarno, M.H./ 0016066516	Universitas Lampung	Perencanaan Sosial	10	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tenaga ahli pendamping membantu ketua 2) Mengkoordinasikan kegiatan riset lapang 3) Mengelola dan merumuskan temuan riset 4) Mempresentasikan dan mempublikasikan hasil temuan serta penyusunan jurnal dan prosiding
4	Deni Kurniawan	Mahasiswa	-		<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan, mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan riset 2) Koordinator teknis di lapangan 3) Membantu kegiatan pengumpulan data dan pendokumentasian 4) Enumerator

BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab. ini dipaparkan tentang gambaran umum daerah penelitian yang dianggap representatif, yaitu Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Desa Bulok Kecamatan Kalianda. Lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan hasil observasi awal yang diketahui memiliki potensi kearifan lokal piil pesengiri, khususnya unsur tradisi “nengah-nyappur” (kebiasan perilaku selalu berbaur di tengah kegiatan dalam kehidupan masyarakat).

4.1. Gambaran Umum Desa Bulok

1. Sejarah Desa

Pada mulanya Desa Bulok berada di area pemukiman orang yang mengurus perkebunan kelapa dan tanaman lainnya yang masing- masing yang satu dengan lainnya saling berjauhan yang disebut Bumbulan, sementara penamaan Bulok menurut kamus bahasa Lampung berarti “ keruh ” yang mungkin diambil kata tersebut untuk menyebut airnya pada waktu itu sedikit keruh atau khubok (Bulok).

Seiring dengan berjalannya waktu dan keinginan masyarakat yang kian bertambah dan berkembang kian mulailah membangun tempat tinggal didekat jalan raya (Sungai Balok) yang pada waktu itu masih jalan setapak dan becek, dan mulailah para sesepuh desa (Tokoh adat) berkumpul dan bermusyawarah untuk membahas keinginan masyarakat untuk tinggal di dekat jalan besar agar mudah bersosialisasi dengan warga lainnya, dan dengan dipelopori oleh tokoh adat yakni Datuk Raja Baginda untuk bermusyawarah membangun pedukuhan bulok, beliau menghibahkan sebagian lahannya kepada masyarakat untuk pembangunan Balai Desa dan Masjid Tempat Peribadatan serta untuk pemukiman masyarakat. Dan pada tahun 1986 pertama Pekon Bulok resmi menjadi desa yang di pimpin oleh Kepala desa yang pertama yakni Datuk Yahya Raden Tihang. Semakin lama semakin banyak yang datang dan bermukim dan kebanyakan dari pulau Jawa yang merantau ataupun ikut kerja di Perusahaan Perkebunan. Sampai sekarang warga Desa Bulok sebagian besar adalah warga pendatang yang bahu membahu membangun untuk kemajuan dan kesejahteraan serta kemandirian Desa.

Para pejabat Kepala Desa Bulok semenjak berdirinya Desa Bulok adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Nama-nama Kepala Desa Bulok

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Keterangan
1	Yahya Raden Tihang	1968 s/d 1982	Tiada/ada
2	Temenggung Warta Manggala	1982 s/d 1991	Tiada/ada
3	Andi Azis Lahar	1991 s/d 1999	Tiada/ada
4	Samsuddin HR	1999 s/d 2015	Tiada/ada
5	M.Kuswanto	2015 s/d Skr	Tiada/ada

Sumber: Monografi Desa Bulok 2020

Sedangkan perangkat Pemerintahan Adat Pusat Buwai/Marga Legun Kesugihan pusat sekretariat Desa/Pekon Kesugihan berdasarkan dokumen adatnya yang berlaku saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Penyimbang Adat Utama/Pengisi Lamban Balak

No	Nama	Adok	Ket.
1	Azhar	Pengiran Tihang Marga	Kepala Adat
2			
3			

Sumber: Ketrangan masyarakat Desa Bulok 2020

Tabel 3. Penyimbang Adat Paksi/Perwakilan/Pemekonan:

No	Nama	Adok	Ket.
1	Halim	Temenggung Warta Menggala	Penyimbang Adat
2	Deni Menggala Putra	Raden Tihang	idem
3	Yulius	Batin Dalam	idem
4			

Sumber: Buku Adat Buwai /Marga Legun Kesugihan Desa Bulok 2020

2. Demografi Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan desa dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting dalam rangka membuat keputusan pembangunan sebagai langkah untuk mendayagunakan dan penyelesaian masalah dalam masyarakat.

Desa Bulok merupakan salah satu dari (25) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kalianda, yang terletak di sepanjang 22 Km dari Ibukota Kecamatan Kalianda. Desa Bulok mempunyai luas wilayah seluas 1320. hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Bulok adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Batas Desa Wilayah Desa Bulok

No	Batas Wilayah	Desa
1	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Desa Sukamarga
2	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Merak Belantung
3	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa Munjuk Sempurna dan Desa Gunung Terang
4	Sebelah barat	Berbatasan dengan Desa Sukamaju

Sumber: Monografi Desa tahun 2020

Iklim Desa Bulok, sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia, khususnya desa-desa sekitar mempunyai iklim dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat yang ada di Desa Buloj Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.

a. Jumlah Penduduk Desa

Penduduk Desa Bulok. terdiri dari 5 (Lima) Dusun, yaitu Dusun 1 Bulok, Dusun 02 Bulok, Dusun 03 Sepepih, Dusun 04 Damar Berak dan Dusun 05 Lansak Utan, dengan jumlah pendudu 2.392 Jiwa atau 704 KK., dengan perincian sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk/KK berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.228
2	Perempuan	1.164
3	Jumlah Kepala Keluarga	704
Jumlah		2.392

Sumber: Monografi Desa tahun 2020

b. Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur

Jumlah penduduk menurut golongan umur ini merupakan data/informasi yang berguna untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah

angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Bulok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur di Desa Bulok

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 s/d 1 tahun	Belum diketahui pasti
2	1 s/d 3 tahun	idem
3	3 s/d 7 tahun	idem
4	7 s/d 12 tahun	idem
5	12 s/d 15 tahun	idem
6	15 s/d 18 tahun	idem
7	18 s/d 60 tahun	idem
Jumlah		2.392

Sumber: Data potensi sosial ekonomi desa tahun 2020

c. Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk Agama

Ditinjau dari segi Agama dan aliran kepercayaan masyarakat Desa Bulok mayoritas memeluk Agama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah / orang
1	Islam	2.392
2	Kristen	0
3	Katholik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Aliran Kepercayaan	0
Jumlah		2.392

Sumber: Monografi Desa tahun 2020

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia, khususnya bagi penduduk Desa Bulok Kecamatan Kalianda. Kualitas sumberdaya manusia ini berkaitan dengan proses pembangunan desa, karena lancar atau tidaknya pembangunan Desa Bulok sangat membutuhkan tenaga yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi dirasakan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA relatif jauh dari lokasi pemukiman warga, di samping masih rendahnya kesadaran

masyarakat dalam mendorong anggota keluarganya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika dilihat dari data statistik terlihat masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah / orang
1	Tidak sekolah / buta huruf	51
2	Tidak tamat SD/ sederajat	505
3	Tamat SD/ sederajat	802
4	Tamat SLTP/ sederajat	654
5	Tamat SLTA/ sederajat	330
6	Tamat Diploma/S	50
Jumlah		2.392

Sumber: Data potensi sosial ekonomi desa tahun 2020

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Desa Bulok sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan petani pemilik lahan. Sebagian lainnya bekerja disektor swasta, pedagang, PNS/TNI/Polri, dan lain-lainnya. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data tentang mata pencarian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencarian/pekerjaan	Jumlah / orang
1	Tani	625
2	Dagang	40
3	Buruh Tani	280
4	PNS/TNI/Polri	16
5	Swasta	50
6	Lain-lain	1.381
Jumlah		2.392

Sumber: Monografi Desa tahun 2020

3. Keadaan Sosial

Di Desa Bulok dalam perkembangannya semakin banyak kegiatan yang perlu dilakukan secara terorganisir dengan membentuk berbagai kelompok organisasi, seperti organisasi yang menghimpun Remaja Masjid, Karang Taruna, kelompok pengajian, Yasinan, Tahlilan, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok arisan dan lain-lain. Organisasi berbagai bidang sosial ini merupakan aset desa yang diharapkan dapat bermanfaat, terutama sebagai media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat. Keadaan sosial masyarakat Desa Bulok dilihat dari tingkat kesejahteraannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulok

No	Uraian Tingkat Kesejahteraan	Jumlah / KK
1	Penduduk tergolong miskin / kurang	Belum terdata
2	Penduduk tergolong sedang / cukup	idem
3	Penduduk tergolong Sejahtera / kaya	idem
Jumlah KK		704

Sumber: Monografi Desa tahun 2020

Sedangkan Tingkat Pengangguran warga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Jumlah Pengangguran Masyarakat Desa Bulok

No	Uraian Jumlah Pengangguran	Jumlah / orang
1	Jumlah Penduduk usia 15 s/d 55 tahun yang belum bekerja	Belum terdata
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun yang belum bekerja	idem
Jumlah		-

Sumber: Monografi Desa tahun 2020

4. Keadaan Ekonomi

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bulok bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk desa setempat adalah kurang tersedianya lapangan kerja yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sama dengan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan daerah selama ini. Berkaitan dengan masalah ekonomi masyarakat ini, maka hal

yang perlu diperhatikan sekarang dan masa yang akan datang adalah memperhatikan dan mencari strategi pembangunan desa yang unggul. Untuk mewujudkan strategi ini, maka sesegera mungkin melakukan usaha perluasan lapangan dan kesempatan kerja, sekaligus melakukan penguatan usaha kecil dengan memberikan kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan.

Di lain pihak sebagaimana diketahui bahwa tingkat / angka kemiskinan di Desa Bulok yang masih relatif tinggi menjadikan Desa Bulok terdesak harus bisa mencari berbagai peluang dan kesempatan lain agar dapat menunjang peningkatan kesejahteraan ekonomi atau taraf kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi.

Keadaan sumber daya alam yang ada di Desa Bulok diketahui amat mendukung untuk menuju usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat itu, baik dari segi pengembangan ekonomi maupun dari segi sosial budaya. Kecuali itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan Dua (2) kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoulyo dan Kecamatan Kalianda Kondisi ini memungkinkan terbukanya peluang pengembangan usaha, terutama di sektor perdagangan.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Desa yang dibukukan dalam ABPDesa pada setiap tahun anggaran. Menurut peraturan Desa Bulok Tahun 2020, bahwa Sumber Pendapatan Desa adalah:

1. Sumber Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya, dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lan pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - f. f. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
 3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun kekayaan desa terdiri dari:

1. Tanah kas desa
2. Bangunan desa yang dikelola desa
3. Lain-lain kekayaan milik desa

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Bulok adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam, di samping memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat dan tradisi yang berlaku.

5. Sarana dan Prasarana Desa

Pembangunan Masyarakat desa diharapkan bersumber dari diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

a. Prasaran Kesehatan

Tabel 12. Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah/unit
1	Posyandu	5
2	Lansia	5
3	Posbindu	5
4	Polindes	-
5	Bidan Desa	1 orang
Jumlah		16

Sumber: Monografi Desa tahun 2020

b. Prasarana Pendidikan

Tabel 13. Prasarana Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah/unit
1	Tn kanak-kanak	2
2	SD/MI	2
3	SLTP/MTs	1
4	SLTA/MA	-
5	TPA/TPQ	3
Jumlah		8 unit

Sumber: Monografi Desa tahun 2020

c. Prasaran olahraga dan fasilitas umum

Tabel 14. Prasaran Olahraga dan Fasilitas Umum

No	Prasarana olahraga dan fasilitas umum	Jumlah/unit
1	Lapangan Olah raga	3
2	Gedung Serba Guna	-
3	Sekolah	2
Jumlah		5 unit

Sumber: Monografi Desa tahun 2020

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahap berkelanjutan, di mulai dengan proses peryiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional, adil dan semakin sadar akan hak dan kewajiban dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhan sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan;
- Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak

- (stakeholder) untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
- c. Kapasitas Pemerintah Daerah meningkat, sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
 - d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
 - e. Prestasi masyarakat desa baik bidang akademik maupun olahraga yang tentunya membawa nama baik desa di daerah luar.

6. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Bulok adalah 1340 hektar, yang terdiri dari lima (5) Dusun, yaitu Dusun. Perangkat Desa menurut jenis jabatan di Desa Bulok terdiri dari 1 (satu) Kepala Desa, 1 (satu) Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Lima (5) Kepala Dusun. Di samping itu Desa Bulok terdiri dari tujuh (7) Rukun Warga (RW) dan tujuh (7) Rukun Tetangga (RT).

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No.06 tahun 2014, bahwa di dalam Desa terdapat 3 (tiga) kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala

Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan D terdiri dari Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

4.2. Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa



4.3. Peta Desa Bulok



Sumber: Monografi Desa tahun 2020

BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan data atau informasi hasil wawancara mendalam dengan segenap informan yang di tunjuk sebagaimana ditentukan dalam metode penelitian sebelumnya. Informasi hasil penelitian langsung berupa data mentah dari informan tidak dituangkan dalam laporan, melainkan merupakan informasi yang telah diolah dan dianalisis menurut ketentuan penulisan ilmiah. Wawancara dilaksanakan sesuai dengan waktu kesepakatan pada pra riset, sehingga tidak mengganggu waktu dan tempat bagi informan yang berkaitan dengan pekerjaan rutin mereka, baik sebagai petani, pedangan, karyawan, ataupun sebagai wirausaha lainnya. Di samping data/informasi primer dari hasil wawancara mendalam, juga diperoleh data dari hasil pengamatan/observasi di lapangan tempat/lokasi penelitian, seperti kondisi sekitar rumah penduduk, kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan urusan adat kebiasaan, dan tempat pusat-pusat kesekretariatan Pemerintahan Adat setempat. Untuk kegiatan penelitian yang menggunakan metode wawancara mendalam dilakukan melalui proses tanya-jawab yang berlangsung secara lisan dan mendengarkan secara langsung keterangan informan tentang tujuan penelitian ini. Kemudian hasil penelitian ini dideskripsikan secara sistematis tentang kearifan lokal makna dan fungsi nilai bejuluk-beadok, upaya pelestarian prinsip bejuluk-beadok, strategi pelestarian prinsip bejuluk-beadok, dan faktor-faktor yang menghambat pelestarian prinsip bejuluk-beadok dalam kehidupan masyarakat adat setempat.

5.1. Deskripsi Identitas Informan

Identitas informan dalam penelitian ini merupakan bagian penting sebagai sumber utama yang diharapkan dapat melengkapi data sebagai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Tanpa adanya informan yang dapat digali dari informan, maka penelitian ini tidak mungkin dapat memperoleh data atau hasil penelitian yang akurat, kesediaan para informan dari pemerintahan adat dan masyarakat adat di Kabupaten Lampung Selatan, sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut akan di jelaskan sekilas mengenai informan penelitian yang berjumlah 3 (enam) orang pwnyimbang adat, yaitu:

1. Halim Gelar Temenggung Warta Menggala berumur \pm 64 tahun. Beliau merupakan penyimbang adat kepaksian di Pekon Bulok yang diketahui banyak memahami tugas-tugas pokok kepenyimbangan yang berkaitan dengan kegiatan adat. Pekerjaan sehari-hari di samping sebagai penyimbang bandar, juga bekerja sebagai petani dan perkebunan sebagai sumber penghasilan keluarganya. Dalam kegiatan kemasyarakatan, beliau dikenal ramah, suka bergaul dalam masyarakat dan peduli terhadap keadaan warga, khususnya warga adat di bawah kepemimpinannya.
2. Deni Menggala Putra Gelar Radin Tihang umur \pm 24 tahun. Beliau tamatan S1 Sosiologi Fisip Unila merupakan Penyimbang Paksi muda di Pekon Bulok. Beliau diketahui berpengalaman dalam pergaulan dengan masyarakat adat, terutama seringkali ditugaskan dalam acara hippun adat dalam masalah adat. Informan ini bekerja sebagai karyawan swasta, di samping sebagai petani di desa.
3. Yulius gelar Batin Dalom umur 45 tahun. Beliau adalah informan yang ketiga yang diketahui banyak mengetahui prinsip hidup orang Lampung, terutama sebagai penyimbang adat kepaksian dari kebandaran Marga Legun Kesugihan. Pekerjaan tetap sebagai penopang kehidupan ekonominya adalah sebagai petani. Dalam kegiatan adat beliau memiliki tugas pokok sangat penting dan menentukan, terutama dalam penataan struktur pemerintahan adat, perencanaan, musyawarah adat, dan termasuk penentu kebijakan dalam penyelesaian masalah adat. Oleh karena itu di harapkan dapat memberikan informasi yang akurat, khususnya tentang standar tata cara adat dalam pergaulan masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal prinsip hidup nemui-nyimah.

5.2. Makna dan Fungsi Nilai Nengah-nyappur

Seperti telah dipaparkan dalam kajian pustaka bahwa nengah-nyappur dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka mengunjungi teman untuk silaturahmi, peduli dan murah hati terhadap sesama dan pada prinsipnya selalu aktif ikutserta dalam setiap kegiatan masyarakat. Secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu kata nengah dan nyappur, nengah memiliki arti (1) kerja keras, (2) berketerampilan dan

(3) pertandingan. Sedang kata nyappur berarti tenggang rasa. Untuk mamapu melaksanakan dan menjaga atau kemampuan melaksanakan nengah-nyappur seseorang harus kerja keras agar hidup menjadi produktif. Kerja keras itu juga harus memiliki makna tenggang rasa, karena seseorang harus bekerja bukanlah untuk kepentingan pribadi semata, melainkan dapat dinikmati bersama. Untuk mempertahankan itu maka seseorang harus memiliki karakter dan kemampuan bersaing, kompetitif.

Menurut informan 1 (wawancara mei 2021) bahwa:

“Nengah-nyappur atau dalam istilah kami adalah tengah-tetangah bisa disebut sebagai kegiatan hubungan antar warga, di mana setiapwarga merasa puas apabila dapar selalu bersama-sama di tengah-tengah aktivitas masyarakat, baik dalam bekerja membantu tetangga ataupun dalam kerjasama untuk kepentingan umum. Perilaku ini biasa melekat pada kepribadian para penyimbang adat dan segenap warga adat untuk selalu suka dan berhadap bisa bersama-sama dalam kondisi senang maupun dalam kesulitan. Kepribadian ini menunjukkan simbol bahwa orang Lampung pada umumnya memiliki hati nurani dan semangat kerja yang tinggi, di mana selalu ingin berada di tengah-tengah masyarakat. Orang Lampung merasa malu dan merasa tak berguna jika tidak mampu berpartisipasi pada kegiatan masyarakat, terutama ikut serta bekerja, menyelesaikan masalah dan memberi gagasan penyelesaian masalah secara adil”.

Sikap nengah-nyappur juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian mengabarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam

adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna.

Menurut informan 2 (wawancara Mei 2021) bahwa:

“Kepribadian orang lampung yang suka bergaul, maka dalam setiap berhadapan dengan kegiatan masyarakat selalu ikut serta menyumbangkan segala kemampuannya yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Dalam pergaulan hidup masyarakat adat Lampung selalu didasarkan asas musyawarah sebagai sumber daya dalam beradaptasi dengan kesediaan menerima pendapat orang lain, mampu mengemukakan pendapat secara apa adanya, jujur dan tegas, namun siap menerima kritik demi mencapai keputusan bersama”.

Nilai-nilai *nengah nyappur* yang memiliki corak kebersamaan (komunal) mengutamakan kepentingan bersama yang didasarkan pada rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong. *Nengah nyappur* juga merupakan pencerminan dari asas musyawarah mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah, tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Pengetahuan karena pergaulan dan jaringan yang luas tentu dapat menghasilkan yang terbaik dalam setiap pengambilan sebuah keputusan. *Nengah nyappur* juga menjadi landasan pergaulan orang Lampung yang selayaknya berwawasan dan berpikiran terbuka karena bergaul dan berinteraksi dengan berbagai macam latar belakang.

Nengah-nyappur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap *nengah-nyappur* menunjuk kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap *nengah nyappur* melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan seklaiigus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang

pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup nengah-nyappur secara wajar dan positif. Dalam hal ini informan 3 (wawancara Mei 2021) menjelaskan bahwa:

“Dengan kegiatan nengah-nyappur warga terdorong untuk meningkatkan rasa kekeuargaan secara terbuka terhadap siapa saja, meski berbeda pandangan, bahkan berbeda etnis budaya sekalipun tak masalah, yang penting dalam pergaulan dapat saling mengerti dan saling menghormati. Dalam pergaulan nengah-nyappur prinsipnya adalah mampu menyerap pandangan orang lain yang berbeda, mampu berkreasi dan peka terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Seseorang yang memiliki jiwa nengah-nyappur dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan sesuai dengan perubahan jaman”.

Dengan tradisi nengah-nyappur, berarti setiap warga masyarakat senantiasa dididik untuk membangun kepedulian antar sesama secara nyata, khususnya terapan dalam upaya membangun kepentingan bersama masyarakat setempat. Menurut Abdusyani dalam makalah Falsafah hidup masyarakat Lampung sebuah wacana terapan. Nengah nyappur melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan seklaigus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Lebih-lebih melihat kenyataan kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka tradisi nengah-nyappur sangat berarti dalam mendorong kerukunan dan kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dengan kebiasaan warga dalam kegiatan nengah-nyappur bukan tak memiliki dampak positif, akan tetapi justru dapat mendorong menumbuhkan banyak kegunaan bagi kepentingan masyarakat setempat. Secara lebih jelas informasi tentang berbagai fungsi nilai-nilai nengah-nyappur itu dapat disimak melalui data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan penelitian ini. Adapun beberapa fungsi pokok dari kearifan lokal nilai-nilai nengah-nyappur itu adalah sebagai berikut:

1. Memelihara Kepedulian dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

Kepedulian warga dalam konsep kearifan lokal masyarakat setempat merupakan bentuk keikhlasan dalam mempermudah penyelesaian masalah atau memnuhi kepentingan orang lain. Dalam prosedur pelayanan kepada masyarakat diitandai

adanya tata cara yang santun dalam berinteraksi sosial. Di samping adanya landasan tanggungjawab dalam setiap perbuatan dalam suatu kerjasama, kegiatan penyelesaian pekerjaan bersama, dan keterbukaan informasi dalam pekerjaan yang berkaitan dengan proses pelayanan agar semua pihak dapat sepenuhnya percaya. Kepedulian merupakan salah satu bentuk tindakan nyata, yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan. Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kepedulian juga merupakan partisipasi yakni keikutsertaan. Kepedulian sosial merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan manusia pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota manusia untuk membantu orang lain atau sesama (Kamus Umum Bahasa Indonesi).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kepedulian terhadap kegiatan pergaulan masyarakat di lokasi penelitian ini diketahui cukup efektif berlaku sesuai dengan prinsip hidup piil pesenggiri, khususnya unsur nengah-nyappur. Semua kegiatan yang berkaitan dengan interaksi sosial dan pelayanan masyarakat sudah dilakukan secara terbuka dan saling percaya. Hal ini ditunjukkan dari p hasil observasi bahwa dalam setiap rapat, pertemuan atau kegiatan musyawarah tentang rencana pembiayaan pembangunan atau revitalisasi budaya dan masalah adat selalu disertai dengan keterangan rinci, terbuka, bahkan dimuat dengan cara membuat pengumuman terbuka di depan umum, sehingga segala perkembangan dapat diketahui oleh seluruh anggota masyarakat (data hasil wawancara dan observasi diolah, 2021)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuannya dari kegiatan terbuka adalah agar masyarakat mudah memahami dan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang saling percaya dan saling menghargai, sehingga dalam setiap kerjasama untuk kepentingan bersama dapat melahirkan kepuasan bersama pula. Selain itu, dalam praktiknya selalu terbuka, baik dalam hal penentuan waktu, tempat dan biaya penyelesaian proses pelayanan kepada masyarakat, proses pemberian informasi tentang kisi-kisi norma hukum adat yang berlaku, maupun terbuka dalam berbagi tugas dan hasil kerjasama dengan waktu yang singkat sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana dikutip dalam wawancara dengan beberapa informan berikut ini:

Informan 1 Bapak Halim Gelar Tumenggung Warta Menggala, menjelaskan (wawancara Mei 2021), bahwa:

“Keterbukaan pihak penyimbang adat dalam hal pelayanan kepada warga masyarakat telah dilakukan dengan baik dengan standar perilaku sebagaimana digariskan oleh prinsip hidup nengah-nyappur (istilah masyarakat adat setempat disebut “tengah-tetanggah”). Dalam setiap rencana dan pemecahan masalah sosial budaya, para penyimbang dengan senang hati mengundang dan bahkan tidak segan mendatangi warga masyarakat untuk diajak bermusyawarah bersama secara terbuka. Artinya pihak-pihak tokoh adat pada umumnya selalu terbuka kepada masyarakat dalam segala urusan, dengan perlakuan yang berbaur bersama, lemah lembut, bersifat mengayomi dan terbuka, sehingga sebaliknya warga masyarakat selalu mendukung dan percaya pada setiap keputusan dan kebijakan tokoh-tokoh adat. Di samping itu gayung bersambut, di mana warga juga memiliki kewajiban datang berbaur tanpa diminta agar dapat ikutserta dalam perencanaan ataupun menyelesaikan masalah. Menurut pengalaman kami, bahwa warga setempat pada umumnya cepar tanggap dengan perkembangan kampung; tanpa diundang sekalipun mereka terbiasa bertanya apa yang perlu dikerjakan. Jadi apabila diminta bantuan, mereka sangat antusias, tanpa dalih segera bergabung dalam kegiatan yang ada”.

Dapat dipahami bahwa artinya kehendak, keputusan dan kebijakan penyimbang adat adalah juga sebagai keputusan warga masyarakat. Informan menggambarkan tentang pengalaman penyelesaian sengketa batas tanah warga, di mana masing-masing warga yang terlibat mempercayakan sepenuhnya kepada penyimbang adat yang berwenang. Sebaliknya penyimbang adat yang berwenang ini melaksanakan tugasnya dengan ramah dan terbuka penuh dengan tanggungjawab. Atas dasar ini, maka pada akhirnya dapat melahirkan keputusan yang adil, damai dan memuaskan masing-masing pihak. Dengan praktik nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur ini diketahui dapat meluruskan, menyelesaikan dan mendamaikan semua pihak, baik dalam hal urusan rumah tangga, pelanggaran hukum adat, perkawinan, urusan perdata adat, maupun dalam kesaksian akta jual-beli, ataupun berupa sengketa bagi hasil kerjasama. Sebagai kosekuensinya bahwa perilaku seseorang yang suka berbaur, bergaul bersama dan selalu aktif ikutserta dalam kegiatan masyarakat, dapat memperlancar penyelesaian masalah dan mendorong seseorang menjadi teladan, populer dan dihormati warga.

Menurut Informan 2 sdr Radin Tihang (wawancara Mei 2021), bahwa:

“Keterbukaan tokoh-tokoh adat terhadap masyarakat untuk pelayanan publik ataupun pelayanan-pelayanan kepada masyarakat adat yang memerlukan perlindungan, nasihat atau petunjuk jalan keluar atas masalah yang dibawa. Kepemimpinan tokoh adat memang digariskan adat wajib melindungi semua warganya, teruma warga adat marga satu keturunan. Sebagaimana digariskan dalam peranan penyimbang adat bahwa sebagai penyimbang harus mampu menjaga /memelihara kehormatan / nama baik marga, dan menghindari perbuatan tercela menurut hukum adat yang berlaku secara nyata. Di samping bersedia menampung aspirasi secara tulus, baik sesama Penyimbang Adat maupun terhadap warga adat dan masyarakat umum, dan dalam memimpin Pemerintahan Adat harus secara arif dan bijaksana dalam membuat keputusan dan berkeadilan dalam penerapan hukum (adat) yang ramah-tamah, sehigga seluruh warga masyarakat adat dapat memperoleh keadilan. Menurut pengamatan kami sebagian besar karakter penyimbang adat di desa ini masih memiliki jiwa nengah-nyappur, di mana mereka pada umumnya tidak segan-segan mengulurkan tangan mendatangi warga yang dianggap memerlukan bantuan”.

Dalam kaitannya dengan fungsi kepedulian dari prinsip hidup nengah-nyappur, menurut Informan 1 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Kepedulian dengan perilaku transparan berlaku pada lingkungan masyarakat adat marga sudah baik, dengan alasan dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat selalu berpedoman pada norma-norma hukum adat sebagaimana tercantum dalam ketentuan perilaku nengah-nyappur yang berarti suka bergaul dan berbaur di tengah-tengah masyarakat secara sukarela. Dalam kegiatan kemasyarakatan, baik terhadap warga adatnya sendiri, maupun terhadap warga luar marga yang memerlukan bantuan, maka menurut konsep nengah-nyappur pihak pimpinan adat memiliki tanggungjawab adaptif dan waspada terhadap kemajuan jaman dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi, berkemajuan berdasarkan akidah / keyakinan bersama. Dasarnya adalah ajaran agama yang dianut, khususnya Islam, bahwa terhadap sesama manusia adalah bersaudara dan oleh karenanya tak terbantahkan wajib saling membantu antar sesama. Bagi segenap aparaturnya pemerintah adatnya selalu berupaya untuk melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, baik pendatang maupun kalangan warga internal adat”.

Dalam kehidupan pemerintahan adat, selain waktu dan jangka proses penyelesaian masalah yang selalu terbuka, juga dalam segala urusan kemasyarakatan dan adat budaya semua dilakukan secara sukarela. Dalam urusan usaha ekonomipun dalam

kerjasamanya selalu didasarkan pada prinsip nengah-nyappur, artinya perihal biaya diutamakan terbuka, jujur dan tidak memberatkan, bahkan jika perlu tak dipungut biaya sebagai tanda persaudaraan. Hal ini diperjelas oleh informan 1 (wawancara mei 2021), bahwa :

“Secara khusus untuk lingkungan masyarakat adat Desa Bulok pada tahun terakhir, terutama sehubungan dengan terbukanya arus perpindahan penduduk yang cenderung menimbulkan semakin heterogennya etnis dan kultur warga. Pada wilayah hukum adat paksi marga setempat tidak mempunyai pilihan kecuali menerima pendatang, siapapun, etnis dan asal usul manapun. Hal ini sudah menjadi prinsip kami sebagai penyimbang adat selalu menghormati masyarakat pendatang dengan ramah-tamah sesuai dengan prinsip bersaudara atau angkon muwari, bahkan terhadap warga pendatang tertentu yang merasa nyaman untuk menjalin hubungan saudara, maka kami pihak penyimbang adatpun menyambutnya dengan baik menjadi saudara angkat. Dalam hukum adat yang berlaku dapat diresmikan melalui tradisi angkon muwari, sehingga terjadi ikatan saudara yang kuat sebagaimana saudara kandung. Terlepas dari tradisi tersebut segala urusan kemasyarakatan berlaku prinsip hidup saling peduli antar sesame dan terbuka dalam semua program pelayanan masyarakat dengan tidak memandang suku, agama, ras, golongan maupun adat istiadat, yang terpenting adalah sanggup hidup bersama berdampinan, saling membantu dalam kerjasama untuk kepentingan bersama”.

Dalam kaitan prinsip yang sama menurut informan 1 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Khusus untuk lingkungan masyarakat adat Desa Bulok masih tetap konsisten memakai prinsip tengah-tetangah dalam bergaul ataupun berbaur dengan warga yang bermukin di desa setempat. Dalam praktiknya hubungan kekeluargaan antar warga adat dengan para penyimbang adat dapat dikategorikan rukun, damai dan bersatu; demikian juga halnya dengan hubungan antar warga dan penyimbang adat terhadap masyarakat pendatang. Dalam semua urusan pemerintahan adat dilaksanakan dengan prinsip kepedulian dengan harapan agar tidak terjadi saling curiga dan tidak percaya antar sesama warga”.

Maksud dari informan, bahwa nilai-nilai budaya lokal yang menjadi pedoman adalah prinsip nengah-nyappur, di mana dapat berfungsi sebagai strategi pengaman sosial dari ancaman arus medornisasi dan nilai-nilai budaya luar yang tidak relevan dengan nilai-nilai budaya lokal. Dengan berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal nenhgah-nyappur ini berdararkan pengalaman memimpin

masyarakat adat, ternyata mampu memelihara kerukunan masyarakat, saling memahami dan mampu mempertahankan nilai-nilai moral sebagai landasan dalam berperilaku dalam pergaulan umum masyarakat. Menurut teori kerukunan, bahwa Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsure / sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, 25saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan (Munawar, 2005).

Berdasarkan informasi dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan, bahwa fungsi nilai nengah-nyappur yang mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat adat Lampung Selatan pada umumnya dapat dikategorikan cukup baik. Dikatakan demikian, karena diketahui nilai-nilai nengah-nyappur masih diakui sebagai kewajiban yang harus dijiwai masyarakat adat setempat menjadi jati diri, terutama dalam menjaga silaturahmi antar warga dalam upaya agar masyarakat dapat tetap memelihara dan menerapkan perilaku pergaulan dengan prinsip kepedulian, kepantasan dan kewajaran, terutama dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kerjasama diketahui masih berpedoman pada nilai-nilai budaya yang dipimpin oleh para tokoh adat melalui perencanaan dan langkah-langkah yang ditetapkan secara terbuka. Keterbukaan pada umumnya diakui sebagai amanat atau mandat dari hukum adat yang mengutamakan kejujuran dan kerelaan dalam setiap bekerjasama untuk kepentingan umum, pelayanan kepada masyarakat, dan bukan sebaliknya pekerjaan dengan rasio mencari keuntungan pribadi.

Dengan prinsip nengah-nyappur dapat mendorong aparaturnya adat untuk dapat bersikap peduli dan terbuka terhadap warga adat dan masyarakat sekitar dalam setiap musyawarah atau menyelesaikan masalah-masalah sosial budaya. Nengah-nyappur dalam fungsi kepedulian sosial diketahui masih melekat dalam kehidupan para tokoh adat marga atau kebuwaian, sehingga memudahkan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima. Dampak positif dari kepedulian sosial yang dijiwai oleh prinsip perilaku nengah-nyappur ini dapat menarik perhatian masyarakat untuk semakin patuh terhadap ketentuan-ketentuan adat dan kebijakan para toko adat dengan perasaan senang penuh dengan ikatan persaudaraan. Hal ini dapat membuat hubungan antar warga masyarakat adat khususnya semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara nyata manfaat ini adalah bentuk kemudahan, kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat dalam setiap penyelesaian kepentingan dan masalah yang tengah dihadapi. Dalam pelaksanaannya berjalan secara terbuka, apa adanya, sehingga semua pekerjaan dapat tercapai dengan lancar dengan waktu yang tepat. Dengan adanya jaminan kepedulian ini, maka masyarakat dapat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya untuk menyuarkan dan membangun kepentingan umum. Harapannya adalah untuk mendukung suatu kebijakan atau keputusan bersama sebagai sarana untuk memperoleh keadilan sosial. terjadinya tindakan perlawanan dari masyarakat atas sejumlah kebijakan yang dibentuk biasanya disebabkan oleh kurangnya peran masyarakat terhadap pembentukan kebijakan itu. Sesuai dengan teori kepedulian sosial, bahwa berjiwa sosial dan senang membantu merupakan sebuah ajaran yang universal dan dianjurkan oleh semua agama (Fattah).

Menurut Wardhani (1982), bahwa bentuk-bentuk kepedulian masyarakat diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Memberi bantuan berupa sandang, pangan dan kesehatan. Bantuan berupa sandang, pangan dan kesehatan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan sehari-hari seperti memberi bantuan berupa pakaian, perlengkapan sholat, makanan kepada mereka yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, perkembangan fisik, jiwa dan fikiran anak-anak panti asuhan. Sedangkan bantuan yang diberikan dalam bidang kesehatan seperti memberikan bantuan uang untuk berobat ketika anak panti asuhan sakit.
2. Memberikan perhatian dan kasih sayang. Sebagaimana layaknya orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak kandungnya, umat islam juga perlu memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak di dalam panti

asuhan. Mereka yang telah kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua tentu sangat membutuhkan perhatian dari orang lain meski tidak sama nilainya. Perhatian dan kasih sayang ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan jiwa raga mereka. Hal ini agar membuat mereka tegar menerima kenyataan hidup dan bersemangat menggapai masa depan. Oleh sebab itu mereka perlu diperlakukan dengan baik dan lemah lembut.

2. Memelihara Rasa Tanggungjawab

Pada hakekatnya prinsip hidup nengah-nyappur dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya nengah-nyappur tidak dapat diartikan pergaulan keliru yang mengarah kepada sikap dan perbuatan tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan sosial yang berlaku. Tujuan kegiatan nengah-nyappur adalah untuk mewujudkan rasa tanggungjawab pribadi untuk ikurserta di tengah masyarakat membantu meringankan beban kehidupan yang tengah menerpa. Dengan membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah sosial yang ada, berarti telah memberikan tanggujawab untuk mengurai sebab akibat masalah yang terjadi agar mudah diselesaikan.

Menurut keterangan informan 1 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Nengah-nyappur dalam praktik kehidupan masyarakat dapat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Sikap ini memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan sebesar-besarnya dapat membantu orang lain secara bertanggungjawab. Artinya nilai-nilai nengah-nyappur memiliki manfaat memupuk dan menumbuh-kembangkan rasa tanggungjawab atas segala tindakan dalam kehidupan masyarakat. Setiap tindakan atau pekerjaan dalam interaksi sosial untuk penyelesaian tugas pelayanan kepada masyarakat selalu diikuti rasa tanggungjawab atas segala resiko yang ditimbulkan”.

Menurut informan tersebut, tanggungjawab dari tokoh-tokoh adat pada umumnya adalah cukup baik. Indikatornya adalah hampir semua tugas pokoknya sebagai pemimpin pemerintahan adat, baik dalam memimpin Pemerintahan Adat secara

arif dan bijaksana, melaksanakan dan menetapkan kegiatan Aparat Pemerintahan Adat secara demokratis, maupun dalam menggerakkan para penyimbang dalam kelompok struktur Pemerintahan Adat berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan siaga bersama dalam mempertahankan keutuhan dan keamanan.

Sedangkan menurut informan 2 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Semua tindakan para penyimbang adat, baik tentang koordinasi dalam mempertimbangkan dan memutuskan kegiatan pengamanan bersama-sama dengan penyimbang lain terhadap pihak-pihak luar yang dianggap akan menjatuhkan Pemerintahan Adat dengan penuh tanggungjawaban. Di samping itu bertanggungjawab pula kegiatan operasional prosesi siba/kunjungan terhadap pemerintahan adat lain dalam rangka menjalin persahabatan, kerjasama, bertukar pikir, dan pengalaman untuk kepentingan menjaga keamanan bersama. Semua tanggungjawab yang diemban penyimbang adat ini merupakan manfaat yang tumbuh dari praktik nilai-nilai nemui-nyimah. Begitu pun kegiatan-kegiatan sosial budaya sehari-hari yang dilakukan oleh warga adat di lingkungan marga atau kebuwaan setempat biasanya selalu di kontrol oleh para penyimbang yang bertanggungjawab dalam struktur adatnya, sehingga dapat dievaluasi tingkat standar efektivitas pelayanan yang diharapkan”.

Sedangkan menurut informan 3 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Oleh karena prinsip nengah-nyappur itu adalah rasa peduli atas keadaan warga sekitar dengan ikhlas, maka segala tindakannya akan melahirkan rasa tanggungjawab. Tanggung jawab atinya berkewajiban untuk menanggung segala akibat atas perbuatan yang dilakukan, atau menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami warga. Dalam kehidupan masyarakat adat rasa tanggungjawab amat bermanfaat bagi upaya pemeliharaan kerukunan dan keadilan sosial. Tanggung Jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau pun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus di tanggung jawabkan. Dalam struktur pemerintahan adat, pertanggungjawaban kegiatan ditanggung oleh masing-masing hirarki. Setiap proses perencanaan tugas adat sampai dengan penyelesaiannya dipertanggungjawabkan, terutama hasil kerjanya sebagai bahan evaluasi dan keputusan bersama atas nama kepenyimbangan adat.”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tanggungjawab segenap penyimbang adat dan segenap warga adat di lingkungan pemerintahan adat setempat dapat digolongkan cukup baik. Hal ini karena dalam praktik sikap perilaku nengah-

nyappur dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab yang tinggi, di mana dalam pelaksanaan kerjasama pada umumnya menghasilkan saling percaya antar warga masyarakat adat setempat. Demikian halnya dengan proses transaksi dan administrasi selalu diberikan tanda bukti atau tanda bukti, khususnya surat-menyurat, perijinan rapat, termasuk keuangan kas adat, telah diarsipkan dengan baik, artinya setiap kegiatan telah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu diketahui bahwa bahwa aturan adat yang terkait dengan tanggungjawab pemerintahan adat di pusat-pusat sekretariat marga/kebuwaian diterapkan berdasarkan nilai-nilai nengah-nyappur, sehingga dapat mendorong masyarakat adat untuk dapat meningkatkan kualitas pergaulan dengan hati sikap yang jujur dan terbuka. Lebih lanjut dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan kewajibannya. Dengan demikian nilai-nilai nengah-nyappur diketahui masih melekat dalam kepribadian masyarakat adat pada umumnya. Dengan berpedoman pada nilai-nilai nengah-nyappur, maka setiap tokoh adat bersama warganya akan senantiasa memenuhi kewajibannya yang sudah ditetapkan. Bagi warga yang mampu menerapkan nilai nengah-nyappur, maka ia akan memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana telah dibebankan kepadanya. Sikap dan tindakan nengah-nyappur menurut adat istiadat setempat merupakan sumber motivasi untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat sekitarnya. Sesuai dengan teori tanggungjawab dijelaskan bahwa Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati,artinya sudah menjadi bagian hidup manusia ,bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab.apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah cirri manusia yang beradab.manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan (<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2017/11/teori-tanggung-jawab.html>).

3. Meningkatkan Disiplin Kerja

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun instrumen hukuman dimana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Disiplin menjadi prioritas utama bagi tokoh dan warga adat di lingkungan pemerintahan adat, dengan harapan semua pekerjaan akan terselenggara dan berhasil dengan baik.

Menurut informan 3 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Disiplin waktu sangat penting diterapkan dalam kegiatan pemerintahan adat, seperti jadwal rapat adat, jadwal kerja bakti, pembagian acara kepentingan pribadi dan sosial dan disiplin dalam pengaturan acara ritual adat, semuanya dapat dilaksanakan tepat waktu agar kemudian dapat mendorong percepatan penyelesaian program kerja atau masalah yang sedang dihadapi bersama. Selain itu segenap tokoh adat bersama warga adatnya memiliki rencana kegiatan penerimaan tamu adat, dan partisipasi dalam kegiatan pemeliharaan keamanan, semuanya dilaksanakan dengan disiplin yang perpedoman pada prinsip nengah-nyappur, di mana pada prinsipnya diri pribadi selalu siaga bergabung bersama dalam kegiatan masyarakat. Dengan prinsip ini bagi warga yang melanggar disiplin atau jadwal/ janji yang telah disepakati, maka mereka akan mendapat sanksi budaya, yaitu jadi gunjingan yang intinya dianggap tidak simah, tak punya malu atau jatuh piilnya. Oleh karena itu prinsip hidup nengah-nyappur dalam adat Lampung merupakan sumber motivasi bagi tumbuhnya disiplin kerja”.

Selanjutnya dalam waktu yang berbeda informan di atas menyatakan, bahwa:

“Disiplin termasuk prinsip hidup yang dikedepankan oleh para tokoh dan warga adat, karena dalam prinsip nengah-nyappur mengajarkan kepada warga adat agar selalu wah pudak (selalu ceria dalam bergaul dengan warga sekitar atau tamu yang memerlukan bantuana). Prinsip nengah-nyappur ini kemudian mengikat masyarakat adat untuk dapat berbuat disiplin menjaga kehormatan dan matabat marga/kebuwaian, termasuk dalam praktik disiplin menjaga hubungan sosial secara rukun dengan sikap dan perilaku yang menyenangkan. Dalam segi pelayanan kepada masyarakat, juga dilakukan secara disiplin dengan membagi waktu dari urusan rumah tangga, urusan pemeliharaan adat budaya, dan waktu

bekerja untuk perekonomian, sehingga semua sektor kepentingan semua terlaksana dengan baik”.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa :

“Makna disiplin, di samping sebagai kepatuhan terhadap peraturan (hukum adat) atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian, juga diartikan sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib dalam kehidupan masyarakat. Bagi anggota masyarakat adat yang mengabdikan diri dalam kegiatan internal pemerintahan adat memiliki disiplin kerja untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan adat. Di dalam disiplin kerja ini tersirat adanya sikap mental yang mengandung kerelaan untuk dapat mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam hukum adat yang berlaku secara sukarela”.

Dalam paradigma psikologis, disiplin merupakan kemampuan untuk mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku setempat. Disiplin merupakan sikap yang bersifat individual sebagai dasar perilaku yang sangat berpengaruh terhadap nilai urusan pribadi dan kepentingan bersama. Untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja, dibutuhkan latihan dengan kesadaran diri tentang pentingnya sikap disiplin sebagai pedoman dalam bekerja dan dalam berperilaku sehari-hari. Manfaat disiplin diantaranya adalah:

- 1) dapat menumbuhkan kepekaan. Sikap ini memudahkan dirinya mengungkapkan perasaannya kepada orang lain.
- 2) menumbuhkan kepedulian sosial, yaitu bentuk perhatian dan empati terhadap kebutuhan dan kepentingan orang lain, di samping dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam memecahkan masalah dengan baik.
- 3) mendorong terciptanya kepatuhan dan keteraturan sosial.
- 4) menumbuhkan rasa percaya diri, terutama dalam melakukan sesuatu pekerjaan secara mandiri.
- 5) meningkatkan kemampuan beradaptasi sehingga dapat menumbuhkan keakraban dan ramah terhadap orang lain.

Disiplin menjadi hal utama yang harus ditanamkan oleh setiap aparatur yang ada di lingkungan pemerintahan adat, termasuk warga adat dan masyarakat sekitar. Diharapkan semua pihak dapat menegakkan kedisiplinan, selalu bekerja tepat waktu, dan memberikan penjelasan jika ada keperluan, khususnya aparatur pemerintah adat sebagai abdi masyarakat dapat memberikan contoh yang baik

terhadap warga masyarakat. Harapan ini dapat dibangun dengan menjiwai perilaku nengah-nyappur sebagai faktor pendorong untuk bersikap disiplin. Ketika nilai-nilai nengah-nyappur itu melekat pada pribadi warga adat, maka mereka akan termotivasi untuk mematuhi peraturan, merasa memiliki tanggungjawab sebagai abdi masyarakat, dan merasa bahwa kepentingan masyarakat lebih penting di atas kepentingan pribadi. Ada dorongan untuk berusaha selalu siap siaga untuk melayani masyarakat dengan sikap perilaku yang simpatik dan mengesankan, sehingga segala pesan yang dibutuhkan lebih mudan diserap serta dipahami dengan waktu yang tidak terlalu lama.

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa disiplin yang ada di lingkungan pemerintahan adat setempat sudah dilakukan dengan cukup baik, dengan bukti adanya pengakuan yang relatif sama diantara tokoh adat dengan warga adat, bahwa dalam pelaksanaan tugas adat yang berkaitan dengan jadwal rapat adat, pekerjaan pemeliharaan kearifan lokal nilai-nilai adat, dan keterbukaan dalam koordinasi kegiatan gotong royong, sebagian besar dapat terlaksana dengan baik. Sikap disiplin ini timbul sangat tergantung pada eratnya keterikatan masyarakat adat dengan nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur. Bagi mereka yang memiliki keterikatan dengan nilai-nilai nengah-nyappur ini cenderung terdorong untuk selalu menerapkan tanggungjawabnya dalam bentuk disiplin kerja, sehingga dapat membawa dampak positif bagi kemajuan kerukunan, kebersamaan dan keadilan. Tokoh adat yang dapat menegakkan teladan kedisiplinan di tengah masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan disiplin kerja bagi masyarakat adat di bawah kekuasaannya. Tokoh adat yang dapat mencontohkan hal baik pada warganya dan mampu memberikan arahan dengan baik dan bijak, maka dapat menjadi pendorong bagi warganya untuk selalu disiplin dalam melaksanakan pekerjaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam teori keragaman atau masyarakat multikultur bahwa disiplin sosial merupakan hasil dari proses terjadinya kebiasaan yang menghasilkan budaya khas. Jika kebiasaan itu bersangkutan dengan kebutuhan norma kepatuhan perilaku dalam kerjasama, artinya masyarakat telah menerapkan tanggungjawabnya dalam bentuk disiplin kerja. Dalam perkembangannya dapat

dijadikan sebagai wahana dialog antara pluralisme masyarakat untuk saling menyadari dan memahami kultur masing-masing secara terbuka. Sesuai dengan prinsip *nengah-nyappur*, pada akhirnya mendorong semangat untuk menegakkan disiplin mematuhi norma-norma sosial dalam rangka memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis antarkelompok masyarakat adat.

4. Menumbuhkan Toleransi dalam Masyarakat Multi Kultur

Menurut informasi yang dikemukakan oleh informan tokoh adat setempat, bahwa masyarakat beragam suku budaya merupakan kumpulan warga yang berbeda-beda, baik suku, asal usul, maupun budaya adat istiadatnya. Jika dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai perasaan toleran antar sesama warga yang multi kultur, maka bukan tidak mungkin akan selalu terjadi perbedaan pandangan dan bahkan terjadi perselisihan. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat multi kultur perlu diikat dengan kesadaran toleran untuk saling menghargai satu sama lainnya. Kumpulan warga yang memiliki toleransi dapat mendorong terciptanya hubungan sosial yang damai, rukun dan berdampingan dalam satu daerah pemukiman. Masyarakat beragam (multikultur) ini memiliki alat pemersatu dikala terjadi perselisihan atau konflik, yaitu model *konsensus* untuk mencapai mupakat. Kelompok masyarakat beragam ini mensiasati perbedaan sebagai kekuatan untuk survive (bertahan hidup), karena warganya memiliki kesepakatan bersama tentang aturan berbuat dalam pergaulan. Kesepakatan bersama ini merupakan hasil dari tradisi masyarakat yang selalu menguatamakan *hippun* (musyawarah) dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kerjasama. Dengan *hippun* berarti bersedia bersama untuk saling menghormati pendapat orang lain secara jujur dan kaya gagasan sebagaimana prinsip *nengah-nyappur* yang selalu ingin berbaur, sehingga dapat mendorong terciptanya rasa toleransi, rasa ingin hidup rukun, damai dan penguatan ikatan persatuan warga masyarakat.

Toleransi menurut informasi yang dikemukakan oleh informan 3 (wawancara Mei 2021), bahwa:

“Toleransi mempunyai kaitan yang erat dengan prinsip nengah-nyappur, di mana dalam praktiknya mengutamakan perasaan empati untuk

menghargai perbedaan kepribadian, pendapat dan cara kerja dengan sikap perilaku yang terang dan pasti. Kemampuan dalam pertemanan merupakan perilaku yang baik dan dapat menjaga kerukunan sosial. Jika dalam pergaulan telah menerapkan perilaku toleran, berarti telah melakukan nengah-nyappur dengan baik. Praktik toleransi pada kehidupan masyarakat adat setempat diketahui telah berjalan dengan baik, karena hubungan antar warga setempat dianggap telah saling menghargai, saling membantu, dan pada umumnya selalu berusaha memberkan pelayanan terbaik untuk sesamanya”.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui hubungan antar warga adat dapat dikategorikan cukup intim. Hal ini dapat diketahui dari hubungan mereka dalam kegiatan rapat adat, midang (pertemuan antar warga), anjau-silau (kunjungan antar warga), kegiatan diskusi perencanaan kegiatan adat, dan musyawarah penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Dari perspektif sosiologis istilah hubungan antar warga ini dapat disebut masyarakat sebagai wujud dari kumpulan orang pada umumnya. Istilah masyarakat mengandung unsur kelompok yang memiliki kehendak, pendapat, prinsip hidup, budaya, sikap dan perilaku yang berbeda-beda dalam menanggapi dan upaya mencapai kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan masyarakat semacam ini biasanya segenap anggota kelompok masing-masing tertarik untuk mendiskusikan bersama tentang cara-cara penyelesaian pencapaian kebutuhan hidup yang dikehendaki. Menurut Soekanto (2007), bahwa bahwa hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan mengandung kesadaran untuk saling menolong. Hubungan sosial terjadi karena ada interaksi sosial yang melibatkan emosi atau perasaan.

Informasi lain dari Bapak Halim gelar Temunggung Warta Menggala (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Sikap toleransi di kalangan masyarakat desa setempat dapat dikategorikan cukup baik. Masyarakat pada umumnya berprinsip hendak menciptakan rasa kepuasan dan saling percaya antar warga dan penyimbang adat. Setiap pelaksanaan kerjasama selalu mengutamakan sikap perilaku saling menghargai, khususnya dalam penanganan perselisihan dan perbedaankebiasaan/tradisi, karena dimaklumi kondisi masyarakat yang cukup beragam, baik dari segi etnis, budaya maupun kepribadian masing-masing”.

Sebagaimana diketahui bahwa toleransi dapat diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia sebagai warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing. Dengan syarat bahwa selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan prinsip upaya menciptakan ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat (Abdulsyani, 2021).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa toleransi yang ada di lokasi penelitian ini pada umumnya sudah berjalan cukup baik. Toleransi dapat dilakukan dengan saling menghargai antara satu sama lain, saling menghormati di mana setiap warga nampak sepakat untuk selalu memelihara sikap saling terbuka dan saling tolong menolong. Dengan menerapkan toleransi berarti sekaligus telah menerapkan prinsip pergaulan nengah-nyappur. Seperti yang diketahui bahwa prinsip nengah-nyappur merupakan suatu falsafah hidup yang sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat, bukan hanya masyarakat yang bersuku Lampung saja akan tetapi berlaku juga bagi masyarakat yang bersuku lain.

Sesuai dengan pendapat Micheal Wazler,1997 (dikutip dari Abdulsyani, 2021), bahwa toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai (*peaceful coexistence*) diantara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan dan identitas. Sedangkan Heiler menyatakan bahwa toleransi yang diwujudkan dalam kata dan perbuatan harus dijadikan sikap menghadapi pluralitas agama yang dilandasi dengan kesadaran ilmiah dan harus dilakukan dalam hubungan kerjasama yang bersahabat dengan antar pemeluk agama.

Dapat diketahui bahwa, prinsip nengah-nyappur dalam praktiknya dapat mendorong warga masyarakat dan para penyimbang adat untuk berbuat toleran atau saling menghargai, menghormati dan membiarkan pihak lain menjalankan prinsip hidup dan keyakinannya. Kebiasaan masyarakat dan penyimbang adat dalam praktik nengah-nyappur ini nampak terwujud dalam kegiatan kerjasama yang saling menghargai. Sikap perikalu ini diketahui berhasil mendorong warga

dalam menciptakan persatuan dan perdamaian warga masyarakat yang beragam tersebut. Dampak positif dari penerapan prinsip hidup nengah-nyapuur ini diketahui dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah pelayanan terhadap segala urusan masyarakat yang cepat, mudah, lancar, dan tertib.

5. Menciptakan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

Secara etimologi (<http://ciputrauceo.net/blog/2015/7/7/pengertian-pelayanan-prima>), bahwa pelayanan bisa diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pada dasarnya melayani adalah kegiatan yang bersifat tidak berwujud yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani. Karakteristik melayani dinyatakan sebagai berikut:

1. Sifatnya tidak bisa diraba, berlawanan sifatnya dengan produk barang jadi yang berwujud.
2. Merupakan tindakan nyata.
3. Kegiatan produksi dan konsumsi tidak dapat dipisahkan secara nyata.

Sedangkan pelayanan prima (*service excellence*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan / masyarakat. Pelayanan (Barata, 2003 ; 30) adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan oranglain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (http://etheses.uin-malang.ac.id/1774/5/09410038_Bab_2.pdf).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian melayani adalah membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang. Pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa mempermudah urusan masyarakat mengandung arti bahwa dengan berfungsinya praktik *nengah-nyappur*, aktivitas pelayanan kepada masyarakat sedang berlangsung atau sudah selesai dapat membuat masyarakat merasa dipermudah dan diperlancar. Praktik pelayanan kepada masyarakat di lokasi penelitian ini diketahui sudah berjalan dengan baik, karena keterbukaan atau transparansi telah dilakukan oleh segenap warga dan para penyimbang adat, khususnya dalam kegiatan pelayanan yang dimaksud. Semua yang berkaitan kegiatan kerjasama antar warga dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan prinsip pergaulan yang kondusif, yaitu mengutamakan kemudahan segala kepentingan masyarakat. Dalam usaha mewujudkan pelayanan yang prima ini warga masyarakat dalam setiap musyawarah adat selalu membuat rambu-rambu tentang syarat, ketentuan dan etika perilaku yang harus dipenuhi secara terbuka diumumkan dihadapan warga.

Seperti keterangan hasil wawancara dengan informan 2 (wawancara Mei 2021) bahwa :

“Seharusnya memang begitu, karena prinsip nengah-nyappur merupakan adabnya orang Lampung, kalau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka disebut tidak beradab atau tak punya piil (tidak punya rasa malu). Masih ada piil pesenggiri yang menjadi bagian dari harga diri, oleh karena itu jangan sampai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat kita sebagai warga atau penyimbang adat berlaku tak terpuji, seperti menghambat, mempersulit atau meminta imbalan jasa di luar ketentuan untuk kepentingan pribadi. Cara-cara pelayanan kepada masyarakat harus tunduk kepada prinsip hidup piil pesenggiri atau budaya malu, khususnya unsur nengah-nyappur yang harus dijunjung tinggi sebagai simbol kehormatan bagi orang Lampung. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai timbul kecurigaan masyarakat bahwa aparat pemerintah adat setempat dianggap mengutamakan kepentingan pribadi atau mencari keuntungan kelompoknya di tengah-tengah kegiatannya pelayanan kepada masyarakat. Kadang masyarakat ada saja yang curiga kalo kita ini bekerja melayani masyarakat selalu minta-minta imbalan materi, sehingga kadang-kadang menimbulkan rasa enggan dan kurang semangat dalam kegiatan pelayanan ini. Ini adalah masalah dan suka duka yang kami alami, terutama sebagai penyimbang adat yang mau tidak mau harus terjun mengayomi dan melindungi masyarakat. Kepedulian kami dalam pelayanan kepada masyarakat adalah atas dasar tugas pokok sebagai penyimbang adat yang wajib memberikan pelayanan yang jujur dan tulus sebagai amanat turun temurun dari pendahulu kami sebagai tokoh adat”.

Dalam analisis kegiatan interaksional antar anggota kelompok dalam kehidupan masyarakat tradisional, terdapat beberapa perspektif teoritis komunikasi kelompok yang relevan. Perspektif ini mencakup teori perbandingan sosial. Dalam pandangan teori perbandingan sosial ini, tekanan seseorang untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya akan mengalami peningkatan, jika muncul ketidaksetujuan yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa, jika tingkat kepentingannya dalam suatu peristiwa meningkat dan apabila hubungan dalam kelompok (*group cohesiveness*) juga menunjukkan peningkatan.

Pada situasi yang demikian, maka munculnya perbedaan sikap individu, sehingga banyak waktu dan energi yang dihabiskan untuk menyelesaikan persoalan antar pribadi antara anggota kelompok. Inilah yang disebut dengan *energi intrinsic*. Banyak perbedaan-perbedaan kepentingan, prinsip hidup, karakter, pengalaman hidup dan kepentingan pribadi yang memuncak sehingga timbul peselisihan dan konflik antar warga dan pemimpin adat. Tapi karena masih tertanamnya nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur, khususnya bagi sebagian penyimbang adat yang merasa memiliki rasa tanggungjawab adat untuk meneruskan amanat leluhur mereka untuk selalu rela memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warganya, maka segala bentuk pergaulan, hubungan masyarakat dan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.

Dalam konsep sosiologis bahwa bermasyarakat merupakan kebutuhan bagi kehidupan manusia, di mana karakter manusia identik dengan makhluk sosial yang butuh bersosialisasi. Kehidupan sosial masyarakat tidak selamanya seragam, akan tetapi niscaya terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok antara satu sama lainnya. Sebagai bangsa yang berbudaya seharusnya perbedaan antar manusia adalah sebuah keindahan yang harus disikapi secara positif. Dengan demikian kehidupan bermasyarakat akan lebih indah, jika perbedaan disikapi dengan bijaksana (<http://pengayaan.com/>).

Menurut informan 3 Bapak Yulius adok Batin Dalom, bahwa:

“Nengah-nyappur merupakan pandangan hidup masyarakat yang dalam praktiknya dapat bermanfaat membangkitkan prinsip ke Lampungannya, yaitu rasa keinginan untuk menolong orang lain dengan sikap perilaku yang simpatik. Sebagai orang Lampung merasa tak berguna dan malu jika tak mampu menyenangkan dan membantu orang lain yang membutuhkan. Apalagi seperti saya sebagai Penyimbang Adat, merasa berkewajiban untuk menerima dan melindungi warga dengan perilaku santun yang bisa menjadi teladan bagi warga masyarakat. Menurut pengalaman saya sebagai Penyimbang Adat di sini memang berkewajiban menerapkan nilai-nilai nengah-nyappur dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan sesuai dengan kepentingan atau harapan masyarakat. Menurut pengamatan saya ternyata masyarakat sangat senang, sehingga sebaliknya mereka selalu mendukung dan menghormati pola-pola kepemimpinan yang dianggap sangat membantui, khususnya sikap perilaku yang santun dalam memberikan pelayanan.”

Dari keterangan informan tersebut diketahui bahwa pada hakekatnya nilai-nilai nengah-nyappur yang diterapkan penyimbang adat setempat benar-benar dilandasi rasa keikhlasan untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Artinya unsur prinsip hidup nengah-nyappur merupakan wujud kepribadian yang senantiasa mengarah kepada sikap dan perbuatan yang berlandaskan moral dan terpuji sesuai dengan norma kehidupan sosial masyarakat adat Lampung yang berlaku. Bentuk konkret pergaulan nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat adat setempat terkini ternyata sangat relevan mendukung sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Seseorang warga yang memiliki kepedulian terhadap orang lain berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berpandangan luas ke depan dengan kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain.

Selanjutnya informan 2 Bapak Deny adok Radin Tihang (wawancara Mei 2021), menyatakan bahwa:

“Mempermudah dan memperlancar itu urusan orang itu kan tergantung pada kondisi kepribadian para Penyimbang Adat yang ada, karena banyak juga Penyimbang Adat yang kurang peduli terhadap kearifan lokal nilai-nilai nengah-nyappur lantaran nilai-nilai budaya ini dianggap tidak relevan dengan percepatan usaha ekonomi masyarakat secara rasional. Oleh karena itu sebenarnya keberhasilan menerapkan nilai-nilai nengah-nyappur dalam rangka membantu dan mempermudah pelayanan kepada

masyarakat tergantung pada sosok Penyimbang Adat, masih masih memegang teguh prinsip-prinsip nengah-nyappur atau tidak. Intinya perlu keberadaan Penyimbang Adat yang mumpuni bertanggungjawab sebagai kosekuensi jabatan adatnya, yang sekaligus mampu menerapkan, mensosialisasikan dan memelihara nilai-nilai nengah-nyappur itu dalam kehidupan masyarakat, di samping didukung oleh warga yang sama-sama saling menyadari antara hak dan kewajibannya. Untuk penerapan nilai-nilai nengah-nyappur di Desa kami menurut saya sudah cukup memadai, karena diketahui masing-masing warga adat nampak hubungan kerjasamanya cukup terbuka dan bersifat kekeluargaan. Hanya saja kelemahannya adalah bahwa pekerjaan di luar kegiatan adat, baik bagi sebagian Penyimbang Adat maupun sebagian besar warga adat cukup menyita waktu, sehingga relatif kurang cukup waktu untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap upaya pelestarian nilai-nilai nengah-nyappuritu, khususnya bagi generasi muda”.

Dari keterangan informan di atas dapat diketahui bahwa pada intinya praktik nilai-nilai nengah-nyappur itu masih nyata dalam kehidupan masyarakat adat setempat, meskipun dirasakan masih ada hambatan-hambatan dalam pelstariannya. Sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal nilai-nilai nengah-nyappur yang merupakan unsur dari piil pesenggiri itu perlu adanya upaya revitalisasi, sosialisasi, pemahaman, penghayatan, penjiwaan dan aktualisasi elemen2 piil pesenggiri pada umumnya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian diharapkan upaya menciptakan perdamaian, kesatuan dan kerukunan dalam rangka memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang jauh dari ancaman konflik.

Perlu dipahami juga bahwa nengah-nyappur sebagai unsur Piil Pesenggiri itu mempunyai nilai-nilai nasionalisme budaya yang luhur yang perlu diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seorang yang memiliki harga diri sebagaimana prinsip piil pesenggiri akan lebih bersemangat, berdayaguna, dan sanggup menerima orang lain sebagai saudara secara bersama-sama apa adanya, bukan ada apanya, serta siap memikul tanggung jawab menghadapi kehidupan masa depan dengan lebih baik.

Menurut hasil observasi yang telah dilakukan di lapangan, diketahui bahwa perilaku para Penyimbang Adat setempat dalam pelayanannya ternyata masih relatif mengedepankan kepuasan masyarakatnya. Misalnya ketika ada acara

perayaan perkawinan adat, para penyimbang melakukan hippun (rapat adat) bersama dengan pihak sahibul hajat dan melibatkan warga adat sebagai calon panitia. Dalam acara hippun ini diketahui cukup efektif dalam menegakkan aturan adat, baik dalam hal susunan acara, perlengkapan sarana dan pakaian adat, posisi penempatan para tamu undangan, sampai pada persiapan acara penetapan gelar adat penimbang baru. Kenyataan ini ternyata tidak terlepas dari adanya faktor yang mendorong kelancaran dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, yaitu bahwa para Penyimbang Adat mengaku sebagai abdi masyarakat yang wajib memberikan pelayanan yang prima demi tercapainya kepuasan masyarakat.

Di samping itu secara sosiologis para Penyimbang Adat masih memiliki ketergantungan hubungan kekerabatan yang relatif kuat berdasarkan garis keturunan dalam rumpun marga atau kebuwaian. Sebagai makhluk sosial dengan hubungan antar warga yang memiliki garis keturunan yang sama cenderung berkewajiban untuk berbuat saling membantu secara timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat.

Para penyimbang pun demikian, mereka tidak ingin sampai masyarakat kecewa karena kurang pelayanan yang baik, mereka akan semaksimal mungkin berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi warga adatnya. Pada intinya kepribadian nengah-nyappur mampu mendorong semua pihak di Desa setempat untuk melakukan tindakan berupa memperlancar serta mempermudah pelayanan bagi masyarakat.

Prinsip nengah-nyappur yang melekat pada diri para Penyimbang Adat dan segenap warga adat ditunjukkan dengan perilaku yang “*selalu ada*”, siaga dalam situasi masyarakat sedang membutuhkan bantuan. Diduga kuat bahwa sebagian Penyimbang Adat setempat masih memiliki anggapan bahwa berkewajiban membantu sesama dapat menciptakan kerukunan, dan persatuan warga. Di samping karena mereka masih memiliki kesadaran bahwa sebagai abdi masyarakat mereka harus menjalankan kewajiban untuk dapat membantu, memperlancar dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.

6. Memperkuat ikatan Solidaritas Sosial

Secara ringkas, solidaritas dapat diartikan sebagai rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati, sebagai ungkapan kesetiakawanan untuk mencapai kepentingan bersama. Rasa solidaritas sosial mendorong lahirnya ikatan sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan bersama dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu meskipun individualis pada dasarnya menghendaki kehidupan yang damai dan tenteram, dan individu sendiri tak mungkin dapat memenuhi kepentingan hidupnya dengan seorang diri. Oleh karena itu individu mau tak mau harus mengadakan hubungan dengan individu-individu lain, baik bersifat kontrak sosial ekonomis maupun bersifat humanistik alamiah sebagai makhluk sosial. Atas dasar pengertian ini, maka dapat dirumuskan bahwa solidaritas sosial merupakan kesetiakawanan sosial berdasarkan ikatan rasa saling percaya, rasa senasib sepenanggungan, kesamaan tujuan dan cita-cita bersama dalam hubungan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat ditemukan kelompok di mana individu tidak berinteraksi dengan baik dalam unit sosial yang luas. Lemahnya integrasi ini melahirkan perasaan bahwa individu bukan bagian dari masyarakat, dan masyarakat bukan pula bagian dari individu. Lemahnya integrasi sosial melahirkan arus sosial yang khas, dan arus tersebut melahirkan perbedaan angka bunuh diri. Misalnya pada masyarakat yang disintegrasikan akan melahirkan arus depresi dan kekecewaan. Kekecewaan yang melahirkan situasi politik didominasi oleh perasaan kesia-siaan, moralitas dilihat sebagai pilihan individu, dan pandangan hidup masyarakat luas menekan ketidakbermaknaan hidup, begitu sebaliknya. Durkheim (1997) menyatakan bahwa ada faktor paksaan sosial dalam diri individu untuk melakukan bunuh diri, di mana individu menganggap bunuh diri adalah jalan lepas dari paksaan sosial. Dalam kajian teori solidaritas, Durkheim menerangkan bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama, akan tetapi pembagian kerjalah yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain. Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan

atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

Meningkatkan kebersamaan masyarakat dapat tercipta jika nilai *nengah-nyappur* diterapkan dengan baik, hal ini sudah dilakukan pula oleh para *Penyimbang Adat*. Dengan keterbukaan yang sudah diterapkan mendorong masyarakat untuk meningkatkan rasa solidaritas sosial, dan kondisi inilah yang kemudian mewujudkan rasa kebersamaan, sehingga menjadi peduli untuk mempermudah orang lain dalam pelayanannya kepada masyarakat. Kebersamaan masyarakat sangat penting, karena tanpa campur tangan atau keterlibatan masyarakat, maka Pemerintahan Adat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan terlaksananya program-program yang ada, untuk dapat terciptanya kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu peran *Penyimbang Adat* dalam meningkatkan rasa solidaritas sosial antar warga masyarakat sangat penting. Dalam hal ini informan 1 Bapak Halim adok Temunggu Warta menggal (wawancara Mei 2021), bahwa:

“Falsafah hidup nengah-nyappur atau menurut internal istilah kami disebut tengah-tetangah, merupakan pedoman hidup dalam pergaulan, baik pergaulan antar para Penyimbang Adat maupun dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan warga masyarakat. Tentu dalam hal ini karena dianggap dapat membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat adat, dampaknya positif, apalagi nengah-nyappur ini yang kita ketahui sebagai sikap perilaku yang suka berbaur ditengah masyarakat dengan ramah-tamah, terbuka, santun dan saling menghormati terhadap sesama. Nengah-nyappur ini dapat menciptakan dan memelihara kebersamaan masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan kepentingan perorangan maupun dalam bentuk kegiatan untuk kepentingan bersama. Penerapan nengah-nyappur di desa kami saat ini dirasakan dapat meningkatkan rasa solidaritas sosial. Hal ini diketahui berdasarkan pengalaman kami dalam kerjasama sosialisasi nilai-nilai yang terkandung dalam unsur nengah-nyappur, ternyata mendapat tanggapan yang positif dari warga dengan alasan karena mampu meningkatkan kepedulian, terutama terhadap warga yang sedang membutuhkan bantuan”.

Dari keterangan informan di atas, diketahui bahwa prinsip-prinsip *nengah-nyappur* dapat mendorong terciptanya rasa solidaritas sosial antar sesama warga. Solidaritas sosial yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat merupakan

perasaan bersama saling peduli dan setia kawan dengan kondisi kondisi kehidupannya. Artinya solidaritas adalah keadaan bersatu suatu masyarakat Hal ini sesuai dengan konsep solidaritas menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), bahwa solidaritas berasal dari kata Solider yang berarti mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu. Ringkasnya nemui-nyimah dalam praktiknya dapat melahirkan rasa solidaritas antar sesama, yaitu rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati, sebagai salah satu anggota dari kelas sama atau dapat diartikan perasaan atau ungkapan dalam kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama.

Selanjutnya informan 2 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Tentu kebersamaan masyarakat akan tercipta jika kita bisa saling menolong, membantu, terbuka, peduli terhadap sesama warga dalam pergaulan dan kerjasama. Dengan sikap peduli dan perilaku yang sopan, tentu banyak disukai oleh banyak orang. Kepedulian dalam pergaulan dapat mendorong kerjasama yang ragom (kompak), jika keadaan sejahtera sama-sama senang dan jika dalam keadaan prihatin sama-sama saling membantu. Kalau kita peduli terhadap orang lain, maka pasti orang lain menjadi senang, dan kesenangan bersama dapat menciptakan rasa nyaman, sehingga tidak dapat dipungkiri dapat menumbuhkan kebersamaan dan persatuan masyarakat”.

Berdasarkan informasi tersebut dapat dipahami bahwa solidaritas yang terjadi di lingkungan masyarakat adat itu adalah tergolong solidaritas sosial mekanik, yaitu solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja diantara anggota kelompok secara rasional, melainkan berdasarkan kepuasan perasaan. Ciri-ciri solidaritas ini adalah bahwa ikatan sosial yang dibangun pada umumnya atas dasar kebersamaan, kepercayaan dan adat bersama. Disebut solidaritas mekanik karena orang yang hidup dalam unit keluarga, suku maupun kota bisa berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa bergantung pada kelompok lain. Solidaritas seperti ini terjadi dalam masyarakat pedesaan pada umumnya seperti masyarakat adat pada lokasi penelitian ini.

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa nengah-nyappur dapat meningkatkan kebersamaan masyarakat. Bentuk kebersamaan tersebut antara lain kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan secara berkala sesuai dengan waktu senggang dari kesibukan kerja mereka. Bentuk solidaritas sosial ini terlihat dari kebersamaan mereka yang saling melengkapi satu sama lain, bekerjasama dengan tertib dan teratur dalam melakukan proses penyelesaian pekerjaan bersama. Secara umum, bentuk kebersamaan dalam aktivitas kerjasama atau dalam pelayanan kepada masyarakat, misalnya menerima tamu yang membutuhkan bantuan dengan pelayanan ramah tamah dan kemudahan.

Masyarakat setempat pada umumnya mendukung segala bentuk kegiatan Pemerintahan Adat yang dirasakan memihak kepada penciptaan kehidupan yang harmonis, damai dan tenteram. Diketahui bahwa nemui-nyimah telah menjadikan para Penyimbang Adat memiliki kewajiban untuk terdorong meningkatkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai nengah-nyappur, Penyimbang Adat selalu merasa ingin dekat bersama masyarakat, dan memelihara sikap saling terbuka, yang diharapkan dapat menjaga tali silaturahmi bersama masyarakat.

Dalam kajian sosiologi pentingnya membangun solidaritas sosial karena manusia merupakan makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia akan hidup berkelompok dalam masyarakat baik itu dalam kelompok kecil maupun kelompok besar dan tidak akan hidup sendirian. Rasa solidaritas atau kebersamaan ini akan muncul dengan sendirinya saat manusia satu dengan yang lain memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Dengan adanya solidaritas maka kita dapat bersatu dan mewujudkan sesuatu bersama-sama. Salah satu contoh penerapan rasa solidaritas dalam kehidupan sehari-hari yaitu gotong royong, seperti kerja bakti lingkungan, kerja kelompok menyelesaikan tugas, dan keikutsertaan dalam acara kedaerahan ditempat tinggalnya. Secara ringkas, solidaritas dapat diartikan sebagai rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati, sebagai ungkapan kesetiakawanan untuk mencapai kepentingan bersama. Oleh karena itu solidaritas sosial dapat didefinisikan kesetiakawanan dalam hubungan kelompok berdasarkan ikatan rasa

saling percaya, rasa sepenanggungan, kesamaan tujuan dan cita-cita bersama (<http://www.pelajaran.co.id/2017/15/pengertian-solidaritas-jenis-manfaat-tujuan-dan-faktor-yang-mempengaruhi-solidaritas.html>)

Oleh karena solidaritas sosial masyarakat pada umumnya sudah relatif memadai, maka para Penyimbang Adat merasa sangat mudah menggerakkan warganya untuk peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial di desa, seperti kegiatan kerja bakti dan pemeliharaan fasilitas umum lainnya. Kepedulian terhadap sesama sebagai makhluk sosial di sebagian desa-desa Lampung Selatan pada umumnya diketahui masih cukup kental. Hal ini diketahui karena ketergantungan terhadap nilai-nilai lokal masih cukup kuat, yang didukung oleh ketergantungan warga terhadap pekerjaan pokoknya rata-rata sebagai petani dan rendahnya minat mereka untuk alih profesi, sehingga kesempatan untuk keluar daerahnya juga kecil. Kenyataan ini menyebabkan warga setempat sampai kini belum sepenuhnya terpengaruh oleh nilai-nilai sosial ekonomi luar yang lebih bersifat individual, rasional dan ekonomis. Hal ini pula yang menyebabkan mereka dalam kegiatan sosial ekonominya masih tergantung pada pengerahan tenaga orang lain untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, khususnya dalam bidang pertanian, seperti gotong royong menanam padi di sawah atau saling membantu dalam membuat alat-alat pertanian.

Kondisi kehidupan masyarakat tradisional semacam itu menurut Abdulsyani (2021) mengandung konformitas (kepatuhan), artinya orang-orang yang terikat di dalamnya (masyarakat) mempunyai kecenderungan menjadi sama, hubungan antar individu relatif dekat seakan tidak akan pernah bisa terpisahkan. Kondisi kehidupan sosial semacam inilah yang mendorong tumbuhnya rasa kepedulian sosial antar sesama; sesama manusia dituntut oleh norma-norma setempat untuk memiliki jiwa sosial, kepedulian terhadap sesama, terlebih lagi didukung oleh homogenitas penduduk yang relatif tinggi. Dalam hal ini Durkheim (dalam Abdulsyani, 2021) berkeyakinan bahwa nilai-nilai moral itulah hakekatnya yang menjadi standar bagi terwujudnya solidaritas dan integrasi sosial yang sangat membantu mempersatukan masyarakat. Dalam kajian fakta sosial menurut Durkheim mengandung tindakan yang lebih obyektif dibanding tindakan individu di dalam

masyarakat, oleh karena fakta sosial bersifat koersif yang dapat mengontrol perilaku individu. Jadi jelas nilai-nilai nemui-nyimah dalam praktiknya dapat menumbuhkan kepedulian sosial antar sesama anggota masyarakat, di mana dalam kehidupan sehari-hari secara evolusi mendorong terbentuknya pola kehendak bersama untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan masyarakat dengan tujuan agar dapat terwujudnya keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan antar sesama manusia.

Berdasarkan keterangan informan 2 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Nengah-nyappur menurut saya merupakan prinsip hidup orang Lampung yang didalamnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan berupa sikap kepedulian sosial yang tinggi antar warga masyarakat. Sifat keterbukaan, saling menghargai, saling membantu dalam kehidupan masyarakat; semuanya dapat membentuk sikap simpati terhadap keadaan orang lain, terutama bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan. Oleh karena itu jika perilaku nengah-nyappur dijadikan pedoman bertindak dalam kehidupan masyarakat, maka dapat menciptakan kerukunan dan persatuan masyarakat, sehingga dalam setiap ada kegiatan kerjasama dapat dengan mudah diselesaikan. Digambarkan dalam suatu kegiatan membangun fasilitas air bersih dikalangan rumah tangga, maka pihak tetangga dan warga setempat tanpa diminta langsung berbondong datang untuk membantu, sehingga semua pekerjaan dapat mudah diselesaikan dengan hasil yang memuaskan”.

Keterangan informan di atas, kemudian ditanggapi pula oleh informan 3 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Solidaritas yang kita kenal itu kan memiliki jiwa peduli satu sama lain, menolong antar sesama jika ada yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip nengah-nyappur, di mana ada unsur pendorong yang kuat kepada individu untuk selalu bersikap peduli dan terbuka dalam kerjasama untuk menciptakan keseimbangan dan kerukunan masyarakat. Dengan berbuat berpedoman pada nilai-nilai nengah-nyappur yang sifatnya terbuka itu dapat membuat orang lain merasa dihargai, sehingga kemudian dapat menumbuhkan sikap sopan-santun, saling menghormati. Dalam kehidupan Pemerintahan Adat kami dapat dikatakan cukup baik, kami sebagai Penyimbang Adat selalu berupaya mensosialisasikan dan mempraktikkan nilai-nilai nengah-nyappur dengan terus mengajak anggota masyarakat untuk terus saling peduli dan melayani pihak-pihak yang membutuhkan bantuan”.

Atas keterangan kedua informan di atas dapat dijelaskan bahwa kegunaan solidaritas sosial adalah untuk memperkuat atau meningkatkan rasa saling tolong menolong antar sesama, memupuk rasa saling percaya, rasa sepenanggungan dan membangun rasa peduli terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan solidaritas sosial berarti menunjukkan pentingnya rasa kesetiakawanan antar anggota masyarakat dalam kehidupan bersama, di mana ikatan hubungan persaudaraan dan kekeluargaan dapat terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, dalam hidup bersama dan dalam bekerjasama sudah seharusnya membangun rasa solidaritas sosial agar dapat mempermudah mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Menurut Abdulsyani (2021), bahwa tujuan utama solidaritas sosial, antara lain adalah:

- a. Terjaganya rasa persaudaraan dan pertemanan terhadap sesama;
- b. Munculnya rasa kepedulian terhadap sesama baik teman, keluarga atau orang lain;
- c. Lebih peka terhadap lingkungan sekitar;
- d. Terjalannya kekompakan terhadap teman;
- e. Membangun rasa kesetiakawanan.

Dengan menerapkan prinsip solidaritas sosial, di mana di dalam hubungan kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama berjalan dengan ikatan rasa kesetiaan, rasa senasib sepenanggungan, saling percaya, saling peduli dan saling menolong, maka akan tercipta kerukunan, kedamaian, ketenteraman, keamanan dan persatuan kelompok yang kuat, serta terhindar dari ancaman konflik. Dalam kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif, tentu dapat memberi peluang atau kesempatan luas untuk berkarya, berinovasi, menggali potensi dan meningkatkan sumber daya dalam menunjang kemudahan kerjasama dalam mencapai kepentingan bersama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai nengah-nyappur dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap orang lain, karena sifat nengah-nyappur yang terbuka, apa adanya dapat menjadikan seseorang memiliki rasa simpati dan empati untuk menolong atau membantu, sehingga dapat menciptakan kerukunan hidup masyarakat. Bentuk rasa simpati antara lain mengucapkan turut beduka cita ketika ada seseorang yang tertimpa musibah, membantu orang yang tertimpa

musibah baik secara materi maupun non-materi, ataupun menjenguk orang sakit. Sedangkan bentuk rasa empati antara lain adalah dengan memberi sedekah, baik dalam bentuk infaq, wakaf maupun hadiah. Selain itu mencintai lingkungan dan alam juga menjadi bentuk sebagai rasa empati. Sehingga dari rasa kepedulian tersebut ketenteraman serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat akan tercipta. Suatu bukti nyata wujud nengah-nyappur adalah kepedulian sosial dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, di mana pihak Penyimbang Adat pada umumnya cepat tanggap terhadap setiap kegiatan pelayanan yang diminta oleh masyarakat. Ketika ada lansia yang membutuhkan pelayanan sesegera mungkin dibantu dengan mempersilahkan duduk dan bagi yang muda harus mengalah jika tempat duduk terbatas, sehingga mereka merasa nyaman dan merasakan fungsi berharga dari nilai nengah-nyappur tersebut. Dengan kenyataan ini berarti nilai-nilai kerifan lokal nengah-nyappur merupakan pedoman yang dapat mendorong dan membimbing para Penyimbang Adat dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Dijelaskan bahwa nilai-nilai kerifan lokal nemui-nyimah yang melekat didalam diri para Penyimbang Adat dapat mendorong tumbuhnya sikap yang pemurah atau tangan terbuka untuk senantiasa peduli dan suka membantu terhadap warga masyarakat yang membutuhkan.

5.3. Strategi penerapan prinsip nilai Nengah-nyappur

Prinsip nengah-nyappur seperti telah diuraikan di muka, bahwa dalam praktiknya dilandasi rasa keikhlasan dari hati nurani yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat melalui kepiyawaian bergaul di tengah masyarakat. Perilaku nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat dapat diartikan sebagai ungkapan dalam perbuatan asas kekeluargaan, keakraban dan kerukunan antar warga masyarakat. Perilaku nengah-nyappur merupakan kewajiban menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keramahan, kesopanan, keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

Menurut informan dalam penelitian ini ada beberapa strategi penerapan prinsip nilai nengah-nyappur, diantaranya adalah:

1. Membuat Sanggar Budaya

Menurut informan 1 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Dalam upaya menggalakkan semangat warga masyarakat adat untuk mempelajari falsafah hidup masyarakat Lampung, di samping perlu adanya ajakan atau imbauan dari ara tokoh adat untuk memelihara motivasi suka bergaul di tengah –tengah masyarakat. Di samping itu perlu adanya gerakan bersama antara Tokoh Adat dan warga masyarakat untuk membentuk organisasi, lembaga atau sanggar budaya yang bergerak dalam pelatihan atau pendidikan tentang nilai-nilai kearifan lokal, khususnya sikap perilaku nengah-nyappur. Saya mengetahui beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tokoh adat di daerah lain, ada yang sudah lama membentuk sanggar tari, dan sanggar seni budaya lainnya. Oleh karena itu di desa kami bisa juga meniru dalam bentuk lain, seperti mambanguns anggar budaya pelestarian falsafah hidup misalnya, yang di dalamnya mencakup upaya pemahaman tentang fungsi moral dari sikap perilaku nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat. Menurut kami unsur nengah-nyappur ini sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, guna membangun dan memelihara kerukunan warga dan jauh dari perselisihan”.

Kemudian informan 3 Bapak Batin Dalom (wawancara Mei 2021), dijelaskan bahwa :

“Menurut saya, untuk melestarikan nilai-nilai budaya nengah-nyappur harus dilakukan dengan contoh perbuatan nyata dari para Penyimbang Adat dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai para penyimbang ini melakukan perbuatan menyimpang atau melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Para Penyimbang Adat yang harus memberikan bimbingan dan pemahaman tentang pentingnya pergaulan dengan sikap perilaku jujur, ramah dan apa adanya kepada orang lain dalam rangka menjaga kerukunan dan perdamaian antar warga. Mengenai usaha dengan membentuk sanggar budaya, saya sangat setuju sebagai tempat untuk bermusyawarah, berlatih dan memperdalam makna serta manfaat nilai-nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat. Jika usaha ini didukung oleh semua pihak, maka diharapkan dapat berhasil membawa hubungan anta warga menjadi lebih aman dan tenteram, khususnya bagi generasi muda yang memiliki tantangan berat dari arus modernisasi”.

Sedangkan menurut informan 2 Bapak Radin Tihang (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Dalam upaya memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat nilai-nilai nengah-nyappur,, perlu didukung oleh sumber daya yang kuat, tidak hanya dukungan pendapat atau pemikiran belaka, melainkan harus didukung pula dari segi

fasilitas, dana dan waktu para ahli budaya dan Penyimbang Adat dalam kegiatan rutin pembelajarannya. Saya sangat setuju jika dibentuk organisasi tentang sanggar budaya, karena dengan adanya sanggar budaya, maka dapat dibuat kegiatan secara terjadwal dan teratur, khususnya kegiatan pelatihan, pembelajaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai nengah-nyappur dalam pembinaan intensitas kerukunan masyarakat”.

Ditanyakan lebih lanjut mengenai kelemahan atau faktor penghambat dari keinginan informan ini, *dikatakan bahwa :*

“Kesulitan untuk mewujudkan harapan dapat melestarikan nilai-nilai nengah-nyappur itu, diantaranya adalah faktor kesibukan semua pihak dalam bekerja mencari nafkah, sosialisasi nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur oleh generasi terdahulu relatif tersumbat, ekonomi masyarakat yang makin menurun karena ketidakseimbangan penambahan lahan pertanian dengan kebutuhan hidup yang cenderung meningkat, di samping karena banyaknya generasi muda yang sekolah dan bekerja jauh di luar desa, kuatnya arus budaya asing yang menjadi perbandingan ekonomis, sehingga kemungkinan kegiatan pembangunan sanggar budaya itu akan terhambat.”

Berdasarkan beberapa pendapat informan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada umumnya masyarakat, terutama dari kalangan Penyimbang Adat sangat antusias membentuk sanggar budaya sebagai wahana pergaulan dan wujud langkah untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur dalam upaya memelihara dan menjamin kerukunan, dan persatuan warga, baik dalam kerjasama usaha ekonomi sosial masyarakat, maupun dalam penataan hubungan masyarakat yang kini semakin luas. Dalam pengertian sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat, manusia pun disebut sebagai makhluk sosial karena tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain. Untuk itu perlu dibagikan informasi mengenai pengertian sosial menurut para ahli beserta definisi dan unsur-unsur sosial secara umum. Sebagaimana diketahui bahwa pengertian sosial adalah hubungan interaksional antara warga masyarakat. Sedangkan unsur-unsur sosial yang erat kaitannya dengan hubungan masyarakat diantaranya adalah kesetia-kawanan, empati, status dan peranan sosial, garis keturunan, kekerabatan atau kemargaan, dan lain-lain

Bentuk konkrit *nengah-nyappur* dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial, naluri keinginan bergaul dan rasa kesetiakawanan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kesetiakawanan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain, melainkan suka menyenangkan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat, strategi pembangunan sanggar budaya merupakan suatu cara untuk membantu dan menyalurkan hasrat masyarakat untuk memperbaiki hubungan masyarakat yang mungkin selama ini kian renggang. Dengan fasilitas sanggar, maka dapat memberi peluang kemudahan bagi masyarakat dari segi wahana tempat bergaul bersama dengan bekerjasama dalam proses produksi memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan strategi ini warga dapat memperkecil atau bahkan menghilangkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, dan terhindar dari terkurasnya tenaga pisik dan sumber daya alam yang merugikan. Dalam hal ini berarti dengan membangun sanggar budaya dapat memengaruhi nilai dan etika perilaku masyarakat menjadi lebih efisiensi dalam konteks produktivitas manusia dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Dengan catatan bahwa keadaan ini dalam sistem hubungan sosial dapat diawasi jangan sampai mengakibatkan terkucilnya manusia, terutama jika tidak didukung oleh pemahaman bahwa kemajuan yang berkesinambungan dan menguntungkan itu niscaya melalui transhumanisme dan tekno-progresivisme.

Dalam konsep *Community Development* (meminjam istilah teknologi sosial, abdulsyani, 2021), dijelaskan bahwa teknologi sosial itu merupakan cara masyarakat dalam usaha mandiri untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kulturalnya dengan mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan yang lebih luas dan mendorong kontribusi yang lebih optimal demi suatu kemajuan. Bagi pihak agen pembangunan, teknologi sosial merupakan strategi yang diperuntukkan bagi usaha membantu pembangunan kehidupan masyarakat yang masih terbelakang dan terbelenggu dengan keyakinan-keyakinan yang irrasional. Melalui pendekatan unsur-unsur sosial termasuk ikatan-ikatan emosional yang mengandung keterampilan sosial dari nilai kearifan lokal *nengah-nyappur*, maka dapat memperpendek jarak antara peradaban tradisional dengan sikap-sikap

rasional menuju kearah perubahan harapan. Dalam hal ini kemajuan komunitas luar dapat dijadikan contoh nyata kepada masyarakat setempat untuk membantu mereka dalam mempercepat proses perubahan dan pembaruan guna mengejar ketertinggalan. Menurut Davies (Soetomo, 2006), bahwa elemen-elemen yang ada dalam komunitas itu adalah lokalitas, hubungan emosional, keterlibatan sosial, kohesi sosial dan kepentingan bersama. Dalam kehidupan bersama itu elemen-elemen tersebut menjadi pendorong tumbuhnya jaringan sosial dalam komunitas yang dibangun, baik melalui interaksi dan relasi sosial yang bersifat formal maupun informal. Jaringan sosial ini mempunyai kapasitas untuk mendorong tindakan individual ataupun tindakan kolektif dalam menghadapi berbagai persoalan yang tumbuh akibat kurang terampil dalam partisipasi menjawab tuntutan masa depan.

2. Membentuk Lembaga Penyimbang Adat

Sebagaimana diketahui bahwa para Penyimbang Adat memiliki peranan yang amat penting dalam menghimpun aspirasi dan membina masyarakat adat dalam rangka memelihara dan menciptakan kerukunan, khususnya warga adat di bawah kekuasaan Pemerintahan Adat Lampung Saibatin. Diantara peranan penting Penyimbang Adat itu menurut draft naskah simbolik peranan Penyimbang Adat yang diharapkan dapat diterapkan di desa Bulok, diantaranya adalah:

- a. Memimpin Pemerintahan Adat secara arif dan bijaksana dalam membuat keputusan dan berkeadilan dalam penerapan hukum (adat);
- b. Menjaga /memelihara kehormatan / nama baik kebuwaian, dan menghindari perbuatan tercela menurut hukum adat yang berlaku;
- c. Pelaksana langsung dalam menampung aspirasi, baik sesama Penyimbang Adat maupun terhadap warga adat dan masyarakat umum;
- d. Menangani/menyelesaikan perselisihan dalam lingkungan kebuwaian, sekaligus sebagai hakim dalam membuat keputusan segala perkara;
- e. Bertanggungjawab dan berwibawa dalam proses peradilan adat, menghindari perbuatan sepihak dan atau perbuatan curang (curang) untuk memperkaya diri yang dapat menjatuhkan martabat kebuwaian secara keseluruhan;

- f. Memimpin upaya-paya pelestarian budaya yang mencakup seluruh norma hukum adat, adat istiadat, tradisi/kebiasaan, kesenian, arsitektur rumah adat, ornamen khas, benda-benda pusaka, dan segala asesori upacara adat;
- g. Memberikan teladan dalam bersikap, berperilaku / berbuat, baik dalam pelaksanaan memimpin hippun, pergaulan, maupun dalam kegiatan usaha untuk kesejahteraan umum;
- h. Adaptif dan waspada terhadap kemajuan jaman dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi; berkemajuan berdasarkan akidah / keyakinan yang rasional;
- i. Dalam memimpin negara/kerajaan berdasarkan keagungan jatidiri / karakter / keribadian / perangai yang arif dan bijaksana, obyektif, terbuka, sabar, jujur, tegas, dan berani membela kebenaran demi menegakkan keadilan;
- j. Dalam implementasi kepemimpinannya siaga mengawasi dan bertindak di garis depan untuk melindungi perangkat adat dan warga adatnya dari segala ancaman kejahatan, serta membawanya kearah posisi yang lebih aman dan sejahtera;
- k. Dalam mengelola roda pemerintahan adat senantiasa memberikan motivasi (dorongan) kepada perangkat adat dan warga adat untuk selalu kerja keras, mandiri dan tidak tergantung pada pihak manapun dalam usaha/berkarya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan point-point peranan Penyimbang Adat tersebut, maka sangat dimungkinkan peranan-peranan tersebut dapat menjadi sumber daya yang kuat untuk dijadikan pelopor pembina warga masyarakat untuk dapat bersikap perilaku yang berjiwakan kearifan lokal, khususnya sikap perilaku nengah-nyappur.

Menurut informan 1 Bapak Halim gelar Temunggung Warta Menggala (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Untuk meningkatkan keharmonisan hubungan antar warga dengan para Penyimbang Adat perlu adanya lembaga adat yang menangani upaya pelestarian nilai-nilai budaya, khususnya sikap perilaku nengah-nyappur. Seperti diketahui, nilai-nilai nengah-nyappur itu merupakan landasan dasar dari syarat terciptanya kerukunan masyarakat, Karena dengan sikap perilaku yang peduli, jujur dan apa adanya dalam setiap hidup bersama dan bekerjasama, maka segala kegiatan dan usaha dapat diselesaikan dengan mudah. Untuk memperkuat ikatan sosial budaya masyarakat ini, perlu dibentuk suatu lembaga adat sebagai wadah

musyawarah dan menampung aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan kerukunan masyarakat. Untuk ke depan kami sesama Penyimbang Adat telah merencanakan untuk membentuk lembaga adat sebagai sarana organisasi operasionalnya, yaitu rencananya disebut Majelis Penyimbang Adat Sebatin (EMPAS) Marga Legun Bandar Kesugunan. Lembaga Adat ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menghimpun aspirasi dan membina masyarakat adat dalam rangka memelihara dan menciptakan kerukunan, khususnya warga adat di bawah kekuasaan Pemerintahan Adat Lampung Saibatin”.

Bersamaan dengan waktu wawancara dengan informan di atas, juga dijelaskan oleh informan 3 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Sebenarnya sudah lama niat ingin membentuk lembaga adat yang bergerak dalam upaya menghimpun aspirasi masyarakat dan mengajak untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal, terutama nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan loal nengah-nyappur. Akan tetapi sampai sekarang masih jalan ditempat dengan berbagai kendala, terutama karena kesibukan bekerja sehari-hari, baik bagi para Penyimbang Adat maupun bagi warga adat, sehingga waktu yang tersisa untuk kumpul bersama secara rutin sangat terbatas. Tapi meski demikian, kami akan berupaya untuk membagi waktu untuk mendirikan dan melaksanakannya demi pelestarian nilai-nilai budaya tersebut. Menurut saya lembaga adat ini amat berguna untuk mengembangkan sikap rela menerima dan menghargai perbedaan dengan pihak lain sebagaimana nilai yang terkandung dalam sikap perilaku nengah-nyappur. Sikap rela menerima atau toleran sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat multicultural seperti desa-desa di wilayah Kalianda. Dengan adanya lembaga adat segala masalah keragaman budaya yang timbul dapat dikendalikan, sehingga tidak terjadi pertentangan sosial yang dapat mengancam stabilitas masyarakat daerah. Untuk ini lembaga adat berfungsi menempa mental masyarakat agar dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan prinsip hidup nengah-nyappur”.

Berdasarkan keterangan informan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya para penyimbang dan sebagian besar masyarakat adat sepakat untuk berupaya melestarikan nilai-nilai budaya, terutama prinsip-prinsip nengah-nyappur. Hal ini dirasa penting karena menurut pengamatan mereka telah terjadi pemudaran penerapan sikap perilaku nengah-nyappur dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam rangka pelestarian prinsip hidup nengah-nyappur, maka para Penyimbang Adat merasa perlu membentuk Lembaga Adat yang disebut Majelis Penyimbang Adat Sebatin. Di Desa-desa lain di Lampung

diketahui telah banyak yang membentuk lembaga-lembaga adat serupa, seperti Lembaga HIPPUN Pemekonan (LHP) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) yang pada umumnya merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pekon. (Montesquieu, dalam Kansil (2008: 9), sedangkan BHP adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Pekon dan peraturan Peratin.

Seperti tujuan pembentukan LHP/ BHP., Lembaga Adat yang disebut Majelis Penyimbang Adat Sebatin (EMPAS) juga bertujuan untuk :

1. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di bawah Pemerintahan Adat.
2. Melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, khususnya nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur.
3. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat, terutama dalam upaya penyesuaian nilai-nilai nengah-nyappur dengan model pergaulan masyarakat modern.
4. Untuk memperkuat Pemerintahan Adat dalam menciptakan kerukunan masyarakat adat di Desa.
5. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat tentang pola perilaku sesuai dengan kedudukan adat dalam menghadapi masalah adat kebiasaan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya

7. Sebagai wujud demokrasi budaya, anggota EMPAS dipilih dari dan oleh warga adat bersama-sama dengan Penyimbang Adat setempat.

Atas dasar tujuan itu, maka cukup beralasan perlunya upaya pelestarian nilai-nilai nengah-nyappur sebagai model pemersatu masyarakat adat. Khususnya di lingkungan masyarakat adat di desa Bulok Kalianda, Lampung Selatan. Upaya pelestarian ini adalah perlu segera membentuk Majelis Penyimbang Adat Sebatin (EMPAS). Untuk mendukung pelestarian nilai-nilai budaya nengah-nyappur dengan membentuk EMPAS ini, juga perlu penggalakan, pendekatan kepada masyarakat adat dengan melakukan jaring aspirasi untuk mengetahui seberapa besar keterikatan atau penolakan masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai nengah-nyappur. Perlu menetapkan langkah-langkah, strategi dan materi prioritas yang diperlukan dalam sosialisasi pembiasaan berperilaku nengah-nyappur pada setiap perencanaan, penjaringan pendapat tentang kebijakan tertentu. Sehubungan dengan pembentukan Majelis Penyimbang Adat Sebatin (EMPAS) tersebut, perlu juga melakukan *sosialisasi* tentang manfaatnya kepada masyarakat adat di lingkungan Pemerintahan Adat khususnya Marga Legun di wilayah Kalianda Lampung Selatan.

Dari beberapa kegunaan/manfaat penerapan sikap perilaku nengah-nyappur yang dirasakan masyarakat, dapat mendorong mereka untuk selalu hidup rukun, damai dan bersatu. Meskipun mereka terdiri dari kumpulan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda, akan tetapi saling menghargai dan saling menghormati dan bersatu dalam satu lingkungan sosial pemukiman yang sama. Kerukunan dan ketenteraman masyarakat nampak dari kebersamaan dan kesamaan tujuan hidup. Dari segi kehidupan masyarakat umumnya, meskipun mereka terdiri dari beraneka ragam suku dan budaya, tapi mereka memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan yang damai dan rukun. Kerukunan masyarakat ini diikat oleh adanya kesamaan kepentingan, yang ditandai adanya saling interaksi antar warga, yaitu terdapatnya hubungan antar anggota masyarakat secara langsung, intim dan intensif.

3. Memperkuat Sumber Daya Masyarakat

Sumber daya masyarakat adalah keberdayaan masyarakat yang mampu melakukan penataan kelompok sosialnya agar dapat meningkatkan kualitas kerjasama, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai segala upaya fasilitasi yang bersifat persuasif dan melalui memerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan kemampuan masyarakat dalam menemukan, merencanakan serta memecahkan masalah menggunakan sumber daya/potensi yang ada, termasuk partisipasi dan dukungan tokoh-tokoh masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah; kesadaran untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengembangkan berbagai bentuk kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat dan mengembangkan manajemen sumber daya yang dimiliki masyarakat secara transparan.

Menurut hasil penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Untuk berusaha sosialisasi dan menanamkan nilai-nilai budaya lokal sikap perilaku tengah-tengah (nilai-nilai nengah-nyappur) di dalam kehidupan Pemerintahan Adat memang bukan pekerjaan mudah, karena efek mempelajari nilai-nilai budaya ini tidak langsung menyentuh kepentingan pokok yang sedang dihadapi masyarakat. Pada satu sisi para Penyimbang Adat sebagai pembina masyarakat adat merasa perlu untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang berjiwakan moralitas, sementara pada sisi lain pihak masyarakat sedang menghadapi perjuangan hidup berupaya memenuhi kebutuhan sandang pangan. Apalagi pada perkembangan terakhir yang ternyata penduduk, terutama generasi muda yang semakin disibukkan oleh kegiatan mencari pekerjaan dan nafkah pisik, sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan budaya dianggap kurang prioritas. Untuk sekarang yang oleh para Penyimbang Adat lakukan adalah melakukan pendekatan sosial kepada warga adat pada umumnya, yaitu dengan menghadapkan lembaran sejarah budaya, model perilaku kerjasama secara terbuka, menunjukkan usaha-usaha mandiri para pendahulu dan manfaatnya langsung dengan efek kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Kecuali itu dengan membentuk tim kerja modal patungan mandiri, dibantu upaya kerjasama dengan pihak-pihak lembaga terkait yang dapat memberikan pencerahan berdasarkan kompetensi dasar dari nilai-nilai kerukunan dalam bekerjasama. Harapan dari upaya penggerakan dan pemberdayaan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman dan kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat dapat

berperanserta dalam melakukan pemecahan masalahnya sendiri tanpa tergantung pada bantuan dari luar”.

Pernyataan informan di atas kemudian diperkuat oleh keterangan informan 1 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Kami sesama Penyimbang Adat telah berupaya memotivasi masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pergaulannya agar kegiatan bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama dapat dicapai; caranya adalah dengan membuka atau menggali potensi warga yang dapat dikembangkan, menjelaskan praktik potensi yang ada secara nyata, sampai menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi, kemudian memberi keyakinan bahwa proses kerjasama dengan sikap terbuka dan kejujuran akan membuahkan hasil sesuai harapan. Pada sisi lain dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik maupun model kearifan lokal yang dapat dijangkau semua lapisan masyarakat. Kemudian membentuk akses pada berbagai peluang akan membuat masyarakat makin percaya diri, seperti tersedianya lembaga-lembaga adat, pelatihan, dan pemasaran yang mendukung. Dengan begitu partisipasi masyarakat akan semakin meningkat, sehingga perlahan masyarakat akan terbiasa tanpa perintah ataupun tekanan dari pihak lain”.

Peran serta masyarakat dengan dasar kerukunan dalam kerjasama adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan. Menurut Widjaja (2003) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pada prinsipnya model memberdayakan masyarakat lebih kepada upaya melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dapat dihindari jangan sampai ada golongan yang tersisih dalam bekerjasama akibat ada pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh karena itu usaha perlindungan dan pemihakan kepada warga yang lemah amat penting jadi perhatian. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Pembinaan peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya pengembangan sumberdaya masyarakat secara berkesinambungan melalui model persuasif dan

tidak memerintah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan mengoptimalkan kemampuan masyarakat dalam menemukan, merencanakan, dan memecahkan masalah. Pembinaan lokal merupakan serangkaian langkah yang diterapkan guna menggali, meningkatkan dan mengarahkan peran serta masyarakat setempat. menggunakan sumber daya/potensi yang mereka miliki termasuk partisipasi dan dukungan tokoh-tokoh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelolah semua potensi yang ada secara evolutif.

Serangkaian langkah yang diterapkan guna menggali, meningkatkan dan mengarahkan peran serta masyarakat perlu melakukan upaya pengembangan sikap masyarakat dalam menghargai nilai-nilai kearifan lokal. Dasarnya adalah mengungkap atau mengangkat harkat sikap dan perilaku terbuka yang diikuti oleh disiplin kepribadian, tertib bertugas, rapi berbusana, mandiri dalam kehidupan, sikap menghargai waktu, sikap sportif, dan sejenisnya. Terutama tentang sikap dan perilaku hidup tertib dan disiplin sangat berguna untuk membina moral dan mentalitas masyarakat lokal.

Menurut informan 3 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Dalam memberdayakan masyarakat dengan mengangkat sifat-sifat dasar manusia seperti sikap perilaku hidup yang disiplin sama artinya menggali kejujuran seseorang atau warga masyarakat dalam pergaulan yang terwujud dalam bentuk tata krama, sopan santun, ramah dan terbuka sebagaimana nilai-nilai dalam prinsip nengah-nyappur. Dengan menumbuhkan kejujuran artinya berupaya meningkatkan kewaspadaan yang terpercaya terhadap masuknya nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter budaya daerah. Menurut saya, agar masyarakat dapat menerima dan menerapkan sikap ramah dan terbuka dari nuraninya, maka dalam sosialisasinya perlu mengedepankan solusi atas masalah yang ada, setidaknya memberikan menjelaskan pengaruh positif nilai-nilai nengah-nyappur terhadap kerukunan dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Dari segi lain, untuk menginspirasi masyarakat tentang nilai-nilai budaya lokal adalah dengan menggali nilai-nilai budaya lokal yang sarat dengan prinsip-prinsip hidup, seperti : merevitalisasi, menjiwai dan mengemplementasikan adat hippun atau pepung (musyawarah), adat

manjau, warahan, dan seni suara yang mengandung pesan kehidupan yang damai sebagai pilar-pilar tegaknya prinsip nengah-nyappur”.

Keterangan informan di atas menunjukkan bahwa melalui pengembangan nilai-nilai budaya, khususnya prinsip nengah-nyappur tidak sekedar merasa toleran dalam pergaulan saja, melainkan merupakan ajaran disiplin diri nurani yang memungkikan jadi inspirasi masyarakat untuk membentuk kelompok kerjasama dengan keikhlasan dari pribadi-pribadi tanpa batas perbedaan. Pemberdayaan kelompok kelompok kerjasama dengan ikhlas merupakan upaya membangun budaya lokal melalui pendekatan nilai-nilai adat istiadat yang hidup tumbuh atas dasar falsafah hidup piil yang bercermin pada sejarah perjuangan lokal.

Tidak berhenti di situ pengembangan nilai-nilai nengah-nyappur dalam penciptaan krukunan masyarakat, akan tetapi perlu berkesinambungan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal itu dengan harapan dapat memelihara stabilitas kesatuan, keamanan dan kerukunan warga setempat. Kemudian mengaktualisasikannya terhadap budaya etnis pendatang, dan budaya asing untuk pembentukan budaya daerah yang mendukung stabilitas sosial budaya daerah, sehingga dapat terhindar dari konflik. Jika upaya ini berhasil, maka memungkinkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri dari warga secara keseluruhan untuk dapat sama-sama secara sukarela mendukung pengembangan budaya daerah pada umumnya.

Di samping itu bahwa semakin terbuka bagi kelompok pribadi-pribadi yang telah memiliki jiwa nengah-nyappur untuk dapat menciptakan pengamanan (Regulasi) dan koordinasi antar pihak untuk mencapai keselarasan tindakan dalam upaya mendeteksi, mencegah dan menangkal kemungkinan pengaruh negatif masyarakat multikultural sebagaimana perkembangan kondisi masyarakat lokal terkini. Dengan demikian pembinaan terhadap pendidikan moral, budi pekerti, dan pemahaman nyata terhadap nilai-nilai nengah-nyappur dapat ditingkatkan, sehingga kerukunan dan persatuan masyarakat lokal pada umumnya dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keberhasilan meningkatkan stabilitas masyarakat.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya meningkatkan sumber daya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjiwai dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal prinsip nengah-nyappur antara lain adalah: 1) menggali sumber daya masyarakat yang berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuannya tentang manfaat nilai-nilai nengah-nyappur dalam memelihara kerukunan masyarakat; 2) membangun peran serta masyarakat yang memiliki potensi nilai-nilai budaya lokal melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pendalaman pemahaman budaya, khususnya nilai-nilai nengah-nyappur ; 3) meningkatkan kebiasaan kerjasama masyarakat, pembimbingan kerja, alih pengetahuan dan keterampilan berbasis nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat; 4) menggalang kemitraan dengan LSM dan organisasi kemasyarakatan yang ada dimasyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat lebih berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien); 5) upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat bertumpu pada budaya dan adat setempat, khususnya sikap perilaku nengah-nyappur sebagai dasar pengambilan keputusan yang menyangkut tata cara pelaksanaan pemecahan masalah internal masyarakat, sementara pemerintah berfungsi fasilitator dan dinamisator, sehingga masyarakat merasa lebih memiliki tanggung jawab mandiri untuk melaksanakannya, karena pada dasarnya mereka adalah subyek dan bukan obyek pembangunan; 6) semua bentuk upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat sebisa mungkin bertumpu pada budaya dan adat setempat.

Upaya pemberdayaan masyarakat adat yang berbasis nilai-nilai nengah-nyappur tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kerukunan, kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam keputusan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam pembuatan keputusan bersama ini harus berdasar prinsip dan nilai Pancasila, dilandasi oleh sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Suara terbanyak bukan merupakan satu-satunya kriteria dalam pembuatan keputusan bersama. Keputusan bersama bukan keputusan pribadi-pribadi, tetapi merupakan kontrak sosial yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pihak yang usulnya tidak disetujui. Keputusan bersama mengikat dan mengandung sanksi. Sikap mau

mengakui pendapat yang diputuskan bersama harus dikembangkan. Dengan demikian Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan adalah suatu demokrasi yang bersifat normatif, etis dan teleologis. Dalam implementasinya nilai-nilai nengah-nyappur mendukung penghormatan atas hak asasi manusia, yaitu jaminan hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun.

5.4. Faktor-faktor Penghambat Pelestarian Nilai-nilai Nengah-nyappur

Nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur merupakan prinsip atau pedoman hidup dalam bersikap dan berperilaku agar kehadiran seseorang dapat memberikan kenyamanan dan diterima di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam elemen nengah-nyappur ini memiliki tuntunan kearifan yang secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Sebagaimana dikemukakan Geertz (2007), bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di masyarakat secara meluas, turun temurun, akan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh, yang selanjutnya disebut sebagai budaya. Menurut Ridwan (2007) bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

Dalam prinsip kearifan lokal nengah-nyappur itu mengandung kebaikan bagi kehidupan masyarakat, sehingga nengah-nyappur dalam wujud sikap perilaku kian lama makin mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Meskipun dalam masyarakat terdapat berbagai perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tapi dalam jangka yang lama mereka makin nyaman terikat dalam persamaan visi atas nilai-nilai nengah-nyappur sebagai pedoman perilaku dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bersama. Dalam bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok masyarakat

saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara pedoman nilai dan norma sosial yang berlaku.

Atas dasar alasan pentingnya pedoman nilai-nilai nemui-nyimah itu, maka dalam menyongsong abad budaya modern seperti sekarang kiranya perlu mencermati warisan budaya dan nilai-nilai tradisional nenek-moyang yang mengandung banyak kearifan lokal dan masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan lebih jauh. Nilai-nilai nenek-moyang dalam praktiknya diakui sebagai warisan budaya tentang pedoman bersikap dan berperilaku yang tergolong dalam kekayaan intelektual dan kultural yang perlu dilestarikan.

Menyimak dasar falsafah hidup masyarakat adat Lampung, yaitu pi'il pesenggiri mengandung prinsip hidup memperjuangkan harga diri, martabat dan berusaha keras menjaga kehormatan diri, keluarga dan marganya (keturunannya). Artinya seseorang akan menjadi terhormat jika kehadirannya diterima dan bermanfaat bagi orang lain. Kehormatan dapat dicapai dalam kehidupan masyarakat apabila mampu menegakkan ke-4 unsur/elemen utama sebagai tiang penyangganya, yaitu Bejuluk-beadok, nenek-moyang, nemui-nyimah, dan Sakai-sambayan.

Karakteristik orang yang memiliki harga diri yang tinggi adalah kepribadian yang memiliki kesadaran untuk dapat membangkitkan nilai-nilai positif kehormatan diri sendiri dan orang lain, yaitu sanggup menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Hidup dengan penuh kesadaran berarti mampu membangkitkan kondisi pikiran yang sesuai kenyataan yang dihadapi, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Arogansi dan berlebihan dalam mengagungkan kemampuan diri sendiri merupakan gambaran tentang rendahnya harga diri atau runtuhnya kehormatan seseorang (Abdul Syani, 2010).

Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, maka warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Dalam perkembangan zaman dengan segala fasilitas yang mempengaruhinya, justru sebaliknya makin banyak orang hendak mencari

keuntungan besar dengan cara-cara instan, culas dan kurang peduli terhadap kesulitan orang lain, bahkan kadang tak sedikit orang yang tega mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan situasi. Berbagai tindakan menutupi kelemahan/kekurangan demi kehormatan dan harga diri, status sosial yang dibanggakan sering kali salah kaprah, gengsi sosial mempertahankan kehormatan dimata masyarakat dengan pamer materi. Ingin dipandang terhormat, dengan berusaha menunjukkan kelebihan semu di mata masyarakat, spt mengaku bekerja di lembaga/instansi besar, berusaha pamer fasilitas, harta melimpah, pendidikan tinggi, pengalaman menakjubkan, dan berusaha tampil demi popularitas, aktualisasi citra diri (pencitraan). karena merasa khawatir pada kenyataan tak mampu. Sikap perilaku yang culas itu dibungkus dengan air muka yang ramah demi pujian moral, ini dilakukan karena khawatir ketahuan tak mampu, bak pepatah tersesat tapi malu bertanya, yang penting dipandang terhormat. Ini semua bukan jalan menuju kehormatan, melainkan menuju kebanggaan sosial yang rapuh dan kemudian jatuhlah kehormatan itu. Ada beberapa faktor yang menghambat pelestarian nilai-nilai kearifan lokal nemuinyimah, diantaranya adalah:

1. Masuknya Budaya Asing

Berdasarkan data hasil penelitian secara empirik di lapangan, dijelaskan oleh informan 1 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Hambatan dalam mengajak warga untuk dapat bersikap perilaku yang piawai bergaul dan peduli terhadap kondisi masyarakat lingkungan sekitar pada umumnya diterima dan diakui sebagai tindakan kebaikan, akan tetapi dalam praktiknya jauh panggang dari api, bahwa banyak norma perilaku pergaulan sebagaimana tuntunan budaya lokal telah berubah menjadi perilaku bebas mengikuti cara-cara asing yang jauh dari pedoman perilaku nenah-nyappur. Pola-pola perilaku yang tumbuh sekarang seolah tidak memperhatikan tata-krama hubungan antara orang tua dan anak muda, dianggap sama rata, semua teman, semua setara dan jarang ditemukan kata-kata lembut dan perilaku menunduk di depan orang yang lebih tua. Hambatan utamanya adalah karena kuatnya pengaruh budaya luar/asing, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, karena bebas dan banyak budaya-budaya daerah yang masuk seiring dengan deraskan perpindahan dan arus lalu lintas pertukaran penduduk di Lampung umumnya, lambat laun mempengaruhi keberadaan budaya lokal, sehingga terjadilah

percampuran adat kebiasaan, yang pada intinya harus terjadi penyesuaian diri. Dari mulai cara berbahasa, logat, sikap, pola perilaku dan kebiasaan, semua terjadi penyesuaian agar tidak terjadi salah paham dan kesulitan dalam bekerjasama. Akibat dari proses penyesuaian ini, maka terjadilah pengikisan terhadap penggunaan/penerapan nilai-nilai budaya sendiri, khususnya budaya perilaku nengah-nyappur berganti kulit dengan gaya baru, seperti salaman dianti dengan tos, cipika-cipiki, halo, hai, dan sebagainya. Cara duduk dan cara makan dari duduk lesehan dengan tangan, kemudian berganti sendok garfu atau dengan cara makan berdiri (standing party) sambil berbicara. Dari luar negeri, diketahui derasnya pengaruh budaya asing dari berbagai negara, anak-anak muda sangat gandrung dengan istilah-istilah asing, gaya dan perilaku ke barat-baratan, minuman keras, lagu-lagu asing, semuanya terjadi peniruan besar-besaran, sehingga nilai-nilai budaya lokal hampir punah. Khususnya bagi kalangan tua, seolah tertinggal, berlawanan arus dan terpisah dalam cara bergaul, pihak kami yang tua-tua hampir kehabisan akal untuk memberikan pendidikan dan menanamkan nilai-nilai budaya lokal seperti nemui-nyimah misalnya. Kalangan generasi mudapun demikian, tak mau lagi mendengar nasihat orang tua, semua dianggap kuno, bahkan mereka yang dengan sengaja menyodorkan pola-pola perilaku modern kepada generasi tua”.

Atas dasar informasi di atas diketahui bahwa hambatan dalam mewujudkan kepedulian sosial sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai nengah-nyappur adalah rasa ego yang berlebihan yang mendoktrin bahwa semua tindakan seseorang terarah pada kehendak untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Biasanya secara kumulatif didukung oleh kuatnya sikap perilaku manusia yang sangat mengutamakan materi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kegagalan memperoleh simpati dan meninggalkan kesan yang tidak menyenangkan bagi orang lain, adalah karena diawali ketidakmampuan untuk memperhatikan dan memahami perasaan orang lain. Kebanyakan orang tidak memperhatikan keinginan sederhana pembicara, yaitu sekedar membutuhkan para pendengar yang peduli dan simpati. Kesulitan kebanyakan orang enggan memberikan penghargaan terhadap orang lain, padahal sesungguhnya seseorang yang mendapat perhatian atas perkataan dan idenya, berarti ia sudah memperoleh kehormatan. Orang lain satu persatu akan menghindar, jika seseorang secara terus menerus memperlakukan diri sendiri lebih istimewa, suka memotong pembicaraan inti dan berbicara tanpa henti tak peduli ide orang lain. Orang-orang yang amat membosankan dalam kehidupan masyarakat adalah mereka yang selalu mabuk

dengan kepentingan dan harga dirinya sendiri. Umpama seorang *sakit gigi*, ia hanya akan memikirkan nasibnya sendiri dan tak akan peduli penderitaan ribuan orang korban tsunami.

Sedikit berbeda dengan pendapat informan 3 (wawancara Mei 2021), ia mengatakan bahwa :

“Menurut pengalaman saya bergaul dengan anak-muda kadang memang sulit di bantah juga, karena ada sisi lain yang secara logika ada benarnya dalam rangka menundukkan persaingan dalam dunia pergaulan. Anak-anak muda terkini, terutama mereka yang berpendidikan luar daerah dan sebagian bekerja di luar daerahnya, beranggapan bahwa pengetahuan dan budaya baru di luar dianggap setara atau bahkan lebih maju dari nilai-nilai budaya lokal, terutama dari segi efisiensi dan sosial ekonomis. Nilai-nilai nenah-nyappur itu sebenarnya tidak pudar, tetapi diganti kemasannya dengan cara sanggup beradaptasi. Menyambung lidah para generasi muda, bahwa jika harus tergantung dengan cara-cara lama, khususnya dalam pergaulan masyarakat dengan proses yang dianggap bertele-tele, justeru kita akan kehilangan dan ditinggalkan teman. Segala persoalan hidup harus segera diselesaikan dengan waktu singkat dan biaya yang rendah, semua pihak sepakat dengan prinsip ini, sehingga nilai-nilai nenah-nyappur yang sebelumnya penuh dengan syarat rendah gaya, kini dituntut harus tinggi gaya, tapi pada prinsipnya tujuannya sama untuk mencari kenhamanan dan kesejahteraan bersama”.

Dari keterangan di atas dapat diterjemahkan bahwa telah tumbuh pemahaman baru yang pada prinsipnya mampu menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain dan memaklumi bahwa posisi orang lain itu juga berlaku untuk diri sendiri. Budaya asing pada perkembangan terakhir dianggap sebagai sebuah kemajuan positif, yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan dan budaya baru yang dianggap setara atau bahkan lebih maju dari nilai-nilai budaya lokal. Generasi baru menganggap budaya asing itu sebagai wilayah baru, di mana upaya untuk memperoleh kesadaran empati kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara belajar dari pengalaman dan mempelajari pengalaman orang lain yang lebih maju, praktis dan efisien. Prinsip baru yang tumbuh adalah bahwa jika ingin menjadi orang yang simpatik, disegani dan dihormati masyarakat, maka belajarlah untuk sanggup mendengarkan orang lain. Jika hendak bertanya, bertanyalah dengan kalimat yang orang lain akan senang menjawabnya. Biasakan selalu memberikan semangat kepada orang lain agar mereka terbuka membicarakan berbagai kiat kesuksesan mereka. Dengan demikian pada gilirannya kekayaan ide dan

pengalaman orang lain akan terangkum menjadi koleksi yang berharga dan lebih lengkap. Penguasaan terhadap koleksi ide yang relatif lengkap ini sama artinya memiliki daya tampung yang lebih luas terhadap perhatian publik, baik tentang kesamaan nasib dan prinsip hidup, maupun tentang berbagai metode pemecahan masalah dan kiat meraih sukses. Bagi figur yang memiliki kepribadian semacam ini, minimal secara evolusi akan menuai banyak penghargaan dan kehormatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

2. Perubahan Pola Pikir Masyarakat

Beranjak dari konsep nengah-nyappur bahwa secara harfiah diartikan sebagai sikap suka dan pandai bergaul, pemurah, peduli, suka memberi pertolongan, baik material maupun spiritual sesuai dengan kemampuan. Nengah-nyappur merupakan wujud perilaku asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu hubungan intim keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nengah-nyappur merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepastian dan kewajaran.

Perilaku pergaulan yang penuh dengan keikhlasan, saling terbuka dan peduli terhadap sesama sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai makhluk sosial yang senantiasa tak terhindar dari bantuan orang lain. Sebagaimana dikemukakan Aristoteles, bahwa manusia merupakan *zoon politicon* yang berarti manusia dikodratkan hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Pada hakikat setiap orang dalam hidupnya selalu membutuhkan keterlibatan orang lain, hidup bersama dengan masyarakat, sehingga dengan demikian orang/individu dapat bertahan hidup dengan nyaman, damai dan aman.

Nengah-nyappur merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi, sekaligus bermakna sebagai sikap suka bergaul dengan kedamaian. Pemahaman tentang sikap suka bergaul di setaip daerah tentunya berbeda-beda, hal ini disebabkan karena perbedaan adat-istiadat, kultur atau budaya juga kebiasaan yang ada di suatu daerah. Sebagaimana di muka dijabarkan bahwa perilaku nengah-nyappur dalam konteks kehidupan masyarakat lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian

sosial dan rasa setiakawan. Nengah-nyappur mengandung nilai budaya yang dapat berfungsi untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan antara lain motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain.

Setelah dilakukan perbandingan dengan keterangan informan tentang fungsi ideal nengah-nyappur itu, ternyata begini penjelasan informan 2 (wawancara Mei 2021):

“Sebenarnya warga adat sangat terikat dengan keberadaan prinsip hidup nengah-nyappur yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, terutama prinsip sikap kepedulian soial dalam interaksi sosial. Bagi warga yang muda mestinya menghargai orang yang lebih tua dengan sikap perilaku yang terpuji serta mampu menempatkan posisinya sebagai pihak yang muda. Demikian juga dalam pergaulan hubungan sesama muda dan sesama tua dapat bersikap perilaku yang pantas jauh dari perkataan dan perbuatan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Nengah-nyappur dalam perkembangannya ternyata cupup mengkhawatirkan, kami sebagai warga adat merasa kecewa melihat perubahan sikap perilaku masyarakat yang telah banyak menyimpang dari adat kebiasaan. Perubahan yang nampak adalah sikap yang kurang peduli terhadap nilai-nilai budaya khas daerah yang mengutamakan kebersamaan dan saling menghargai. Dalam perkembangannya sekarang, terutama generasi muda cenderung bersifat individual dan kurang peduli terhadap kepentingan orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Kerjasama yang dilakukan bersama teman sepergaulan lebih diarahkan pada kepentingan pribadi yang bersifat ekonomis, sedangkan ikatan emosional sebagaimana prinsip nengah-nyappur makin menipis. Nengah-nyappur dalam terapan terkini lebih ditujukan kepada uaha pencapaian cita-cita kesejahteraan material pamrih, ketimbang tujuan kerukunan bersama saling menolong antar sesama. Bahkan menurut pengamatan kami bahwa perilaku nengah-nyappur yang ada sekarang lebih difungsikan sebagai alat pergaulan agar dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari pergaulan tersebut”.

Dari keterangan tersebut diketahui bahwa pada awalnya secara garis besar nilai-nilai nengah-nyappur diakui dan dipahami sebagai suatu realitas nilai kebaikan yang tertuang dalam prinsip sikap perilaku hidup saling peduli. Nengah-nyappur diharapkan (das solen) dapat mendorong tumbuhnya cahaya kesejahteraan dan keadilan. Artinya nilai-nilai nengah-nyappur merupakan pendorong manusia/masyarakat agar dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya. Nilai Nengah-nyappur merupakan sumber daya yang dapat mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan menegakkan kebenaran demi kepentingan besama. Tapi kenyataannya harapan agar kehidupan sosial masyarakat yang terdiri penduduk

asli dan pendatang ini menjadi sebuah lingkungan sosial dengan komunitas yang hidup rukun, berdampingan dan bekerjasama semakin sulit dicapai. Sebelumnya perbedaan-perbedaan antar komunitas itu selalu dijadikan kekuatan dengan saling melengkapi secara harmonis dalam membangun kehidupan yang lebih progresif, akan tetapi kini justru sering menimbulkan perselisihan. Setiap komunitas kurang menjaga sikap toleransi, meningkatkan persatuan dalam rasa persaudaraan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pergaulan hidup.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya dinamika setiap masyarakat dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan, baik perubahan menuju ke arah kemajuan, namun dapat juga menuju ke arah kemunduran. Gillin dan Gillin menyatakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, dinamika dan komposisi penduduk, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat (dalam Abdulsyani, 2019).

Demikian juga kehidupan masyarakat tradisional, khususnya masyarakat adat Lampung yang sebagian besar memiliki falsafah hidup yang menganut nilai-nilai budaya *nengah-nyappur* sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam pergaulan, juga mengalami perubahan seiring dengan tuntutan kemajuan zaman. Nilai-nilai budaya *nengah-nyappur* ini mengalami perubahan karena adanya proses kehidupan yang menuntut keseimbangan sosial atas desakan perubahan dari unsur geografis, biologis, ekonomis, terutama faktor kebudayaan. Soemardjan (1982), mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Seperti Provinsi Lampung sebagai provinsi yang multikultural, karena dihuni oleh beraneka ragam suku bangsa, budaya, agama dan ras. Tidak terkecuali wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan contoh representatif memenuhi syarat ini karena dihuni oleh berbagai suku di Indonesia, seperti suku Bali eks transmigran, misalnya di Sidomulyo, Talang Jawa, Kalianda, Palas, Bakau heni, dan daerah lainnya. Suku Lampung yang menetap antara lain Marga Rajabasa di Kecamatan

Rajabasa, dan Marga Dantaran di Kecamatan Penengahan dan wilayah perbatasan Lampung Timur. Suku Jawa yang merupakan penduduk paling dominan menyebar di sebagian besar wilayah tersebut. Secara rinci penduduk yang tergolong minoritas musiman tinggal di wilayah Lampung Selatan, antara lain adalah suku Padang, Batak, Semendo (Sumsel), Bugis, Banten, Lombok, Madura hingga warga keturunan. Di samping eksis pula berbagai kesenian, seperti Barong Sai, Reog Ponorogo atau kesenian Jawa, tari-tarian adat Lampung dan atraksi kesenian lainnya sering saling mengisi seremoni sosial, akan tetapi sebaliknya dalam perkembangannya seringkali memicu terjadinya perselisihan budaya antar kelompok masyarakat tersebut.

Diketahui bahwa secara garis besar 2 (dua) suku (Jawa dan Lampung) merupakan penduduk mayoritas tinggal menetap di Lampung Selatan. Pada masa-masa sebelumnya interaksi dua suku ini melahirkan satu basis sosial baru, yaitu masuknya suku Jawa lama angkatan kolonial dan program transmigrasi sejak tahun 1905, yaitu kelompok asimilasi Lampung karena perkawinan, dan kelompok akulturasi kehidupan sosial budaya pada wilayah tertentu. Kecuali itu pada wilayah Lampung Selatan terbentuk pula kelompok pedagang, petani, wiraswasta, PNS, pegawai swasta, dan home industri. Pada 10 tahun terakhir proses pembauran (inkulturasi) Jawa dan Lampung berlangsung relatif cepat, sehingga kerukunan dalam kehidupan antar kedua kelompok masyarakat ini cukup terpelihara. Kenyataan ini dapat berpengaruh positif bagi kehidupan masyarakat, hal ini dapat diketahui dari acara pentas budaya seni, diantaranya masing-masing bebas menampilkan corak tarian dan jenis musik secara bergantian tanpa masalah. Ternyata, besarnya penambahan penduduk tersebut bukan karena *kolonisatie* dan transmigrasi umum, melainkan justru karena adanya transmigrasi spontan yang besarnya mencapai tiga sampai lima kali lipat dibanding dengan program transmigrasi itu sendiri.

Menurut keterangan informan 3 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Berbagai perbedaan etnis, budaya dan golongan itu membuka peluang terjadinya perselisihan, karena masing-masing menganggap nilai-nilai budaya mereka adalah paling baik. Anggapan ini hanya menurut pandangan pribadi dan golongan berdasarkan ajaran sepihak, tanpa ingin

mengetahui dan bahkan anti terhadap budaya-budaya lain yang dianut komunitas disekitarnya. Dalam perkembangannya masing-masing pemangku etni budaya menghendaki paling berpengaruh, populer dan pantas untuk mengatur pihak yang lain..Kondisi konflik budaya ini semakin lama mempengaruhi terjadinya perubahan pola pikir masing-masing golongan menjadi lebih memihak dan cenderung menekan golongan lain, terutama golongan yang dianggap minoritas. Dengan kenyataan ini sangat sulit bagi warga masyarakat adat Lampung khususnya untuk dapat mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Lebih-lebih diketahui jumlah penduduk yang beretnis Lampung lebih sedikit dibanding penduduk beretnis lain”.

Perubahan pola pikir masyarakat itu juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Lampung yang multikultur, yaitu memiliki *keragaman (plural)* kebudayaan. Masyarakat Multikultural (*multicultural society*) menurut Abdulsyani (2013) adalah masyarakat yang terdiri dari banyak kebudayaan dan antara pendukung kebudayaan saling menghargai satu sama lain. Dapat pula diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Masyarakat multikultural terdiri dari berbagai elemen, baik itu suku, ras, golongan, dll yang hidup dalam suatu kelompok dan menetap di wilayah tertentu. Setiap masyarakat menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. Jadi, masyarakat multikulturalisme merupakan masyarakat yang paham bahwa berbagai budaya yang berbeda memiliki kedudukan yang sederajat. Namun seiring dengan perubahan kekuatan ikatan masyarakat terhadap nilai-nilai budayanya dan tuntutan kepentingan strategi bertahan hidup masyarakat, maka pada akhirnya terjadi pula perubahan pada pola pikir masyarakat pada umumnya.

Menurut informan 1 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Perubahan pola pikir masyarakat kini sudah lebih maju seiring dengan mudahnya mereka menyerap ide-ide dan pengetahuan baru dari luar, baik melalui media sosial, televisi maupun media cetak. Sementara di sisi lain keinginan para Penyimbang Adat untuk melestarikan dan menerapkan nilai-nilai budaya seperti nengah-nyappur dalam kehidupan sehari-hari di rasakan sangat terhambat. Hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah karena arus perubahan pola pikir generasi muda sudah terlalu jauh mengikuti nilai-nilai budaya baru yang dianggap lebih rasional, praktis dan ekonomis”.

Sedangkan menurut informan 2 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Perubahan pola pikir masyarakat setempat didorong oleh makin beragamnya pengetahuan, etnis asal usul penduduk, perbedaan jumlah golongan dan strategi usaha sosial ekonomi masing-masing orang dan golongan. Di samping itu dipengaruhi pula oleh kelemahan budaya nenah-nyappur itu sendiri yang sangat terbuka terhadap masuknya nilai-nilai budaya lain, sehingga adang-kadang mengakibatkan leburnya budaya sendiri ke dalam budaya-budaya lain yang hisup ditengah-tengah pergaulan masyarakat. Seperti diketahui masyarakat etnis Lampung di desa kami hampir sebagian besar generasi muda, bahkan bersama keluarganya tidak lagi menggunakan bahasa Lampung, melainkan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya seperti bahasa Jawa misalnya”.

Ditambahkan oleh keterangan informan 3 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Faktor penyebab terjadinya perubahan pola pikir masyarakat adat setempat yang kemudian berdampak pada terhambatnya usaha pelestarian nilai-nilai nenah-nyappur, diantaranya adalah karena arus politik desa yang mendorong terjadinya peselisihan antara elit desa. Juga karena adanya pengaruh masuknya kebudayaan masyarakat pendatang yang mengakibatkan perubahan cara berpikir lantaran terjadinya penyesuaian diri secara terus menerus dengan nilai-nilai budaya dari etnis lain. Tidak kalah pentingnya perubahan pola pikir masyarakat disebabkan oleh adanya wabah corona dan bersamaan dengan letupan gunung anak Krakatau yang cukup meresahkan, sehingga mendorong mereka untuk mengamankan diri masing-masing”.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat dirumuskan beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan pola pikir masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan terjadinya perbedaan informasi dan pengetahuan yang diterima masyarakat berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan terjadi perbedaan pola pikir terhadap penyelesaian masalah di tingkat desa;
2. Masuknya penduduk pendatang tanpa batas mengakibatkan terjadinya keragaman etnik dalam masyarakat, sehingga tumbuhnya ide-ide baru dalam strategi bertahan hidup;
3. Dominannya warga pendatang di Lampung Selatan, dimana orang Jawa menjadi mayoritas (61,89%) dapat mempengaruhi penduduk asli Lampung

untuk meniru pola-pola pikir orang Jawa yang ternyata berhasil menciptakan strategi bertahan hidup;

4. Karakteristik budaya masyarakat Lampung memiliki prinsip hidup *nemui-nyimah* yang pada intinya ramah dan terbuka, ternyata sangat memungkinkan mudahnya menerima pola pikir pendatang, terutama tentang kreativitas dan ketekunan kerja dalam usaha meningkatkan ekonomi sosialnya;
5. Terjadinya pertentangan kepentingan antara warga dengan pemerintahan desa setempat dengan berbagai sebab, mengakibatkan para elit desa makin jarang melakukan sosialisasi praktik *nengah-nyappur* dalam kegiatan desa;
6. Merebaknya wabah Covid-19 akhir-akhir ini menyebabkan makin renggangnya aktivitas kerjasama yang melibatkan banyak penduduk, sehingga terhambatnya penerapan nilai-nilai *nengah-nyappur* dalam kehidupan masyarakat;
7. Terjadinya bencana alam erupsinya gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan perhatian masyarakat terhadap upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal terhambat, khususnya upaya pelestarian nilai-nilai *nengah-nyappur*. Bahkan sebagian masyarakat terpaksa harus mengungsi meninggalkan sementara rumahnya. Bagi masyarakat yang berada pada lokasi pemukiman baru, tentu harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam lingkungan, terutama lingkungan sosialnya. Hal ini kemungkinan besar juga dapat memengaruhi perubahan pada pola pikir masyarakat tentang strategi baru dalam mengelola sumber penghidupannya;
8. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat pendatang yang mengakibatkan terjadinya penyesuaian adat kebiasaan dan prinsip hidup masyarakat setempat, sehingga mendorong terjadinya perubahan pemahaman terhadap nilai-nilai budayanya sendiri. Lebih dari itu, jika diantara pemangku adat saling menolak, maka tidak mustahil akan terjadi perselisihan mendalam. Jika ada salah satu budaya mempunyai taraf dominasi yang lebih tinggi, maka akan terjadi proses imitasi yang dapat berakibat nilai-nilai budaya lokal seperti *nengah-nyappur* dapat bergeser pola dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat setempat.

Dengan terjadinya perubahan pola pikir masyarakat tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kesulitan para pemangku adat untuk dapat melestarikan nilai-nilai budaya setempat, khususnya nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur.

Namun meskipun demikian perkembangannya, bahwa dalam konteks wawasan nusantara, pluralisme budaya dalam perkembangannya tetap dapat dijadikan sebagai wahana dialog antara pluralisme masyarakat untuk saling menyadari dan memahami kultur masing-masing. Pandangan yang diharapkan ke depan adalah agar semangat hubungan yang harmonis dan sinergis antarkelompok masyarakat adat dalam hubungan internal maupun eksternal dapat terpelihara. Untuk ini perlu adanya keterbukaan antaretnis, antar kelompok sosial, dan keagamaan, agar pluralisme bisa dipahami dan dapat memperpendek jarak pemaknaan yang negatif antar etnis yang bersifat plural, tidak terkecuali dalam kehidupan masyarakat majemuk di Lampung (Abdulsyani, 2011).

Signifikansi pluralisme baru berarti jika dalam aktualitas kegiatan pergaulan hidup sehari-hari antar warga masyarakat berjalan secara harmonis, yaitu membiasakan kegiatan yang beragam, nilai-nilai berbeda dapat dijalankan tanpa kekhawatiran, struktur sosial atau organisasi yang beraneka macam, sistem ide yang tidak tunggal, dan berbagai institusi hadir di tengah masyarakat dan masing-masing menunjukkan keberadaannya secara bebas. Dalam kondisi ini diharapkan masyarakat dapat mengembangkan semangat gotong royong masyarakat. Semangat gotong royong yang merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia hendaknya dapat juga ditunjukkan dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan nilai-nilai Pluralisme dapat menjadi sumber daya untuk menumbuhkan kerukunan hidup bersama yang saling menghargai perbedaan dan mendorong kerja sama berdasar kesetaraan. Pluralisme dapat dijadikan wahana produktifitas hubungan sosial antar anggota masyarakat, di mana masing-masing pihak dapat menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling hadir bersama dalam setiap kegiatan sosial secara bersahabat, tanpa konflik. Prinsip kebersamaan mengandung arti bahwa setiap golongan masyarakat yang

berbeda-beda mampu menjalin kerjasama yang harmonis demi kesejahteraan bersama masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, dari aspek demografis, jika aksesibilitas dan tata ruangnya mendukung, program *kolonisatie* dan transmigrasi lebih berperan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang kemudian banyak mengundang transmigran spontan. Sebagai konsekuensi program *kolonisatie*/transmigrasi tersebut, telah tumbuh masyarakat multikultural (kebhinnekaan) di daerah-daerah tujuan kolonisatie dan transmigrasi. Secara umum mereka dapat hidup rukun damai.

Masyarakat multikultural itu, jika dikelola dengan arif bijaksana bisa menjadi aset (bukan beban) untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kebhinneka-tunggal-ikaan inilah yang menjadi roh pengelolaan kemajemukan bangsa.

3. Kesalahpahaman terhadap Nilai-nilai Nengah-nyappur

Secara ideal fungsi dari terapkan perilaku nengah-nyappur adalah untuk memelihara memelihara stabilitas hubungan yang ada di dalam masyarakat. Stabilitas hubungan atau kerukunan dapat diwujudkan melalui gotong royong, saling menolong antarsesama, kerja bakti lingkungan, bersih desa dan disaat sedang mendapatkan musibah, seperti sakit atau yang sedang berduka. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan nyaman dan damai apabila para pelakunya dapat beradaptasi diri dengan menerapkan prinsip nengah-nyappur. Dalam setiap kegiatan dalam masyarakat selalu diawali dengan suatu perencanaan dan pemetaan tahapan kerja melalui musyawarah dengan prinsip saling menghargai sebagaimana anjuran dalam konsep nengah-nyappur.

Kesepakatan yang idealnya sebagai tujuan dari musyawarah harus terlaksana agar tidak ada lagi perbedaan, baik itu pendapat, ide atau gagasan yang muncul dari individu yang berbeda. Nengah-nyappur dalam hal ini dapat berfungsi mendorong masing-masing pihak untuk saling menghargai dan saling menerima. Nengah-nyappur dalam kegiatan musyawarah memberikan kebebasan secara terbuka kepada setiap pendapat, gagasan dengan saling menghargai setiap anggota musyawarah, dan menerima setiap keputusan yang sudah disepakati dalam kata

mufakat. Dengan prinsip nengah-nyappur juga dapat memelihara kepedulian antarsesama masyarakat atau sebagai solidaritas sosial. Wujudnya bisa dalam bentuk kerjasama yang dilakukan antar warga dalam membangun tiyuh/pekon/desa, seperti membangun jembatan, jalan dan sebagainya. Solidaritas sosial di bentuk dengan cara turut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan agar dapat terwujudnya keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan antar sesama manusia.

Menurut pendapat informan 1 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Nilai-nilai nengah-nyappur itu merupakan pedoaman hidup orang Lampung pada umumnya. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya sangat baik sebagai penuntun dalam pergaulan agar terbentuk kerukunan dan saling menerima antar sesama. Untuk membentuk hubungan sosial yang rukun itu perlu adanya rasa saling menghormati antar warga dengan apa adanya. Dengan demikian akan menumbuhkan ikatan tali persaudaraan yang mengikat dan saling percaya jauh dari perasaan saling curiga dan perselisihan. Ikatan persaudaraan yang kuat tentu dapat mendorong warga untuk dapat bekerjasama dengan baik, karena dalam pelaksanaannya selalu dilandasi dengan kejujuran dan saling percaya. Pada akhirnya diharapkan segala kegiatan kerjasama, baik dalam urusan keluarga maupun dalam pelaksanaan program pembangunan desa dapat memperoleh kemudahan dan percepatan penyelesaian pekerjaan”.

Sedangkan pendapat informan 2 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Nengah-nyappur pada hakikatnya merupakan aturan dalam berperilaku dalam kehidupan masyarakat, di mana perhatian utamanya adalah mengutamakan kepentingan orang lain dari segi etika atau tata-cara bertindak agar orang lain merasa dihargai dan dihormati. Atas perhatian semacam ini dari masing pihak yang bertemu atau bergaul dapat mendorong hubungan sosial mereka menjadi lebih intim dan cenderung terikat secara emosional. Di dalam hubungan kerjasama antar warga biasanya tertanam rasa saling peduli, sehingga dalam berbagai kegiatan untuk kepentingan masyarakat banyak, masing-masing tidak segan mengulurkan tangan untuk bergabung dan membantu penyelesaian pekerjaan. Tapi dengan segala kelebihan dari aturan bertindak model nengah-nyappur ini, memiliki kelemahan juga, yaitu seringkali membuat orang tidak tegas dengan pendiriannya dalam memberikan gagasan dan keputusan. Alasannya karena jika telah tertanam selalu mendahulukan kepentingan pihak lain, menjaga agar jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, maka mengakibatkan terpasungnya berbagai gagasan dan aspirasi pribadi, sehingga kemudian nilai-nilai nengah-nyappur itu justru dapat menggerus nilai-nilai kearifan lokal lainnya. Karena khawatir orang lain tersinggung, lebih baik memilih mengalah; daripada berselisih lebih baik mengalah; dari pada harus bertahan berbahasa Lampung

menimbulkan salah paham, lebih baik mengikuti bahasa dari suku lain, maka lama-lama nilai-nilai budaya sendiri yang makin memudar”.

Jika keterangan informan di atas dicermati, ternyata ada sisi benarnya, akan tetapi menurut hemat peneliti bahwa penerapan nilai-nilai nenek-nyappur dengan cara itu termasuk berlebihan atau mungkin terjadi salah paham (*miscommunication*) dan salah pengertian (*misunderstanding*) dalam menafsirkan fungsi nemui-nyimah itu. Akibatnya nilai-nilai nemui-nyimah diartikan sebagai perilaku masyarakat kelas bawah, sehingga timbul respon negatif dari kalangan pendatang yang seolah mempersilakan pihak lain berkuasa dan memerintah sekehendaknya. Akibatnya harapan dapat mensosialisasi dan menerapkan kearifan lokal agar nilai-nilai nemui-nyimah itu dapat diterima oleh semua pihak, termasuk pemangku adat istiadat lain, malah justru sebaliknya tenggelam dalam arus multikultur itu.

Sementara itu menurut informan 3 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Faktor utama yang menyebabkan sulitnya membumikan nilai-nilai kearifan lokal nenek-nyappuritu, diantaranya adalah karena telah banyak terjadinya kawin silang (asimilasi), termasuk warga saya sendiri. Perkawinan silang ini menyebabkan terjadinya hambatan dalam menerapkan nilai-nilai budaya secara sepihak, karena pihak lainnya menganggap tidak adil. Demikian juga terjadi pada generasi muda hasil dari perkawinan silang itu, mereka tidak tunduk pada salah satu budaya yang dianut bapak atau ibunya, melainkan memilih kebebasan untuk tidak mengikuti jejak kedua orang tuanya, atau melebur nilai-nilai budaya dari kedua orang tuanya yang berbeda itu. Demikian juga bahasa yang digunakan cenderung memilih bahasa nasional (Indonesia), karena mengikuti orang tuanya dan masyarakat sekitar”.

Kemudian menurut pengakuan informan 1 (wawancara Mei 2021), bahwa :

“Kesulitan menerapkan nilai-nilai budaya nenek-nyappur dalam kehidupan keluarga dan dalam masyarakat sehari-hari adalah karena masalah kepribadian yang secara alamiah lebih temperamental dibanding dengan perilaku suku-suku lain yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Tapi di balik temperamen yang relatif tinggi itu, hatinya bersih, terbuka dan apa adanya atau bisa dikatakan tidak memiliki rahasia, sehingga mudah diduga dan bergaul. Menurut saya seharusnya penerapan nilai-nilai pudak waya itu diikuti dengan pemahaman mendalam tentang perilaku orang Lampung yang sedikit lebih kasar dibanding orang Jawa. Harus dapat dipahami bahwa perilaku khas orang Lampung itu bukanlah suatu tanda tidak peduli atau bentuk kejahatan, melainkan lebih

menunjukkan pada ciri khas yang menyimpan jiwa kejujuran. Jadi harapan kami sebagai Penyimbang Adat agar suku lain dapat memakluminya, mengikutinya dengan pola perilaku masing-masing dengan catatan bahwa pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama mencari keberanan dan kebaikan bersama”.

Berbagai harapan positif dari praktik prinsip nengah-nyappur itu ternyata dalam perkembangannya mengalami hambatan (*resistance*), terutama karena beberapa faktor, yaitu:

1. Putusnya rantai regenerasi pemangku adat (*adat holders*), yaitu tidak efektifnya sosialisasi nilai-nilai budaya lokal dari para generasi pemangku adat tua kepada pada generasi pemangku adat muda secara turun temurun dalam waktu yang cukup lama, sehingga terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai nemui-nyimah dengan utuh dan murni;
2. Pengaruh deras masuknya budaya asing melalui media sosial akibat kemajuan teknologi komunikasi, di mana menimbulkan terjadinya penyerapan (*absorption*) dan penerapan (*application*) nilai-nilai budaya asing yang dianggap sebagai alternatif kepentingan yang lebih modern, rasional dan praktis dibanding nilai-nilai budaya lokal;
3. Kondisi masyarakat multikultur (*multicultural society*) sebagai peluang adaptasi, perbandingan dan pertimbangan yang dianggap lebih moderat dan diterima oleh semua pihak dalam bertindak dan bekerjasama;
4. Kegagalan akulturasi (*acculturation*) dan terjadinya asimilasi (*assimilation*) budaya, yaitu pada satu sisi tidak mampu memelihara, menahan dan menyesuaikan diri hidup berdampingan dalam kondisi berbeda prinsip dan budaya dalam waktu lama, yang pada akhirnya timbul gesekan dan letupan peselisihan. Sedangkan pada pihak lain telah terjadi asimilasi melalui proses perkawinan, sebagai akibatnya terjadi peleburan nilai-nilai budaya dari keduanya, sehingga penerapan nilai-nilai budaya lokal, seperti nengah-nyappur menjadi tidak murni;
5. Ketidak-sesuaian antara karakteristik pribadi (*personal characteristics*) atau pola kebiasaan berperilaku orang Lampung yang cenderung bertemperamen tinggi dengan garis pemahaman tentang parameter praktik nilai-nilai nengah-nyappur yang dianggap mirip dengan etika perilaku dalam tata kerama yang

lemah lembut. Akibatnya timbul pemahaman dan perilaku alternatif yang dianggap lebih umum, sehingga pada akhirnya terbentuk model praktik perilaku nengah-nyappur kreasi baru.

Padahal seharusnya nengah-nyappur yang sarat dengan prioritas perhatian terhadap kehormatan orang lain mendorong upaya diri untuk dapat memelihara kepedulian antar sesama masyarakat atau sebagai bentuk solidaritas sosial dengan batas-batas keseimbangan secara timbal balik dan bukan satu arah atau sepihak saja. Hal ini sesuai dengan prinsip utama dari nilai nengah-nyappur itu yang ucapkan dengan kata "*saling*", artinya bersama-sama, bergantian, dua arah, adil dan menyadari jangan sampai pihak lain berkorban melebihi dari kapasitas kepentingan pribadi/golongan. Wujudnya bisa dalam bentuk kerjasama yang dilakukan antarwarga dalam membangun tiyuh/pekon/desa, seperti membangun jembatan, jalan dan sebagainya dengan ketentuan tidak membiarkan pihak-pihak tertentu berkorban berlebihan. Misalnya jangan sampai keramahan orang Lampung dipandang rendah diri atau mental bawahan, toh etika itu baik untuk diadopsi oleh semua etnis yang notabene hidup bersama..

Kesetia-kawanan atau solidaritas sosial di bentuk dengan cara turut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan agar dapat terwujudnya keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan antar sesama manusia. Sesuai dengan perkembangan jaringan hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka penerapan perilaku nemui-nyimah perlu diperluas agar tiap individu dapat mengisi kekurangan satu sama lain dengan leluasa. Namun demikian tentu dalam proses pergaulan sosial yang kian kompleks itu hendaknya harus dilandasi dengan sebuah rasa kepercayaan satu sama lain, dari kepercayaan timbul saling menghargai dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Dalam menjalin pertemanan, kekurangan dan kelebihan teman harus dapat dihargai dan diakui keberadaannya, agar tercipta hubungan masyarakat yang rukun dan harmonis.

Prinsip nengah-nyappur dalam kiprahnya merupakan penunjang utama dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan tuntutan kemajuan era globalisasi seperti sekarang ini. Untuk itu semua pihak, stakeholder atau aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan dituntut pula untuk berorientasi pada kebutuhan dan

kepuasan masyarakat. khususnya bagi para Tokoh Adat di lingkungan Pemerintahan Adat setempat yang memiliki peran memberikan pelayanan kepada masyarakat seharusnya mumpuni dalam menerapkan fungsi dari nengah-nyappur, yaitu memperlancar urusan masyarakat dengan salam, senyum, dan sikap ramah-tamah yang idealnya dilakukan oleh seorang abdi masyarakat.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab. V, secara garis besar ada 3 (tiga) pokok bahasan yang dapat disimpulkan dan disajikan dalam bab.VI ini, yaitu : makna dan fungsi nengah-nyappur, Strategi pelestarian nilai-nilai nengah-nyappur dan faktor-faktor penghambat penerapan nilai nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat. Adapun ke-3 kesimpulan itu adalah sebagai berikut:

A. Makna dan Fungsi Nengah-nyappur

Menurut hasil penelitian ini makna nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat antara lain bahwa secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu kata nengah dan nyappur, nengah memiliki arti (1) kerja keras, (2) berketerampilan dan (3) pertandingan. Sedang kata nyappur berarti tenggang rasa. Untuk mamapu melaksanakan dan menjaga atau kemampuan melaksanakan nengah-nyappur seseorang harus kerja keras agar hidup menjadi produktif. Kerja keras itu juga harus memiliki makna tenggang rasa, karena seseorang harus bekerja bukanlah untuk kepentingan pribadi semata, melainkan dapat dinikmati bersama.

Nengah nyappur melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan seklaiigus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Lebih-lebih melihat kenyataan kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka tradisi nengah-nyappur sangat berarti dalam mendorong kerukunan dan kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sikap nengah nyappur melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan seklaiigus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini selayaknya menjalankan prinsip hidup nengah-nyappur secara wajar dan positif.

Sedangkan fungsi nengah-nyappu dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah:

1. Memelihara Kepedulian dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kepedulian terhadap kegiatan pergaulan masyarakat di lokasi penelitian ini diketahui cukup efektif berlaku sesuai dengan prinsip hidup piil pesenggiri, khususnya unsur nengah-nyappur. Semua kegiatan yang berkaitan dengan interaksi sosial dan pelayanan masyarakat sudah dilakukan secara terbuka dan saling percaya.

Tujuannya dari kegiatan terbuka adalah agar masyarakat mudah memahami dan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang saling percaya dan saling menghargai, sehingga dalam setiap kerjasama untuk kepentingan bersama dapat melahirkan kepuasan bersama pula. Selain itu, dalam praktiknya selalu terbuka, baik dalam hal penentuan waktu, tempat dan biaya penyelesaian proses pelayanan kepada masyarakat, proses pemberian informasi tentang kisi-kisi norma hukum adat yang berlaku, maupun terbuka dalam berbagi tugas dan hasil kerjasama dengan waktu yang singkat sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

Dengan praktik nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur ini diketahui dapat meluruskan, menyelesaikan dan mendamaikan semua pihak, baik dalam hal urusan rumah tangga, pelanggaran hukum adat, perkawinan, urusan perdata adat, maupun dalam kesaksian akta jual-beli, ataupun berupa sengketa bagi hasil kerjasama. Sebagai kosekuensinya bahwa perilaku seseorang yang suka berbaur, bergaul bersama dan selalu aktif ikutserta dalam kegiatan masyarakat, dapat memperlancar penyelesaian masalah dan mendorong seseorang menjadi teladan, populer dan dihormati warga.

Kecuali itu, nilai-nilai nengah-nyappur dapat berfungsi sebagai strategi pengaman sosial dari ancaman arus medornisasi dan nilai-nilai budaya luar yang tidak relevan dengan nilai-nilai budaya lokal. Dengan berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur dapat memelihara kerukunan masyarakat, saling memahami dan mampu mempertahankan nilai-nilai moral sebagai landasan dalam berperilaku dalam pergaulan umum masyarakat.

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan, bahwa fungsi nilai nengah-nyappur dapat mendorong aparatur pemerintahan adat untuk dapat bersikap peduli dan terbuka terhadap warga adat dan masyarakat dalam setiap musyawarah atau menyelesaikan masalah sosial budaya. Dampak positif dari kepedulian sosial yang dijiwai oleh prinsip perilaku nengah-nyappur ini dapat menarik perhatian masyarakat untuk semakin patuh terhadap ketentuan-ketentuan adat dan kebijakan para toko adat dengan perasaan senang penuh dengan ikatan persaudaraan. Hal ini dapat membuat hubungan antar warga masyarakat adat khususnya semakin efektif dan bermanfaat.

2. Memelihara Rasa Tanggungjawab

Tujuan kegiatan nengah-nyappur adalah untuk mewujudkan rasa tanggungjawab pribadi untuk ikurserta di tengah masyarakat membantu meringankan beban kehidupan yang tengah menerpa. Dengan membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah sosial yang ada, berarti telah memberikan tanggungjawab untuk mengurai sebab akibat masalah yang terjadi agar mudah diselesaikan. Indikatornya adalah hampir semua tugas pokoknya sebagai pemimpin pemerintahan adat dapat dilaksanakan secara demokratis dalam upaya peningkatan kemampuan siaga bersama dalam mempertahankan stabilitas dan keamanan masyarakat.

Dengan demikian penarapan nilai-nilai nengah-nyappur dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab yang tinggi, di mana dalam pelaksanaan kerjasama pada umumnya menghasilkan saling percaya antar warga masyarakat adat setempat. Aturan adat yang terkait dengan tanggungjawab pemerintahan adat di pusat-pusat sekretariat marga/kebuwaian diterapkan berdasarkan nilai-nilai nengah-nyappur, sehingga dapat mendorong masyarakat adat untuk dapat meningkatkan kualitas pergaulan dengan hati sikap yang jujur dan terbuka. Lebih lanjut dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan kewajibannya. Dalam hal ini nilai-nilai nengah-nyappur diketahui masih melekat dalam kepribadian masyarakat adat pada umumnya. Dengan berpedoman pada nilai-nilai nengah-nyappur, maka setiap tokoh adat bersama

warganya akan senantiasa memenuhi kewajibannya yang sudah ditetapkan. Bagi warga yang mampu menerapkan nilai nengah-nyappur, maka ia akan memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana telah dibebankan kepadanya.

3. Meningkatkan Disiplin Kerja

Disiplin merupakan sikap yang bersifat individual sebagai dasar perilaku yang sangat berpengaruh terhadap nilai urusan pribadi dan kepentingan bersama. Untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja, dibutuhkan latihan dengan kesadaran diri tentang pentingnya sikap disiplin sebagai pedoman dalam berkerja dan dalam berperilaku sehari-hari.

Sikap disiplin ini timbul sangat tergantung pada eratnya keterikatan masyarakat adat dengan nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur. Bagi mereka yang memiliki keterikatan dengan nilai-nilai nengah-nyappur ini cenderung terdorong untuk selalu menerapkan tanggungjawabnya dalam bentuk disiplin kerja, sehingga dapat membawa dampak positif bagi kemajuan kerukunan, kebersamaan dan keadilan. Tokoh adat yang dapat menegakkan teladan kedisiplinan di tengah masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan disiplin kerja bagi masyarakat adat di bawah kekuasaannya. Tokoh adat yang dapat mencontohkan hal baik pada warganya dan mampu memberikan arahan dengan baik dan bijak, maka dapat menjadi pendorong bagi warganya untuk selalu disiplin dalam melaksanakan pekerjaan.

Manfaat disiplin diantaranya adalah: 1) dapat menumbuhkan kepekaan. Sikap ini memudahkan dirinya mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. 2) menumbuhkan kepedulian sosial, yaitu bentuk perhatian dan empati terhadap kebutuhan dan kepentingan orang lain, di samping dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam memecahkan masalah dengan baik. 3) mendorong terciptanya kepatuhan dan keteraturan sosial. 4) menumbuhkan rasa percaya diri, terutama dalam melakukan sesuatu pekerjaan secara mandiri. 5) meningkatkan kemampuan beradaptasi sehingga dapat menumbuhkan keakraban dan ramah terhadap orang lain.

4. Menumbuhkan Toleransi dalam Masyarakat Multi Kultur

Dalam kehidupan masyarakat multi kultur perlu diikat dengan kesadaran toleran untuk saling menghargai satu sama lainnya. Kelompok masyarakat beragam ini mensiasati perbedaan sebagai kekuatan untuk survive (bertahan hidup), karena warganya memiliki kesepakatan bersama tentang aturan berbuat dalam pergaulan.

Prinsip nengah-nyappur yang bersumber daya kepiawaian dalam pergaulan mengutamakan urusan penyelesaian masalah masyarakat, di mana memerlukan rasa toleransi yang kuat. Oleh karena itu penting untuk menerapkan prinsi nemui-nyimah agar dapat menumbuhkan toleransi sosial. Dengan toleransi berarti ada upaya kebebasan kepada sesama manusia sebagai warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing. Dengan menerapkan toleransi berarti sekaligus telah menerapkan prinsip pergaulan nengah-nyappur. Prinsip nengah-nyappur merupakan suatu falsafah hidup yang sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat, bukan hanya masyarakat yang bersuku Lampung saja akan tetapi berlaku juga bagi masyarakat yang bersuku lain.

Pada prinsipnya nilai-nilai nengah-nyappur dalam praktiknya dapat mendorong warga masyarakat dan para penyimbang adat untuk berbuat toleran atau saling menghargai, menghormati dan membiarkan pihak lain menjalankan prinsip hidup dan keyakinannya. Kebiasaan masyarakat dan penyimbang adat dalam praktik nengah-nyappur ini nampak terwujud dalam kegiatan kerjasama yang saling menghargai. Sikap perikalu ini diketahui berhasil mendorong warga dalam menciptakan persatuan dan perdamaian warga masyarakat yang beragam tersebut. Dampak positif dari penerapan prinsip hidup nengah-nyappur ini diketahui dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah pelayanan terhadap segala urusan masyarakat yang cepat, mudah, lancar, dan tertib.

5. Menciptakan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

Pelayanan bisa diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pada dasarnya melayani adalah kegiatan yang bersifat tidak berwujud yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani. Karakteristik melayani menurut prinsip nengah-nyappur adalah kemampuan menempatkan diri dalam kehidupan masyarakat sebagai pelayan yang tangguh dalam memberikan keteladanan.

Dalam konsep pelayanan prima dijelaskan bahwa pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Melayani berarti membantu menyiapkan apa yang diperlukan pihak lain. Dengan praktik nengah-nyappur, aktivitas pelayanan dapat membuat masyarakat merasa dipermudah dan diperlancar. Dalam usaha mewujudkan pelayanan yang prima ini warga masyarakat dalam setiap musyawarah adat selalu membuat rambu-rambu tentang syarat, ketentuan dan etika perilaku yang harus dipenuhi secara terbuka diumumkan dihadapan warga.

Bentuk konkrit pergaulan nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat adat setempat terkini ternyata sangat relevan mendukung sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Seseorang warga yang memiliki kepedulian terhadap orang lain berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berpandangan luas ke depan dengan kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain. Para penyimbang yang menerapkan prinsip nengah-nyappur pun demikian, mereka tidak ingin sampai masyarakat kecewa karena kurang pelayanan yang baik; mereka akan semaksimal mungkin berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi warga adatnya. Pada intinya kepribadian nengah-nyappur mampu mendorong semua pihak di Desa setempat untuk melakukan tindakan berupa memperlancar serta mempermudah pelayanan bagi masyarakat.

6. Memperkuat Ikatan Solidaritas Sosial

Secara ringkas, solidaritas dapat diartikan sebagai rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati, sebagai ungkapan kesetiakawanan untuk

mencapai kepentingan bersama. Rasa solidaritas sosial mendorong lahirnya ikatan sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan bersama dalam kehidupan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai nengah-nyappur dapat mendorong tumbuhnya ikatan silidaritas sosial, sehingga warga masyarakat pada umumnya dapat saling peduli dan saling menghargai dalam kerjasama. Nemui-nyimah dalam praktiknya dapat melahirkan rasa solidaritas antar sesama, yaitu rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati, dan dapat menumbuhkan perasaan kepentingan bersama.

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa nengah-nyappur dapat meningkatkan solidaritas masyaarakat. Bentuk solidaritas sosial ini terlihat dari kebersamaan mereka yang saling melengkapi satu sama lain, bekerjasama dengan tertib dan teratur dalam melakukan proses penyelesaian pekerjaan bersama. Secara umum, bentuk kebersamaan dalam aktivitas kerjasama atau dalam pelayanan kepada masyarakat.

Diketahui bahwa nemui-nyimah telah menjadikan para Penyimbang Adat memiliki kewajiban untuk terdorong meningkatkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai nengah-nyappur, Penyimbang Adat selalu merasa ingin dekat bersama masyarakat, dan memelihara sikap saling terbuka, yang diharapkan dapat menjaga tali silaturahmi bersama masyarakat. Oleh karena solidaritas sosial masyarakat pada umumnya sudah relatif memadai, maka para Penyimbang Adat merasa sangat mudah menggerakkan warganya untuk peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial di desa, seperti kegiatan kerja bakti dan pemeliharaan fasilitas umum lainnya.

B. Strategi Penerapan Prinsip Nilai Nengah-nyappur

Prinsip nengah-nyappur seperti telah diuraikan di muka, bahwa dalam praktiknya dilandasi rasa keikhlasan dari hati nurani yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat melaui kepiyawaian bergaul di tengah masyarakat. Perilaku nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat dapat diartikan sebagai ungkapan dalam perbuatan asas kekeluargaan, keakraban dan

kerukunan antar warga masyarakat. Perilaku nengah-nyappur merupakan kewajiban menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keramahan, kesopanan, keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

Menurut informan dalam penelitian ini ada beberapa strategi penerapan prinsip nilai nengah-nyappur, diantaranya adalah:

1. Membuat Sanggar Budaya

Bentuk konkrit nengah-nyappur dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial, naluri keinginan bergaul dan rasa kesetiakawanan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kesetiakawanan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain, melainkan suka menyenangkan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat, strategi pembangunan sanggar budaya merupakan suatu cara untuk membantu dan menyalurkan hasrat masyarakat untuk memperbaiki hubungan masyarakat yang mungkin selama ini kian renggang. Dengan fasilitas sanggar, maka dapat memberi peluang kemudahan bagi masyarakat dari segi wahana tempat bergaul bersama dengan bekerjasama dalam proses produksi memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan strategi ini warga dapat memperkecil atau bahkan menghilangkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, dan terhindar dari terkurasnya tenaga pisik dan sumber daya alam yang merugikan. Dalam hal ini berarti dengan membangun sanggar budaya dapat memengaruhi nilai dan etika perilaku masyarakat menjadi lebih efisiensi dalam konteks produktivitas manusia dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

2. Membentuk Lembaga Penyimbang Adat

Pada umumnya para penyimbang dan sebagian besar masyarakat adat sepakat untuk berupaya melestarikan nilai-nilai budaya, terutama prinsip-prinsip nengah-nyappur. Hal ini dirasa penting karena menurut pengamatan mereka telah terjadi pemudaran penerapan sikap perilaku nengah-nyappur dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam rangka pelestarian prinsip

hidup nengah-nyappur, maka para Penyimbang Adat merasa perlu membentuk Lembaga Adat yang disebut Majelis Penyimbang Adat Sebatin. Lembaga adat ini telah dibuat draftnya, yaitu Majelis Penyimbang Adat Daibatin (MPAS). Dengan lembaga ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam kegiatan upaya pelestarian nilai-nilai nengah-nyappur.

3. Memperkuat Sumber Daya Masyarakat

Sumber daya masyarakat adalah keberdayaan masyarakat yang mampu melakukan penataan kelompok sosialnya agar dapat meningkatkan kualitas kerjasama, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah; kesadaran untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengembangkan berbagai bentuk kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat dan mengembangkan manajemen sumber daya yang dimiliki masyarakat secara transparan. Dasarnya adalah mengungkap atau mengangkat harkat sikap dan perilaku terbuka yang diikuti oleh disiplin kepribadian, tertib bertugas, rapi berbusana, mandiri dalam kehidupan, sikap menghargai waktu, sikap sportif, dan sejenisnya. Terutama tentang sikap dan perilaku hidup tertib dan disiplin sangat berguna untuk membina moral dan mentalitas masyarakat lokal sebagaimana harapan yang terkandung dalam prinsip Nengah-nyappur.

Dengan demikian pembinaan terhadap pendidikan moral, budi pekerti, dan pemahaman nyata terhadap nilai-nilai nengah-nyappur dapat ditingkatkan, sehingga kerukunan dan persatuan masyarakat lokal pada umumnya dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keberhasilan meningkatkan stabilitas masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat adat yang berbasis nilai-nilai nengah-nyappur tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kerukunan, kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam keputusan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelestarian Nengah-Nyappur

Nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur merupakan prinsip atau pedoman hidup dalam bersikap dan berperilaku agar kehadiran seseorang dapat memberikan kenyamanan dan diterima di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Dalam prinsip kearifan lokal nengah-nyappur itu mengandung kebaikan bagi kehidupan masyarakat, sehingga nengah-nyappur dalam wujud sikap perilaku kian lama makin mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Nilai-nilai nengah-nyappur dalam praktiknya diakui sebagai warisan budaya tentang pedoman bersikap dan berperilaku yang tergolong dalam kekayaan intelektual dan kultural yang perlu dilestarikan.

Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, maka warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Dalam perkembangan zaman dengan segala fasilitas yang mempengaruhinya, justru sebaliknya makin banyak orang hendak mencari keuntungan besar dengan cara-cara instan, culas dan kurang peduli terhadap kesulitan orang lain, bahkan kadang tak sedikit orang yang tega mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan situasi. Ada beberapa faktor yang menghambat pelestarian nilai-nilai kearifan lokal nemui-nyimah, diantaranya adalah:

1. Masuknya Budaya Asing

Hambatan dalam mewujudkan kepedulian sosial sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai nengah-nyappur adalah rasa ego yang berlebihan yang mendoktrin bahwa semua tindakan seseorang terarah pada kehendak untuk mengutamakan kepentingan pribadi, berharap pertolongan tapi enggan menolong; mau didengar tapi tidak mau dengar. Biasanya secara kumulatif didukung oleh kuatnya sikap perilaku manusia yang sangat mengutamakan materi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Di samping itu dengan masuknya budaya asing yang dianggap sebagai sebuah kemajuan positif, yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan dan budaya

baru yang dianggap setara atau bahkan lebih maju dari nilai-nilai budaya lokal. Generasi baru menganggap budaya asing itu sebagai wilayah baru, di mana upaya untuk memperoleh kesadaran empati kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara belajar dari pengalaman dan mempelajari pengalaman orang lain yang lebih maju, praktis dan efisien. Prinsip baru yang tumbuh adalah bahwa jika ingin menjadi orang yang simpatik, disegani dan dihormati masyarakat, maka belajarlh untuk sanggup mendengarkan orang lain. Jika hendak bertanya, bertanyalah dengan kalimat yang orang lain akan senang menjawabnya. Bagi figur yang memiliki kepribadian semacam ini, minimal secara evolusi akan menuai banyak penghargaan dan kehormatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Kenyataan inilah yang selama ini dirasakan menjadi penghambat upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur.

2. Perubahan Pola Pikir Masyarakat

Nengah-nyappur merupakan kewajiban bagi masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran. Perilaku pergaulan yang penuh dengan keikhlasan, saling terbuka dan peduli terhadap sesama sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai makhluk sosial yang senantiasa tak terhindar dari bantuan orang lain. Perilaku nengah-nyappur dalam konteks kehidupan masyarakat lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Nengah-nyappur mengandung nilai budaya yang dapat berfungsi untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan antara lain motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain.

Tapi karena kehidupan sosial masyarakat setempat mengalami perubahan, seperti perubahan kondisi geografis, kebudayaan, dinamika dan komposisi penduduk, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru, maka sangat rentan terjadinya perubahan pola pikir masyarakat. Dengan demikian nengah-nyappur sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam pergaulan, juga mengalami perubahan seiring dengan tuntutan kemajuan zaman.

Perubahan pola pikir masyarakat itu juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Lampung yang multikultur, yaitu memiliki *keragaman (plural)* kebudayaan. Dengan terjadinya perubahan pola pikir masyarakat tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kesulitan para pemangku adat untuk dapat melestarikan nilai-nilai budaya setempat, khususnya nilai-nilai kearifan lokal nengah-nyappur.

3. Kesalahpahaman terhadap Nilai-nilai Nengah-nyappur

Nengah-nyappur idealnya dapat berfungsi mendorong masing-masing pihak untuk saling menghargai dan saling menerima. Dengan prinsip nengah-nyappur dapat memelihara kepedulian antarsesama masyarakat atau sebagai solidaritas sosial. Wujudnya bisa dalam bentuk kerjasama yang dilakukan antar warga dalam membangun tiyuh/pekon/desa, seperti membangun jembatan, jalan dan sebagainya. Solidaritas sosial di bentuk dengan cara turut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan agar dapat terwujudnya keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan antar sesama.

Berbagai harapan positif dari praktik prinsip nengah-nyappur itu ternyata dalam perkembangannya mengalami hambatan (*resistance*), terutama karena kesalahpahaman masyarakat terhadap filosofi nilai-nilai nengah-nyappur tersebut. Sebagian warga masyarakat menganggap nengah-nyappur sebagai kegiatan pencitraan agar lebih banyak mendapatkan perhatian umum, lantaran tanpa sosialisasi yang konkrit. Dalam waktu yang cukup lama, maka ada kecenderungan terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan nilai-nilai nemui-nyimah dengan utuh dan murni. Kondisi masyarakat multikultur (*multicultural society*) sebagai peluang adaptasi, perbandingan dan pertimbangan yang dianggap lebih moderat dan diterima oleh semua pihak dalam bertindak dan bekerjasama. Pemahaman tentang parameter praktik nilai-nilai nengah-nyappur yang dianggap mirip dengan etika perilaku dalam tata kerama yang lemah lembut, berdampak timbul pemahaman dan perilaku alternatif yang dianggap lebih umum, sehingga pada akhirnya terbentuk model praktik perilaku nengah-nyappur kreasi baru.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini telah ditemukan kendala utama dalam penerapan nilai-nilai nemui-nyimah, yaitu kecenderungan terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi (*miscommunication*) dalam mencerna makna dan fungsi perilaku nengah-nyappur dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembentukan lembaga adat, yaitu Majelis Penyimbang Adat Sebatin (EMPAS) sebagai forum musyawarah adat dalam upaya pelestarian prinsip hidup nengah-nyappur. Untuk ini diharapkan adanya uluran tangan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembentukan lembaga adat tersebut dalam bentuk “*Program Pemberdayaan Lembaga Adat.*”

DAFTAR PUSTAKA

1. Maria, Julia. 1993. *Kebudayaan Orang Menggala*. UI Press. Jakarta
2. Dani, Fachrudin. 2010. *Menggali dan Aktualisasi Kearifan Lokal Daerah Lampung dalam Rangka Membangun Ketahanan Sosial Masyarakat*. <http://fachruddindani.blogspot.com/2010/10/menggali-dan-aktualisasi-kearifan-lokal.html>. Diakses 20 Februari 2021.
3. Abdulsyani. 2010. <http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/>. Diakses 22 Februari 2021
4. Abdulsyani. 2007. *SOSIOLOGI Skematika, Teori dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta.
5. Abdulsyani. 2021. *SOSIOLOGI Pendekatan Praktik Strategi Hubungan Masyarakat*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
6. Abdulsyani. 2013. Makalah: Kearifan Lokal Sebagai Aset Budaya Bangsa Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat (*di sampaikan pada seminar/lokakarya pada kegiatan Diklat Bidik Misi Di Universitas Lampung, tanggal 24 Januari 2013*).
7. Mastal, Zubaidi. 1995. *Fungsi Keluarga bagi masyarakat Lampung dalam Meningkatkan Sumberdaya Manusia Bandar Lampung*. Dukbud Provinsi Lampung.
8. Hasan, Zainudin. 2017. *Nengah Nyappur, Nilai Sosial Pergaulan (2)*. <https://m.lampost.co/berita-nengah-nyappur-nilai-sosial-pergaulan-2.html>. Diakses 23 Februari 2021.
9. Abdul Syani. 2013. *Falsafah Hidup Masyarakat Lampung Sebuah Wacana Terapan*. <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/02/falsafah-hidup-masyarakat-lampung->. Diakses 23 Februari 2021.
10. Sumendra, Wayan. *Kearifan Lokal (Budaya 3)*. <http://wayansumendra.wordpress.com/2013/08/25/kearifan-lokal-budaya-3>. Diakses 22 Februari 2021.
11. Irham, Muhammad Aqil. *Lembaga Perwatin dan Kepunyimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis*. <https://media.neliti.com/media/publications/56756-ID-lembaga-perwatin-dan-kepunyimbangan-dala.pdf>. Diakses 21 Februari 2021.
12. Millies dan A, Michael Huberman. 1997. Analisis Data.
13. Mografi Desa Bulok 2020, Kalianda, Lampung Selatan.
14. Munawar, Said Agil. 2005. *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*. Ciputat Press. Jakarta.
15. Fattah, Hanurawan. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
16. Wardhani dkk. 1982. *Kepedulian Ekonomi dan Sosial*. Bulan Bintang. Jakarta.
17. 2017. Teori Tanggung Jawab. <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2017/11/teori-tanggung-jawab.html>. Diakses 6 Juli 2021.
18. Soekanto. Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
19. Abdulsyani. 2021. *SOSIOLOGI Pendekatan Praktik Strategi Hubungan Masyarakat*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

20. 2015. Pengertian Pelayanan Prima.
<http://ciputrauceo.net/blog/2015/7/7/pengertian-pelayanan-prima>. Diakses 6 Juli 2021.
21. http://etheses.uin-malang.ac.id/1774/5/09410038_Bab_2.pdf. Diakses 10 Juli 2021.
22. <http://pengayaan.com/>. Diakses 10 Juli 2021.
23. Pengertian Solidaritas, Jenis, Manfaat, Tujuan dan Faktor Yang Mempengaruhi Solidaritas. 2017. <http://www.pelajaran.co.id/2017/15/pengertian-solidaritas-jenis-manfaat-tujuan-dan-faktor-yang-mempengaruhi-solidaritas.html>. Diakses 6 Juli 2021
24. Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
25. Widjaja, AW .2003. *Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
26. Abdulsyani. 2010. Falsafah Hidup Masyarakat Lampung Sebuah Wacana Terapan. website <http://abdulsyani.blogspot.com>). Diakses 5 Juli 2021
27. Abdulsyani. 2019. *Pokok-pokok Materi Perkuliahan Pengantar Sosiologi*. Universitas Lampung. Lampung
28. Soemardjan, Selo & Kennon Breazeale. 1993. *Cultural Change in Rural Indonesia: Impact of Village Development*, Jakarta; UNS-YIIS-East West Center
29. Abdulsyani, 2013. Makalah: Kearifan Lokal Sebagai Aset Budaya Bangsa Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat (*di sampaikan pada seminar/lokakarya pada kegiatan Diklat Bidik Misi Di Universitas Lampung, tanggal 24 Januari 2013*). Universitas Lampung. Lampung
30. Abdulsyani. 2011. Makalah: “Pluralitas Budaya Di Lampung, Konflik Dan Solusinya”. dialog kesejarahan di Lampung, yang diselenggarakan di Aula FKIP Kampus Universitas Lampung pada tanggal, 15 Oktober 2011.